



Kemendikdasmen
Direktorat Sekolah Dasar

LAPORAN KINERJA

Direktorat Sekolah Dasar

Tahun 2025

DIREKTORAT SEKOLAH DASAR

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



ditpsd



ditpsdtv



@ditpsd_dikbud



Direktorat Sekolah Dasar



direktoratsd



Direktorat Sekolah Dasar
MENUJU
ZI-WBK

Penanggung Jawab :

Moch. Salim Somad, S.Kom., M.Pd
Zimmy Zulkarnaen Iman, S.E., M.M.
Yoto, S.E., M.A.

Tim Penyusun :

Muhamad Basyir Jabar, S.Tr.Ak
Veruca Rendratika, S.Sos.
Audina Islamiyah
Muhammad Ridho Arsyah
Wulan Ayu Indriani

Kontributor :

Dr. Djohan Achmadi, M.Ed
Minhajul Ngabidin, S.Pd, M.Si
Dr. Suhadi
Niknik Kartika, S.Pd, M.AP
David Eka Wardoyo, SPI.
Dr. Lanny Anggraini, S.Pd., MA
Djoko Stio Sudjarmiko, S.E., M.Ak.
Arie Fitria, S.E.
Yohan Rubiyantoro, M.A., Ph.D.
Muhammad Noor Ginanjar Jaelani, S.Pd.
Yono
Wiryono
Triya Oktavina, S.E.
Slamet Siswanto, SE.
Adzkia Mutiari Silmi
Elvandia Puja Hanggrita
Anji Sugidjaja, S.Kom

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Direktorat Sekolah Dasar berhasil menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025 dengan tepat waktu.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025. Direktorat Sekolah Dasar pada tahun 2024 menetapkan 3 (tiga) sasaran kinerja dan 8 (delapan) indikator kinerja. Secara umum, Direktorat Sekolah Dasar telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Sekolah Dasar pada tahun 2025. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Direktorat Sekolah Dasar pada tahun 2025.



Jakarta, 30 Januari 2026
Direktur Sekolah Dasar



Moch. Salim Somad
NIP 197410062003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GRAFIK	7
DAFTAR GAMBAR	8
IKHTISAR EKSEKUTIF	11
BAB I PENDAHULUAN	15
1.1. Gambaran Umum	15
1.2. Dasar Hukum	17
1.3. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	17
A. Tugas Direktorat Sekolah Dasar	17
B. Fungsi Direktorat Sekolah Dasar	18
C. Struktur Organisasi	18
a. Subbagian Tata Usaha	20
b. Tim Kerja Direktorat Sekolah Dasar	20
1.4. Isu-Isu dan Peran Strategis Organisasi	20
A. Isu-Isu Strategis	20
a. Partisipasi Pendidikan	20
b. Kualitas	20
c. Pembiayaan Pendidikan	21
B. Peran Strategis Organisasi	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1. Rencana Strategis Direktorat Sekolah Dasar	22
A. Visi, Misi, Tujuan Strategis, dan Matriks Kinerja Direktorat Sekolah Dasar	22
B. Program Prioritas Direktorat Sekolah Dasar	25
a. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah	25
b. Program Digitalisasi Pembelajaran Pendidikan	25
2.2. Perjanjian Kinerja Direktorat Sekolah Dasar	26
A. SK, IKK, dan Alokasi Anggaran PK Direktorat Sekolah Dasar TA 2025	26
2.3. Rencana Aksi Direktorat Sekolah Dasar	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Akuntabilitas Kinerja	29
A. SK-1 Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas	30
IKK.1.1. Jumlah SD menerima program afirmasi	30
IKK.1.3. Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras	42
B. SK-2 Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas	46
IKK.2.1. SD yang memiliki nilai litnum mencapai kompetensi minimum	46
IKK.2.2. SD yang menerapkan kurikulum yang berlaku	55
IKK.2.3. SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	64
C. SK-3 Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Dasar	73

IKK.3.1.Capaian NKA Direktorat SD dengan kategori sangat baik	74
IKK.3.2. Predikat AKIP Direktorat Sekolah Dasar minimal A	77
3.2 Realisasi Program.....	87
A. Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	87
B. Efisiensi Anggaran	87
C. Kinerja Lain-Lain	88
1.Reformasi Birokrasi.....	88
D. Inovasi, Penghargaan, dan Program <i>Croscutting/Collaborative</i>	89
1.Inovasi.....	89
2.Penghargaan	94
3.Program <i>Crosscutting/Collaborative</i>	95
BAB IV PENUTUP	99
4.1. Kesimpulan.....	99
4.2. Rekomendasi.....	99
1.Strategi.....	99
2.Program	100
3.Kegiatan.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Ketercapaian Realisasi IKK Direktorat SD Tahun 2025	12
Tabel 2.1. Visi Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025	22
Tabel 2.2. Misi Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025	23
Tabel 2.3. Tujuan Strategis Direktorat Sekolah Dasar	23
Tabel 2.4. Target Indikator Kinerja Direktorat SD Jangka Menengah	24
Tabel 2.5. Kategori Bantuan Peralatan Listrik dan Internet untuk Mendukung Digitalisasi Pembelajaran	26
Tabel 2.6. Target dan Alokasi Anggaran Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025 Sebelum Direvisi	26
Tabel 2.7. Alokasi Anggaran Direktorat Sekolah Dasar Tahun Pada Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Direvisi	27
Tabel 3.1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja IKK Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025	29
Tabel 3.2. Daftar Sekolah Dasar yang mendapatkand Pendampingan ke Daerah Terkait E-Ijazah oleh Direktorat Sekolah Dasar	60
Tabel 3.3. Batas Atas dan Bawah Kategori Penilaian NKA Tahun 2025	74
Tabel 3.4. Bobot Penilaian Evaluasi AKIP	77
Tabel 3.5. Rentang Nilai Predikat AKIP	78
Tabel 3.6. Alokasi Anggaran Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja	87
Tabel 3.7. Daftar Mitra Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025	95

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Jumlah Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat SD Tahun 2025.....	13
Grafik 1.2. Jumlah P3K Direktorat SD Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Grafik 1.3. Jumlah ASN Direktorat SD Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin	15
Grafik 1.4. Jumlah ASN Direktorat SD TA 2025 Berdasarkan Pendidikan Terakhir ..	16
Grafik 1.5. Jumlah P3K Direktorat SD TA 2025 Berdasarkan Pendidikan Terakhir...	16
Grafik 3.1. Target/Realisasi IKK Jumlah SD Menerima Program Afirmasi TA 2025 ..	31
Grafik 3.2. Target Jangka Panjang dan Realisasi TA 2025 IKK SD yang Menerima Program	32
Grafik 3.3. IKK Penanggulangan ATS : Realisasi Tahun 2025 dan Target Kinerja Jangka Panjang	38
Grafik 3.5. IKK Persentase SD yang Memenuhi SNP Sarpras : Realisasi Tahun 2025 dan Target IKK Jangka Panjang	43
Grafik 3.6. IKK Persentase SD yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku : Realisasi IKK Tahun 2025 dan Target Kinerja Jangka Panjang	56
Grafik 3.7. IKK Persentase SD yang Memiliki Skor Karakter Peserta Didik pada Kategori Baik : Realisasi IKK Tahun 2025 dan Target Jangka Panjang ...	66
Grafik 3.8. IKK Predikat AKIP Direktorat SD : Realisi IKK Tahun 2022-2025	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025	19
Gambar 3.1. Advokasi WB 13 Tahun ke Kabupaten Musi Banyuasin	33
Gambar 3.2. Advokasi WB 13 tahun ke Kabupaten Pulon Progo	33
Gambar 3.3. Pembahasan Program Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan	34
Gambar 3.4. Strategi Direktorat SD dalam Pelaksanaan WB 13 Tahun 2025.....	36
Gambar 3.5. Dashboard ATS Kemendikdasmen.....	37
Gambar 3.6. Diskusi Kegiatan Monev Asesmen Nasional Tahun 2025.....	50
Gambar 3.7. Narasumber Direktorat SD Menjelaskan Materi Kepada Peserta	50
Gambar 3.8. Memperkenalkan PID di Serdang Berdagai.....	52
Gambar 3.9. Peserta PID di Serdang Berdagai Menguji Perangkat	52
Gambar 3.10. Penjelasan Materi Kegiatan Sosialisasi E-Rapor Tahun 2025.....	57
Gambar 3.11. Berkas Panduan Instalasi E-Rapor Sekolah Dasar	58
Gambar 3.12. Pendampingan E-Ijazah Direktorat SD di Makassar TA 2025	59
Gambar 3.13. Pendampingan E-Ijazah Direktorat SD di Kalbar TA 2025.....	59
Gambar 3.14. Wawancara Petugas dengan Siswa SDN Pondok Benda 01	61
Gambar 3.15. Wawancara Petugas dengan Siswa di SD Negeri Tamangapa	61
Gambar 3.16. Pendampingan Sekolah Aman, Nyaman, dan Menyenangkan.....	69
Gambar 3.17. Banner Pembekalan Sahabat Sekolah Dasar Tahun 2025.....	69
Gambar 3.18. Siswa yang Hadir Kegiatan Pembekalan Sahabat Sekolah Dasar	70
Gambar 3.19. Sosialisasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Anak SD.....	71
Gambar 3.20. Filosofi Bapak Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed	73
Gambar 3.21. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat SD Tahun 2025.....	75
Gambar 3.22. Panitia Kegiatan Sosialisasi Penyusunan SKP	80
Gambar 3.23. Peserta Kegiatan yang Berdiskusi	80
Gambar 3.24. Narasumber Menyampaikan Penyesuaian Profil KemendikbudHR	80
Gambar 3.25. Peserta Kegiatan Pengukuran Akuntabilitas Triwulan I Tahun 2025	81
Gambar 3.26. Kegiatan Pengukuran Akuntabilitas Triwulan II Tahun 2025.....	81
Gambar 3.27. Kegiatan Pengukuran Kinerja Direktorat SD Triwulan IV TA 2025	81
Gambar 3.28. Peserta Rapim C Direktorat Sekolah Dasar.....	82
Gambar 3.29. Direktur Sekolah Dasar Bersama Kepala Subdit Sarpras.....	83
Gambar 3.30. Tampilan Login Akun SPASIKITA Tahun 2025.....	84
Gambar 3.31. Tampilan Beranda SPASIKITA	84
Gambar 3.32. Pegawai Tim Kerja Pendidikan Kesetaraan Diwawancarai.....	85

Gambar 3.33. Kasubbag TU Direktorat Sekolah Dasar (Kiri) Diwawancarai	85
Gambar 3.34. Bapak Direktur Sekolah Dasar (Kiri) Diwawancarai	85
Gambar 3.35. Anggota Tim Perencanaan/Evaluasi Kinerja Diwawacarai	85
Gambar 3.36. Tampilan Login Akun Potret Kinerja Direktorat Sekolah Dasar.....	89
Gambar 3.37. Tampilan Beranda Potret Kinerja Direktorat Sekolah Dasar	90
Gambar 3.38. Tampilan Laman Beranda GIAT-SD Tahun 2025	91
Gambar 3.39. Channel Youtube Direktorat Sekolah Dasar	92
Gambar 3.40. Salah Satu Tayangan Video Channel GIAT-SD Tahun 2025	93
Gambar 3.41. Piagam Penghargaan ZI-WBK Direktorat SD TA 2025.....	94

Lampiran :

- 1) SK Tim SAKIP Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025
- 2) Perjanjian kinerja tahun 2025 sebelum direvisi
- 3) Perjanjian kinerja tahun 2025 setelah direvisi
- 4) Rencana aksi Direktorat Sekolah Dasar tahun 2025
- 5) Laporan kinerja Direktorat Sekolah Dasar triwulan I tahun 2025
- 6) Laporan kinerja Direktorat Sekolah Dasar triwulan II tahun 2025
- 7) Laporan kinerja Direktorat Sekolah Dasar triwulan III tahun 2025
- 8) Laporan kinerja Direktorat Sekolah Dasar triwulan IV tahun 2025
- 9) Optimalisasi anggaran Direktorat Sekolah Dasar tahun 2025
- 10) Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025
- 11) SK Tim Penyusun LAKIN Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025
- 12) Surat undangan reviu LAKIN Direktorat Sekolah Dasar tahun 2025
- 13) Daftar hadir peserta kegiatan reviu LAKIN tahun 2025
- 14) Kerja kerja reviu LAKIN Direktorat Sekolah Dasar tahun 2025 oleh tim Satuan Pengendalian Internal (SPI)
- 15) Surat pernyataan laporan kinerja telah direviu

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Sekolah Dasar periode 2025–2029, sekaligus menjadi fondasi penting bagi penguatan tata kelola organisasi dan percepatan pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan. Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Sekolah Dasar periode 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan sekolah dasar
- 2) Memperkuat mutu layanan pendidikan sekolah dasar
- 3) Memperkuatnya sistem tata Kelola Direktorat Sekolah Dasar yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Melalui perumusan tujuan ini, Direktorat Sekolah Dasar berupaya mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dikelola internal agar dapat memberikan hasil kinerja yang optimal, selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan, serta mampu menjawab kebutuhan pemangku kepentingan.

Pada Tahun 2025, Direktorat Sekolah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam upaya mendukung merealisasikan tujuan strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Sekolah Dasar periode 2025-2029. Capaian indikator tujuan strategis secara umum menunjukkan hasil yang baik, yang mencerminkan meningkatnya efektivitas pelaksanaan kinerja satker dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

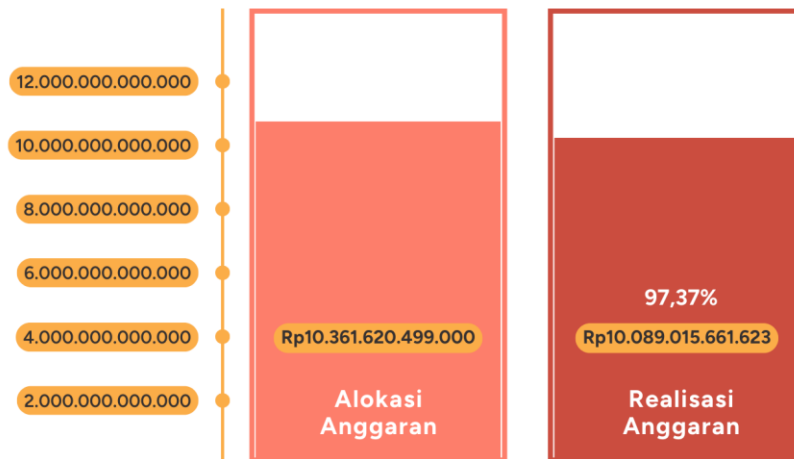
Pencapaian tersebut didukung oleh perencanaan kinerja yang terukur, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala. Meskipun pada tahun ini dihadapkan pada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, Direktorat Sekolah Dasar telah melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian strategi untuk memastikan ketercapaian target kinerja yang melibatkan pimpinan. Capaian kinerja yang telah diperoleh Direktorat Sekolah Dasar pada tahun 2025 menjadi landasan bagi peningkatan kinerja untuk menyesuaikan kembali perencanaan kinerja, serta strategi dan kebijakan pada tahun berikutnya.

Pada laporan kinerja ini menyajikan target kinerja dalam jangka panjang sesuai Renstra Direktorat Sekolah Dasar periode 2025-2029 yang merupakan target, dan target serta realisasi kinerja pada tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Sekolah Dasar tahun 2025, dan laporan realisasi kinerja dan anggaran Direktorat Sekolah Dasar per triwulan tahun 2025. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Sekolah Dasar tahun 2025 rata-rata menunjukkan tren positif. Dari 3 (tiga) Sasaran Kinerja (SK) dan 8 (Delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), terdapat capaian kinerja yang sesuai target yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) IKK, lalu 4 (empat) IKK yang melebihi target kinerja, dan 1 (satu) IKK masih di bawah target kinerja berdasarkan target dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat nama-nama IKK tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1. Daftar Ketercapaian Realisasi IKK Direktorat SD Tahun 2025

No.	Persentase Pencapaian Target Kinerja	Daftar Nama Indikator Kinerja Kegiatan
1.	> 100% (Melebihi target)	1. Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD dengan persentase realisasi sebesar 1.330, 41% 2. Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras dengan persentase realisasi sebesar 184,98% 3. Persentase SD yang menerapkan kurikulum yang berlaku sebesar 101,53% 4. Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum dengan persentase perbandingan target dan realisasi kinerja sebesar 105,56%
2.	= 100% (Sesuai target)	1. Jumlah kab/kota yang menerima program afirmasi pada jenjang SD dengan target 514 lembaga dan terealisasi sejumlah 514 lembaga 2. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sekolah Dasar dengan kategori sangat baik dengan target kategori nilai sangat baik (AA) dan nilai yang diperoleh sebesar 94,48 dengan kategori nilai AA (Sangat Baik) 3. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sekolah Dasar dengan target predikat nilai minimal A , dan nilai yang diperoleh nilai 87,9 dengan predikat nilai A (Baik)
3.	< 100% (Kurang dari target)	1. Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik dengan persentase perbandingan target dan realisasi kinerja sebesar 90,71%

Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025



Grafik 1.1. Jumlah Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat SD Tahun 2025

Tabel dan grafik diatas menginformasikan efektivitas pelaksanaan program sekaligus menunjukkan area yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III.

Selama menjalankan program dan kegiatan tahun 2025, Direktorat Sekolah Dasar, beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi pada internal, pihak terkait (eksternal), dan penerima manfaat bantuan program. Beberapa permasalahan tersebut dalam upaya pencapaian kinerja, yakni :

1. Terdapat beberapa dispensasi SPM yang dapat mengakibatkan penurunan Nilai Kinerja Anggaran (NKA)
2. Terdapat alokasi anggaran yang diblokir AA dengan nominal yang sangat besar mengakibatkan daya serap anggaran kurang optimal
3. Rencana Strategis Direktorat Sekolah Dasar 2025-2029 masih dalam tahap reviu tim Satuan Pengendalian Intern (SPI)
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Sekolah Dasar masih terbatas, terutama bagian AKIP
5. Data realisasi penanggulangan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada *Dashboard* ATS tidak dapat dikalkulasi oleh internal
6. Terdapat 218 sekolah yang tutup tidak beroperasi lagi/bergabung (2 sekolah menjadi 1 sekolah) yang mengakibatkan adanya penyesuaian bantuan yang disalurkan oleh pusat pada program digitalisasi pembelajaran
7. Terdapat 6 (enam) sekolah yang mengundurkan dari bantuan revitalisasi

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul, antara lain:

1. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang telah diperoleh menjadi masukan bagi Direktorat Sekolah Dasar agar tahun depan dapat meminimalisir adanya dispensasi SPM
2. Anggaran yang diblokir AA telah dikonfirmasi oleh penanggungjawab program kepada pimpinan dan tim perencanaan/evaluasi kinerja dan anggaran bahwa anggaran yang diblokir hingga akhir Desember 2025 disebabkan karena sebagian kegiatan seharusnya diselenggarakan oleh eksternal, dan sebagian kegiatan karena program telah dihapuskan/tidak dilaksanakan lagi
3. Tim perencanaan kinerja dan anggaran mengupayakan Renstra periode 2025-2029 telah disahkan oleh pimpinan pada periode triwulan I tahun 2026
4. Direktorat Sekolah Dasar akan mengusulkan 1 (satu) atau lebih pegawai yang belum memiliki sertifikat kompetensi SAKIP (Diutamakan ASN atau P3K yang sudah memiliki NIP) untuk wajib mengikuti pelatihan pusdiklat SAKIP jika pelatihan pusdiklat dibuka kembali pada tahun 2026
5. Direktorat Sekolah Dasar telah mengoordinasikan dengan Eselon I Kemendikdasmen dan Pusmendik untuk memberikan data realisasi Indikator Kinerja Penanggulangan Anak Tidak Sekolah (ATS)
6. Penanggungjawab program menyesuaikan kembali jumlah bantuan yang tersalurkan sebanyak 149.288 sekolah serta mengonfirmasikan ke pimpinan dan tim perencanaan dan evaluasi kinerja dan anggaran
7. Tim sarpras dan pengelola data kinerja internal menyesuaikan kembali jumlah bantuan revitalisasi yang telah disalurkan ke sekolah dasar

BAB I

PENDAHULUAN

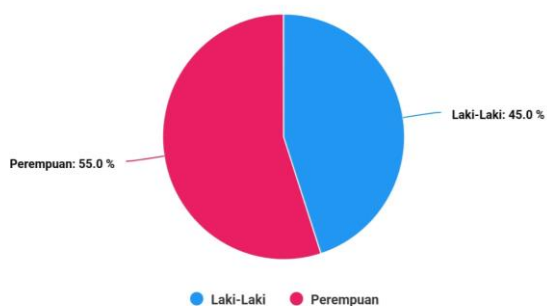
1.1. Gambaran Umum

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategi Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2020–2024, terdapat sejumlah capaian strategis yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam penyediaan layanan pendidikan dasar yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing, yang didukung dengan capaian tata kelola kegiatan internal.

Sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen), Direktorat Sekolah Dasar dibentuk sebagai bagian dari mandat strategis pemerintah dalam memastikan terselenggaranya layanan pendidikan dasar yang bermutu, inklusif, dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan Direktorat Sekolah Dasar juga merupakan respons terhadap tuntutan sistem pendidikan nasional untuk memperkuat manajemen satuan pendidikan, mempercepat transformasi kurikulum dan asesmen, serta memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah dasar mendapatkan layanan pendidikan sebagai hak konstitusionalnya. Dengan demikian, Direktorat Sekolah Dasar berfungsi sebagai pengampu kebijakan, pelaksana program, dan pengendali mutu pendidikan dasar yang terintegrasi dalam kerangka reformasi pendidikan nasional. Kantor Direktorat Sekolah Dasar beralamat di Kompleks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Gedung E Lantai 17-18, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

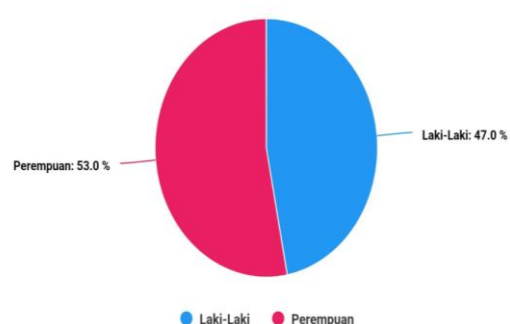
Direktorat Sekolah Dasar dipimpin oleh Moch. Salim Somad, S.Kom., M.Pd yang merupakan Direktur Sekolah Dasar dengan Jumlah SDM pegawai Direktorat Sekolah Dasar adalah sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) orang, yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) orang P3K, dan 106 (seratus enam) orang PNS. Berikut data SDM pegawai Direktorat Sekolah Dasar keseluruhan, berdasarkan jenis kelamin dan riwayat pendidikan.

Perbandingan Jumlah Pegawai P3K Direktorat SD Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin



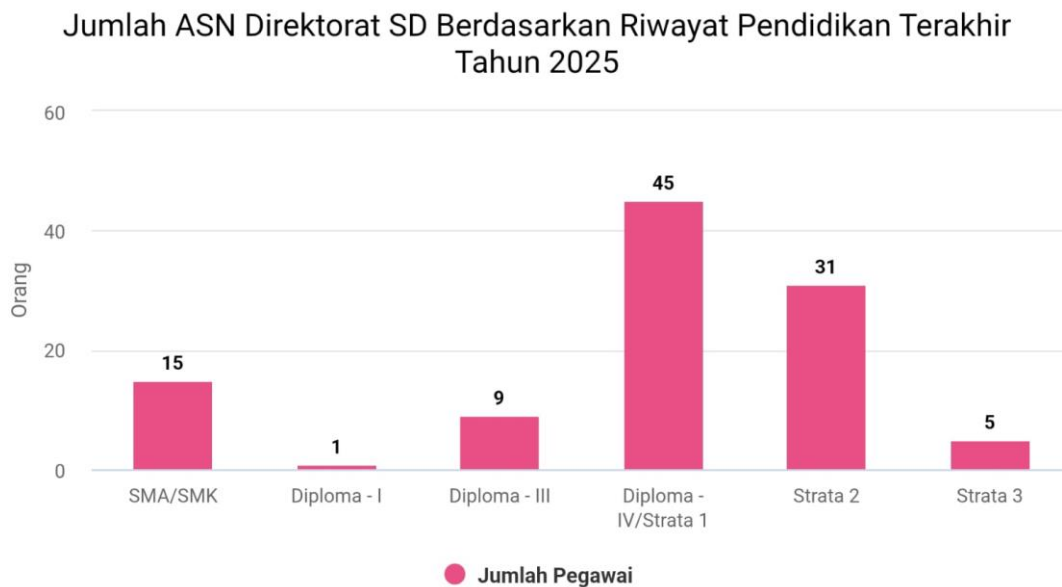
Grafik 1.2. Persentase Selisih Jumlah P3K Direktorat SD Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

Perbandingan Pegawai ASN Direktorat SD Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 1.3. Persentase Selisih Jumlah ASN Direktorat SD Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melihat jumlah ASN Direktorat Sekolah Dasar berdasarkan riwayat terakhir pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 1.4. Jumlah ASN Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025 Berdasarkan Riwayat Pendidikan Terakhir

Berikutnya, jumlah P3K Direktorat Sekolah Dasar berdasarkan riwayat terakhir pendidikan ;



Grafik 1.5. Jumlah

P3K Direktorat SD Tahun 2025 Berdasarkan Riwayat Pendidikan Terakhir

1.2. Dasar Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan keuangan negara, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun dasar hukum penyusunan laporan ini meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 5. Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025-2029
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

1.3. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Direktorat Sekolah Dasar melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

A. Tugas Direktorat Sekolah Dasar

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, serta susunan organisasi kementerian termasuk di dalamnya beberapa direktorat jenderal dan badan. Direktorat Sekolah

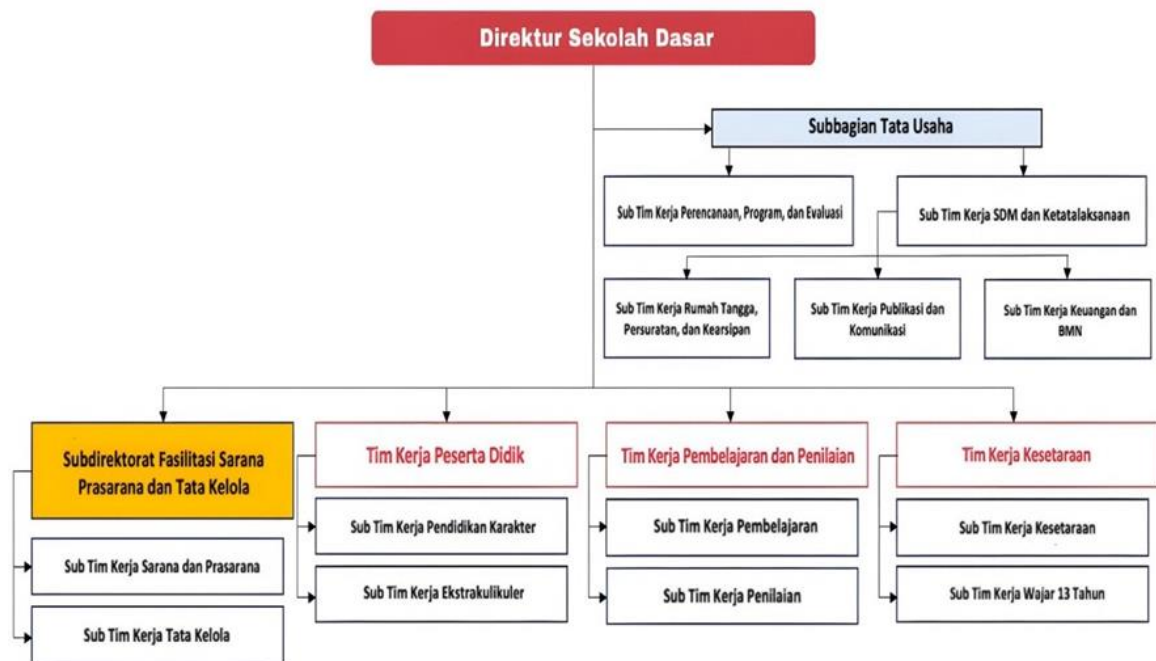
Dasar mempunyai tugas tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan sekolah dasar.

B. Fungsi Direktorat Sekolah Dasar

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan sekolah dasar
2. Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan sekolah dasar
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang standar peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan sekolah dasar
4. Fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan sekolah dasar
5. Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan sekolah dasar
6. Pemberian bimbingan dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan sekolah dasar
7. Penyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau sekolah dasar kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia
8. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan sekolah dasar
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat

C. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana terlihat pada Gambar berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025

Subdirektorat Fasilitas Sarana Prasarana dan Tata Kelola

Subdirektorat Fasilitas Sarana Prasarana dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan standar dan penjaminan mutu, penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan, norma, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana prasarana dan tata kelola sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan sekolah dasar serta penyiapan bahan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau sekolah dasar kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Fasilitas Sarana Prasarana dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan kebijakan standar dan penjaminan mutu di bidang sarana prasarana dan tata kelola sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan sekolah dasar
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan standar dan penjaminan mutu di bidang sarana prasarana dan tata kelola sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan sekolah dasar
- 3) Penyiapan bahan penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan di bidang sarana prasarana dan tata kelola sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan sekolah dasar
- 4) Penyiapan bahan penyusunan norma, prosedur, kriteria di bidang sarana prasarana dan tata kelola sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan sekolah dasar
- 5) Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana prasarana dan tata kelola sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan sekolah dasar
- 6) Penyiapan bahan pemberian izin penyelenggaraan sekolah dasar yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau sekolah dasar kerja sama yang

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia

- 7) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana prasarana dan tata kelola sekolah dasar dan pendidikan kesetaraan sekolah dasar. Subdirektorat Fasilitasi Sarana Prasarana dan Tata Kelola terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

a. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan direktorat.

b. Tim Kerja Direktorat Sekolah Dasar

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efektif, efisien, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan pendidikan dasar nasional, Direktorat Sekolah Dasar membentuk tiga Tim Kerja (Timker) yang memiliki fungsi dan tanggung jawab spesifik sesuai bidang prioritasnya. Ketiga tim kerja tersebut meliputi Tim Kerja Peserta Didik, Tim Kerja Pembelajaran dan Penilaian, serta Tim Kerja Kesetaraan. Pembentukan tiga tim kerja ini dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola, memperjelas pembagian tugas, serta mengoptimalkan koordinasi lintas fungsi di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Renstra 2025–2029.

- Tim kerja peserta didik
- Tim kerja pembelajaran dan penilaian
- Tim kerja kesetaraan

1.4. Isu-Isu dan Peran Strategis Organisasi

A. Isu-Isu Strategis

a. Partisipasi Pendidikan

- 1) Belum meratanya partisipasi pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia yang ditandai dengan adanya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kabupaten/kota di beberapa provinsi tertentu.
- 2) Tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah usia 16 (enam belas)-18 (delapan belas) tahun yang mencapai 2,48 (dua koma empat puluh delapan) juta orang. Jumlah ATS yang masih besar ini.
- 3) Satuan pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan dalam kondisi baik hanya sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam puluh tujuh persen).
- 4) Dukungan fasilitas transit penyaluran makanan, serta sarana dan infrastruktur air bersih dan sanitasi, serta cuci tangan yang belum memadai.

b. Kualitas

- 1) Capaian lingkungan belajar secara umum masih belum mencapai angka 75 (tujuh puluh lima) pada seluruh jenjang

- 2) Terdapat ketimpangan dalam literasi, numerasi, dan karakter peserta didik yang perlu ditingkatkan melalui inovasi pembelajaran dan peningkatan kapasitas pendidik
- 3) Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran masih terbatas dan belum merata
- 4) Masih diperlukan peningkatan layanan pendidikan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

c. Pembiayaan Pendidikan

- 1) Perbedaan persepsi kategori pemanfaatan 20% (dua puluh persen) anggaran pendidikan menyebabkan pemanfaatan tidak tepat guna dan tepat sasaran
- 2) Pemanfaatan 20% (dua puluh persen) anggaran pendidikan belum menjadi prioritas pemerintah daerah

B. Peran Strategis Organisasi

- 1) Perluasan Layanan Pendidikan Dasar dalam Mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua yang Berkeadilan
- 2) Peningkatan Mutu Layanan dan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran, Kurikulum dan Model Pembelajaran, serta Penilaian Pendidikan Dasar
- 3) Penguatan Tatakelola serta Akuntabilitas Direktorat Sekolah Dasar
- 4) Program Hasil Terbaik Cepat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen perencanaan kinerja Direktorat Sekolah Dasar beberapa diantaranya;

1. Rencana Strategis Direktorat Sekolah Dasar 2025-2029
2. Perjanjian Kinerja Direktur Sekolah Dasar 2025
3. Rencana Aksi Direktorat Sekolah Dasar 2025

2.1. Rencana Strategis Direktorat Sekolah Dasar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategi/Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau disebut Renstra-KI adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. Secara umum, isi Renstra terdiri dari ;

1. Visi, misi, dan tujuan strategis instansi
2. Sasaran dan indikator kinerja yang diselaraskan dengan RPJMN
3. Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

A. Visi, Misi, Tujuan Strategis, dan Matriks Kinerja Direktorat Sekolah Dasar

Visi dan Misi Direktorat Sekolah Dasar menyesuaikan dengan visi dan misi presiden, dan kementerian pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 2.1. Visi Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025

Visi Direktorat
Terwujudnya Pendidikan Sekolah Dasar yang Bermutu untuk Semua dengan Dukungan Partisipasi Semesta dalam Rangka Mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Tabel 2.2. Misi Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025

Misi Direktorat Sekolah Dasar	
1)	Mewujudkan pendidikan dasar yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan zaman, yang didukung oleh penyediaan sarana prasarana memadai, sistem pembelajaran yang efektif, inovatif, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk memperkuat kompetensi literasi, numerasi, sains, dan karakter peserta didik
2)	Mewujudkan kedaulatan Bahasa Indonesia melalui penguatan fungsi bahasa sebagai alat pemersatu bangsa, sarana pengembangan ilmu pengetahuan, serta pembangunan kebahasaan dan kesastraan pada pendidikan dasar yang berakar pada nilai budaya bangsa sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan global
3)	Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan partisipasi semesta dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, satuan pendidikan dasar, masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dasar yang transparan, akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan

Tabel 2.3. Tujuan Strategis Direktorat Sekolah Dasar

Tujuan Strategis Direktorat Sekolah Dasar	
1.	Meningkatnya akses layanan pendidikan sekolah dasar yang berkeadilan untuk semua
2.	Meningkatnya hasil belajar pendidikan sekolah dasar
3.	Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan
4.	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan vokasi
5.	Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Dasar yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024, Direktorat Sekolah Dasar menetapkan tujuan, sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Tabel 2.4. Target Indikator Kinerja Direktorat SD Jangka Menengah

Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan		Target				
		Satuan	2026	2027	2028	2029
[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas						
IKK 1.1	Jumlah kab/kota yang menerima program afirmasi pada jenjang SD	Lembaga	514	514	514	514
IKK 1.2	Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD	Orang	76.884	118.442	162.078	207.793
IKK 1.3	Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras	Persen	14.30	17.02	19,74	22,46
[SK 2] Meningkatkan pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas						
IKK 2.1	Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	Persen	50,97	53,27	55,67	58,17
IKK 2.2	Persentase SD yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Persen	98.73	99.37	100	100
IKK 2.3	Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	Persen	74.8	76.5	78.3	80.2

B. Program Prioritas Direktorat Sekolah Dasar

Visi, misi, dan tujuan strategis Direktorat Sekolah Dasar mendukung pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, dan penguatan tatakelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal tersebut juga mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

a. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah

Dalam rangka memberikan pendidikan yang berkualitas dan merata, Pemerintah telah menetapkan program prioritas nasional Revitalisasi Satuan Pendidikan. Program ini selaras dengan Asta Cita ke-4 (empat), yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan ini juga merupakan implementasi dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) membangun satuan pendidikan unggul dan revitalisasi satuan pendidikan.

Pada tahun 2025, pemerintah akan melakukan revitalisasi sarana prasarana satuan pendidikan dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) pada satuan pendidikan dasar yang berlokasi di seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan akses layanan pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah.
- 2) Menyediakan sarana dan prasarana esensial bagi pendidikan yang berkualitas, aman, dan nyaman. Pelaksanaan bantuan pemerintah terkait revitalisasi sarana dan prasarana di-aksanakan oleh satuan pendidikan. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional.

b. Program Digitalisasi Pembelajaran Pendidikan

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata, Indonesia perlu melakukan akselerasi dalam penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi. Digitalisasi pendidikan termasuk dalam 17 (tujuh belas) program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, yaitu “Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi”. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan, dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran, nomor 2 poin e yaitu melaksanakan percepatan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran. Digitalisasi pembelajaran merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data Dapodik per 11 Maret 2025, terdapat 149.506 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam) satuan pendidikan di jenjang sekolah dasar yang perlu mendapatkan dukungan peralatan digital. Sekolah-sekolah tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe berdasarkan ketersediaan listrik dan internet :

Tabel 2.5. Kategori Bantuan Peralatan Listrik dan Internet untuk Mendukung Digitalisasi Pembelajaran

Tipe I	Memiliki listrik dan internet, yaitu sebanyak 144.265 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima) sekolah.
Tipe II	Memiliki listrik, tidak memiliki internet, yaitu sebanyak 4.098 (empat ribu sembilan puluh delapan) sekolah.
Tipe III	Tidak memiliki listrik dan internet, yaitu sebanyak 1.143 (seribu seratus empat puluh tiga) sekolah.

2.2. Perjanjian Kinerja Direktorat Sekolah Dasar

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:

- spesifik (*specific*)
- dapat terukur (*measurable*)
- dapat dicapai (*attainable*)
- berjangka waktu tertentu (*time bound*)
- dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*)

A. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Alokasi Anggaran Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025 Sebelum dan Sesudah Revisi

Tabel 2.6. Target dan Alokasi Anggaran Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025 Sebelum Direvisi

Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja 2025
[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas		
[IKK 1.1] Jumlah SD menerima program afirmasi	Lembaga	514
[IKK 1.2] Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD	Orang	37.403
[IKK 1.3] Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras	Persen	11.58
[SK 2] meningkatnya pembelajaran sekolah dasar yang berkualitas		
[IKK 2.1] Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	Persen	48.77

Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja 2025
[IKK 2.2] Persentase SD yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Persen	98.1
[IKK 2.3] Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	Persen	73.2
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Dasar		
[3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sekolah Dasar dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik
[IKK 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sekolah Dasar minimal A	Predikat	A

Direktorat Sekolah Dasar melakukan revisi Perjanjian Kinerja (PK) Direktur SD Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) kali. Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) masih tetap sama, namun perubahan informasi data terletak pada alokasi anggaran yang dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 2.7. Alokasi Anggaran Direktorat Sekolah Dasar Tahun Pada Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Direvisi

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran	
		Sebelum Revisi	Sesudah Revisi
7596	Pembinaan Sekolah Dasar	Rp35.388.802.000	Rp4.907.397.336.000
7601	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar	Rp249.048.769.000	Rp5.424.413.338.000
7606	PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp33.910.903.000	Rp33.910.903.000
	TOTAL	Rp318.348.474.000	Rp10.365.721.577.000

Perubahan alokasi anggaran pada perjanjian kinerja dilakukan karena ;

1. Penambahan program SD yang Direvitalisasi sebesar Rp4.892.954.639 yang mempengaruhi alokasi anggaran pembinaan sekolah dasar
2. Penambahan program SD yang Mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran sebesar Rp5.233.955.837.000 yang mempengaruhi jumlah alokasi anggaran peningkatan kualitas pembelajaran sekolah dasar

2.3. Rencana Aksi Direktorat Sekolah Dasar

Direktorat Sekolah Dasar telah menyusun Rencana Aksi (Renaksi) Kinerja Tahun 2025 melalui aplikasi SPASIKITA sesuai dengan PemenpanRB Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas PermenpanRB Nomo 25 Tahun 2025 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Rencana aksi minimal berisi:

1. Rincian kegiatan
2. Indikator output dari rincian kegiatan
3. Target
4. Waktu pelaksanaan
5. Penanggung jawab

Direktorat Sekolah Dasar telah menyusun Rencana Aksi (Renaksi) Kinerja Tahun 2025 melalui aplikasi SPASIKITA yang mana aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini telah memuat fitur penyusunan laporan Renaksi sesuai dengan format ketentuan yang berlaku.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kinerja Direktorat Sekolah Dasar. Sesuai dengan revisi perjanjian kinerja Direktur Sekolah Dasar tahun 2025, Direktorat Sekolah Dasar menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK), 8 (delapan) Indikator Kinerja dengan perbandingan antara target dan realisasi kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja IKK Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025

Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
SK 1 -Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas					
IKK 1.1	Jumlah kab/kota yang menerima program afirmasi pada jenjang SD	Lembaga	514	514	100
IKK 1.2	Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD	Orang	37.403	497.614	1.330,42
IKK 1.3	Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras	Persen	11,58	21,79	188,17
SK 2 - Meningkatkan pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas					
IKK 2.1	Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	Persen	48,77	51,58	105,56
IKK 2.2	Persentase SD yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Persen	98,1	99,6	101,53
IKK 2.3	Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	Persen	73,2	66,4	90,71

SK 3 - Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Sekolah Dasar					
IKK 3.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sekolah Dasar dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik	94,48 (Sangat Baik)	100
IKK 3.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sekolah Dasar minimal A	Predikat	A (86,1)	A (87,9)	102,1

Dapat dilihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 3(tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terealisasi sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, 3 (tiga) realisasi IKK telah melebihi target yang ditetapkan, dan 2 (dua) IKK dengan realisasi di bawah. Untuk mengetahui penyebab ketercapaian realisasi kinerja yang telah ditetapkan, Direktorat Sekolah Dasar melakukan analisis pada setiap IKK.

A. SK-1 Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas

Sasaran Kegiatan (SK) Terwujudnya Layanan Pendidikan SD yang Merata dan Berkualitas terdiri dari 3 (Tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan ketercapaian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra), dan Perjanjian Kinerja Direktur Sekolah Dasar Tahun 2025.

IKK.1.1. Jumlah SD menerima program afirmasi

a. Penjelasan Definisi Operasional Indikator Kinerja

Kebijakan afirmasi pendidikan merupakan momentum awal untuk tercapainya cita-cita akses pendidikan yang berkeadilan. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat konstitusi tidak akan pernah tercipta jika pendidikan hanya dinikmati oleh mereka di daerah yang dekat dengan pusat. Program afirmasi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah. Intervensi program afirmasi yang dilakukan mencakup afirmasi karena geografis (daerah khusus sesuai perundang-undangan yang berlaku) dan karena intervensi khusus (pencegahan anak rentan putus sekolah, peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan yang tidak mampu dari segi ekonomi).

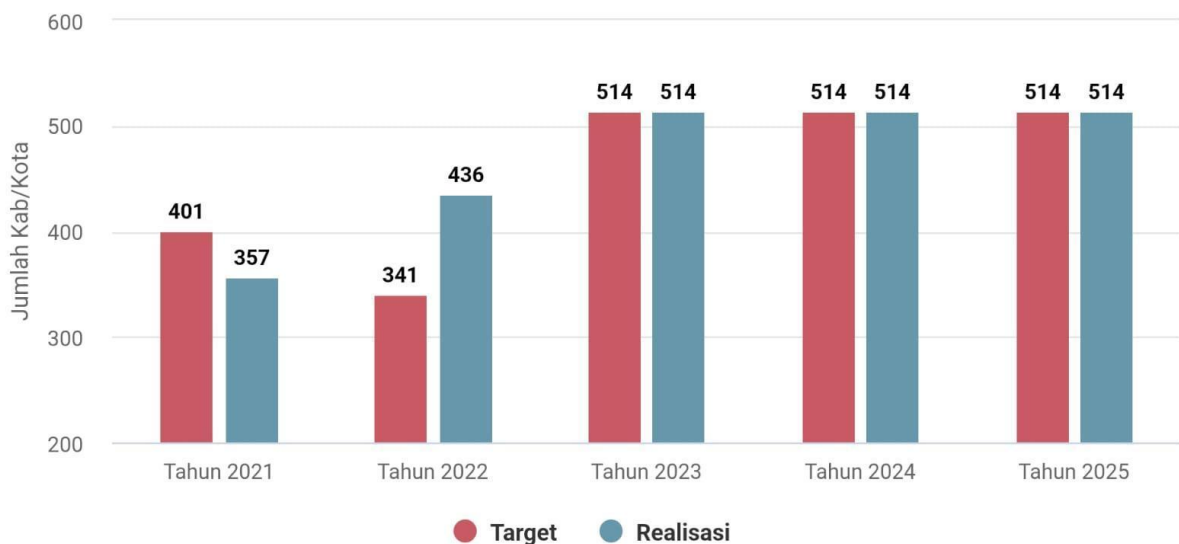
b. Cara Perhitungan Indikator Kinerja

Untuk mengetahui realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut ;

$$\frac{\text{Target IKK Afirmasi}}{\text{Jumlah Kab/Kota yang Menerima Program Afirmasi Jenjang SD}} \times 100\%$$

c. Analisis Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya

Perbandingan Target dan Realisasi IKK Jumlah SD Menerima Program Afirmasi Tahun 2021-2025



Grafik 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Jumlah SD Menerima Program Afirmasi Selama 5 Tahun

Sumber : LAKIP Direktorat SD Tahun 2021 s.d. 2025

Dapat dilihat pada grafik di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja IKK ini selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh realisasi sesuai target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur yang merupakan kesepakatan antara Eselon II dengan Eselon I Kemendikdasmen. Capaian ini tidak dapat melebihi target (514 kab/kota) dikarenakan jumlah target menyesuaikan dengan kab/kota yang ada di Indonesia. Sehingga realisasi kinerja ini telah tercapai dengan persentase 100%.

d. Analisis Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah



Grafik 3.2. Realisasi IKK SD yang Menerima Program Afirmasi Tahun 2025 dan Target Jangka Panjang IKK

Dapat dilihat pada gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja pada tahun 2025 sebanyak 514 kab/kota sama dengan target IKK. Pada saat perencanaan target IKK pada Renstra juga menunjukkan target IKK jumlahnya sama dikarenakan sasaran kinerja mengacu pada jumlah seluruh kab/kota yang di Indonesia. Namun, target pada tahun berikutnya masih dapat berubah sewaktu-waktu disebabkan berbagai faktor, misalnya penambahan atau pengurangan kab/kota yang ada di Indonesia, atau pencapaian sasaran kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan.

e. Analisis Program dan kegiatan terkait, yang mendukung pencapaian target kinerja Indikator Kinerja

Dalam mengupayakan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terhadap target kinerja yang telah ditetapkan, Direktorat Sekolah Dasar telah melaksanakan beberapa kegiatan yang melibatkan eksternal. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya ;

e.1. Advokasi Pendampingan Wajib Belajar 13 tahun dan Penanggulangan ATS

Direktorat Sekolah Dasar telah melaksanakan melaksanakan kegiatan advokasi pendampingan wajib belajar 13 tahun ke 25 kab/kota yang dilaksanakan secara 3 tahap dengan waktu pelaksanaannya sebagai berikut ;

- a. Tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 25 Juli 2025 ke 9 kab/kota
- b. Tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 29 Juli s.d. 1 Agustus 2025 ke 8 kab/kota

c. Tahap 3 dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 8 Agustus 2025 ke 8 kab/kota

Untuk informasi terkait penugasan dan pelaporan kegiatan dapat dilihat; <https://drive.google.com/drive/folders/1ndzy-xhKPaZ2D2-F7K4plvKKhqyQJInS?usp=sharing>.



Gambar 3.1. Pendampingan Advokasi WB 13 Tahun ke Kabupaten Musi Banyuasin

Peserta yang hadir unsur dari Bappeda, Disdukcapil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, Pengawas Sekolah, BPMP Sumatera Selatan, Kecamatan, Kelurahan, Kepala sekolah SD dan Kepala PKBM dan Mitra Pendidikan (Staf Khusus Bupati Musi Banyuasin).



Gambar 3.2. Pendampingan advokasi WB 13 tahun ke Kabupaten Pulon Progo

Pendampingan bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kulon Progo dan BPMP DIY pada Rabu (23/7) di Ruang Rapat Kalibiru Komplek Pemda Kulon Progo. Peserta FGD berjumlah 25 orang.

e.2. Pendampingan dan Advokasi Implementasi Program Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan ke 514 kab/kota



Gambar 3.3. Petugas Internal (Luring) bersama Narasumber dan Peserta Eksternal (Daring) Membahas Materi Program Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan

Kegiatan ini dilaksanakan di Jakara (Luring) dan virtual Zoom(Daring) mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta internal Direktorat Sekolah Dasar, dan Dinas Pendidikan dan BPMP dari 514 kab/kota secara daring.

Kegiatan ini menekankan pemabahasan Penguatan Pembelajaran Untuk Murid dan Pengajar Dalam Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*) Pada Pendidikan Kesetaraan pendalaman yang pembahasan topik kegiatan dibagi menjadi 5 sesi dalam tim untuk berdiskusi.

Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, berkas kegiatan dapat dilihat pada arsip Gdrive:

<https://drive.google.com/drive/folders/19WldBKHjBHoJvSg6yDPHr0octTK2dlbw?usp=sharing>

e.3.Bimbingan Teknis Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Sekolah Dasar

Direktorat Sekolah Dasar telah melakukan bimbingan terkait program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Sekolah Dasar ke berbagai daerah yang terdampak bencana. Berdasarkan data yang sudah direkap oleh internal, terdapat 1.022 sekolah(Termasuk PAUD dan SMP) yang terdampak bencana. Untuk Informasi lebih selengkapnya, data rekapitulasi tersebut dapat dilihat melalui tautan berikut;

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15M3mkjevtylrUHSPPS8uEWUxjiT_pMFH/edit?usp=sharing&oid=117219146281055206106&rtpof=true&sd=true.

Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, berkas kegiatan dapat dilihat pada arsip :
https://drive.google.com/drive/folders/1KopZmLxqviQ4ACxeANr_8GCUxeYToUs?usp=sharing.

f. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Sekolah Dasar Tahun 2025 menetapkan target IKK sejumlah 514 kab/kota. Dari berbagai pelaksanaan program kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Direktorat Sekolah Dasar telah melakukan berbagai kegiatan, salah satunya kegiatan **Pendampingan dan Advokasi Implementasi Program Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan ke 514 kab/kota** menjadi kegiatan utama yang mempengaruhi capaian IKK.

Selain itu, program ini juga memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat terutama siswa sekolah dasar, yakni :

1. Masyarakat memahami pentingnya Wajib Belajar 13 Tahun
2. Masyarakat memahami wajib belajar mendukung peningkatan kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia (IPM)
3. Masyarakat memahami Wajib Belajar 13 Tahun dapat mendukung bonus demografi menjadi kekuatan dalam pembangunan Indonesia
4. Masyarakat memahami bahwa pendidikan dapat meningkatkan kompetensi, daya saing, dan kesejahteraannya
5. Masyarakat bersama pemerintah dan mitra dapat berpartisipasi/berkontribusi dalam pembangunan SDM Indonesia dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045

g. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025

Terdapat berbagai permasalahan yang dialami terkait program kegiatan, yaitu ;

1. Belum semua daerah memahami konsep Wajar 13 Tahun secara konsisten. Dokumen perencanaan daerah belum seluruhnya memasukkan konsep Wajar 13 Tahun
2. Koordinasi lintas sektor (Disdik–Dinsos–Dukcapil–desa) belum optimal. Belum semua kabupaten/kota memiliki regulasi formal (Perda/Perbup/Perwal)
3. Variasi tingkat pemahaman dan komitmen pemda. Sosialisasi belum menjangkau seluruh pemangku kepentingan (desa, tokoh masyarakat)
4. Dokumentasi supervisi belum seragam antar daerah. Integrasi data ATS dengan sistem nasional masih bertahap

h. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2025

Antisipasi yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dialami, yakni ;

1. Penyelarasan konsep melalui sosialisasi terstruktur pusat–provinsi–kabupaten. Pendampingan perencanaan agar Grand Design menjadi acuan RPJMD/renstra daerah
2. Pembentukan/optimalisasi Satgas ATS lintas sektor. Penyusunan regulasi daerah untuk menjamin keberlanjutan implementasi
3. Penyusunan pola sosialisasi berjenjang sampai level desa/kelurahan, dan pendekatan budaya melalui tokoh agama/adat untuk memperluas advokasi
4. Standardisasi instrumen supervisi & pelaporan. Penguatan penggunaan dashboard ATS dan sinkronisasi data berkala

i. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025

Dalam memenuhi standar target penilaian akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Direktur Sekolah Dasar Tahun 2025, pimpinan dan pegawai Direktorat Sekolah melakukan strategi untuk mencapai target IKK yang telah ditetapkan. Strategi yang dilakukan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ;



Gambar 3.4. Strategi Direktorat SD dalam Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun 2025

- | | |
|-------|--|
| Akses | : Tujuannya mengidentifikasi hambatan fisik, ekonomi, dan sosial agar setiap anak dapat masuk dan bertahan di sekolah. |
| Mutu | : Tujuannya mentransformasi pengalaman belajar untuk membentuk kompetensi, karakter, dan |

kecintaan belajar seumur hidup.

Tata Kelola : Tujuannya membangun sinergi dan akuntabilitas sistem pendidikan

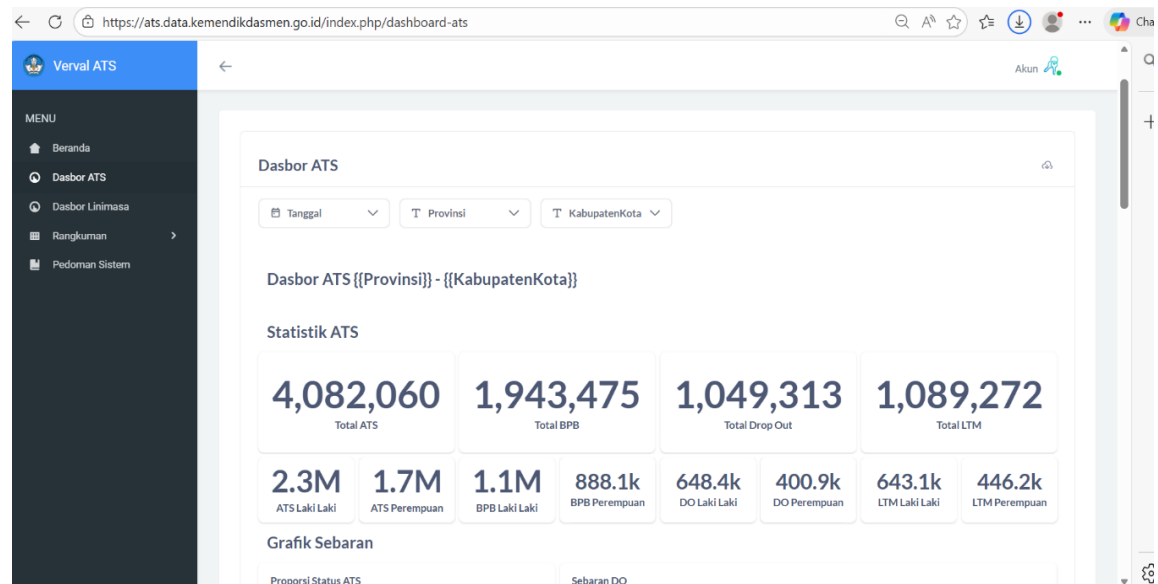
IKK 1.2 Jumlah Anak Tidak Sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD

a. Penjelasan definisi operasional Indikator Kinerja

Anak tidak sekolah (ATS) jenjang SD dikategorikan sebagai anak usia sekolah jenjang SD tahun yang tidak bersekolah karena alasan ekonomi, sosial dan kesehatan. Selain itu anak tidak sekolah juga dikategorikan sebagai anak yang pernah sekolah dan berhenti di tengah proses belajarnya (putus sekolah) disebabkan oleh berbagai alasan baik sosial ekonomi maupun kesehatan.

b. Cara perhitungan Indikator Kinerja

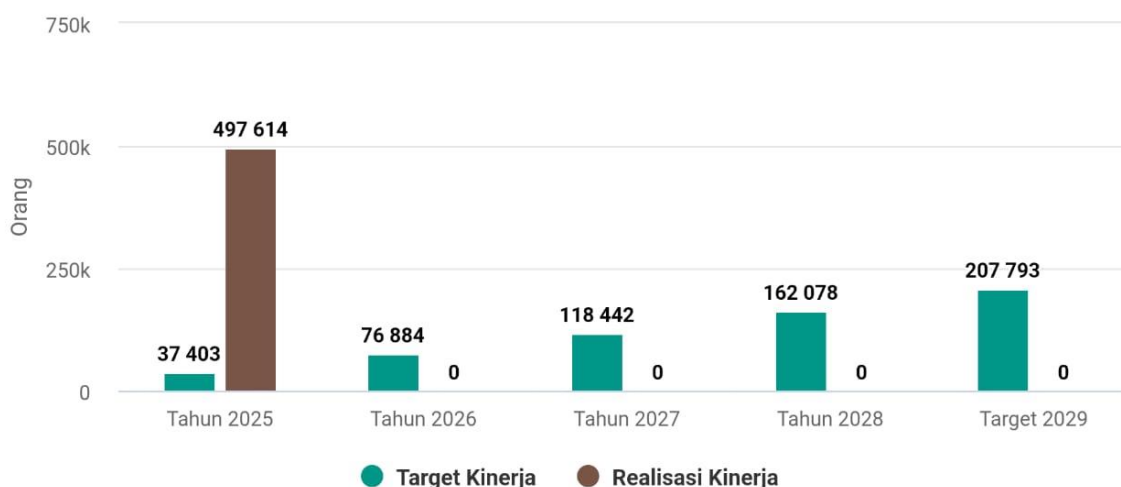
Realisasi indikator kinerja diperoleh dari jumlah anak tidak atau putus sekolah usia jenjang SD yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD tahun 2025 yang dapat diperoleh dari *dashboard* Anak Tidak Sekolah (ATS) yang dapat akses melalui tautan <https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/index.php/dashboard-ats>.



Gambar 3.5. Dashboard ATS Kemendikdasmen

c. Analisis Perbandingan realisasi tahun berjalan beserta Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka panjang renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Kinerja Tahun 2025-2029 pada IKK Penanggulangan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jenjang SD



Grafik 3.3. IKK Penanggulangan ATS : Realisasi Tahun 2025 dan Target Kinerja Jangka Panjang

Hasil perhitungan *Dashboard* ATS yang telah dilakukan oleh Pusmendik diperoleh data pesreta didik ATS kembali bersekolah pada jenjang sekolah dasar sebanyak **497.614 orang** yang mana perhitungan ini termasuk kategori siswa ATS akibat *Drop Out (DO)* dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM). Dapat dilihat pada grafik di atas menunjukkan bahwa target Direktorat Sekolah Dasar dalam menanggulangi Anak yang Tidak Bersekolah pada tahun 2025 sebanyak 2025. Hal ini menunjukkan bahwa target atau sasaran kinerja yang ditetapkan pada tahun ini telah tercapai. Penetapan target jangka panjang Indikator Kinerja ini ditetapkan secara kumulatif. Sumber data realisasi IKK ini diambil terakhir 31 Desember 2025.

d. Analisis Program dan kegiatan terkait, yang mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam mengupayakan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terhadap target kinerja yang telah ditetapkan, Direktorat Sekolah Dasar telah melaksanakan beberapa kegiatan yang bersangkutan dengan program Anak Tidak Sekolah (ATS), kegiatan Direktorat Sekolah Dasar yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu ;

d.1. Pendampingan Penanggulangan Anak Tidak Sekolah (ATS) Jenjang Pendidikan Dasar

Direktorat Sekolah Dasar mendampingi penanggulangan ATS secara daring menggunakan aplikasi *Zoom*, dan dilakukan secara luring melalui kegiatan pendampingan ke beberapa kab/kota. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2025. Peserta yang hadir pada kegiatan ini yaitu Dinas Pendidikan, dan Balai Pengembangan Mutu

Pendidikan (BPMP) dari 514 kab/kota. Untuk pendampingan secara luring melibatkan Dinas Pendidikan kab/kota, Bappeda, Kanwil Kemenag, Dukcapil kab/kota, Camat, Lurah Adapun tujuan penyelenggaraan kegiatan ini yaitu untuk ;

1. Meningkatkan koordinasi antar OPD (Dinas Pendidikan kab/kota, Bappeda, Dinas Sosial kab/kota, Kanwil Kemenag, Dukcapil kab/kota, Camat, Lurah) dalam penanganan ATS di masing-masing wilayahnya
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan kab/kota dan Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dalam pemadanan data ATS.
3. Mengidentifikasi kebutuhan ATS yang termasuk dalam kategori PMKS guna merancang intervensi yang tepat
4. Memperkuat model pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pendidikan kesetaraan di Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)

Pada Kegiatan materi yang diberikan antara lain ;

1. Kebijakan Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Tahun 2025 terkait penanganan ATS yang dipaparkan oleh Setditjen Kemendikdasmen
2. Pemadanan Data ATS Jenjang Pendidikan Dasar (Pemetaan dan Pemantauan) dipaparkan oleh Pusdatin yang merupakan pengelola data ATS
3. Program dan Kegiatan dalam Upaya Penuntasan Anak Tidak Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar yang dibahas oleh narasumber dari Kemensos, Kemendagri, dan Kemenag

Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, berkas kegiatan dapat dilihat pada arsip GDrive: https://drive.google.com/drive/folders/18b5p_yNDcbPRwOHfbFxfj5A7N_46FPkol?usp=sharing.

- Advokasi Pendampingan Wajib Belajar 13 tahun dan Penanggulangan ATS (25 Kab Kota sasaran)

Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan pendampingan wajib belajar 13 tahun dengan mengunjungi 25 kab/kota yang mana terdiri dari 3 tahap ;

- Tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 25 Juli 2025 ke 9 kab/kota
- Tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 29 Juli s.d. 1 Agustus 2025 ke 8 kab/kota
- Tahap 3 dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 8 Agustus 2025 ke 8 kab/kota

e. Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Sekolah Dasar tahun 2025, Direktorat Sekolah Dasar menargetkan sejumlah 37.403 siswa yang tidak sekolah/putus

sekolah dengan kriteria yang ditetapkan untuk dapat kembali bersekolah pada jenjang sekolah dasar.

Program dan kegiatan yang telah dibuat sekaligus dilaksanakan dapat memberikan berbagai manfaat bagi instansi eksternal ;

1. Pendampingan penanggulangan ATS dapat meningkatkan pemahaman, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan strategi konkret dalam penanggulangan ATS antara instansi Direktorat Sekolah Dasar dengan Pusdatin, Dinas Pendidikan, Balai Mutu
2. Meningkatnya pemahaman peserta tentang pentingnya tata kelola data ATS yang terintegrasi, valid, dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan
3. Terbentuknya kesepahaman bersama bahwa program penanganan ATS membutuhkan sinergi lintas sektor antara Kemendikbudristek, Kemensos, Kemenag, pemerintah daerah, sekolah, pesantren, serta Masyarakat
4. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai pentingnya wajib belajar 13 tahun, yang meliputi penambahan satu tahun PAUD atau pra sekolah
5. Terbangun kesadaran kolektif bahwa penanganan ATS bukan hanya urusan pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat

Untuk manfaat yang diperoleh dari program ini bagi masyarakat, yaitu ;

1. Orangtua memahami pentingnya Anak yang Tidak Bersekolah (ATS) untuk dapat melanjutkan pendidikan anaknya
2. Masyarakat memahami mengembalikan anak untuk bersekolah dapat mendukung peningkatan kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia (IPM)
3. Masyarakat memahami penanganan ATS mendukung bonus demografi menjadi kekuatan dalam pembangunan Indonesia
4. Masyarakat memahami bahwa pendidikan dapat meningkatkan kompetensi, daya saing, dan kesejahteraannya
5. Masyarakat bersama pemerintah dan mitra dapat berpartisipasi/berkontribusi dalam pembangunan SDM Indonesia dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045

f. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025

Permasalahan yang dialami selama program yang diterangkan terkait eksternal dan penerima manfaat ;

1. Data Anak Tidak Sekolah (ATS) jenjang SD atau sederajat tidak dapat dikelola oleh Pusdatin saja, karena hal ini dapat menyebabkan akurasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak akurat
2. Keterbatasan Akses dan Pencatatan Data: Banyak anak yang tidak terdaftar secara resmi dalam sistem pendidikan formal, sehingga data mereka tidak tercatat dalam sistem yang dapat diakses dan dipadankan
3. Tidak Terintegrasinya Sistem Data: Data anak tidak sekolah tersebar di berbagai lembaga (pendidikan, sosial, kesehatan) dengan sistem yang terpisah, tanpa adanya platform terpadu untuk pemadanan data secara efisien.

4. Kualitas Data yang Tidak Konsisten: Data yang tersedia seringkali tidak lengkap, tidak terverifikasi, atau terdapat ketidakakuratan dalam pencatatan, yang menghambat pemadanan yang valid dan terpercaya
5. Masalah Privasi dan Keamanan Data: Pemadanan data yang melibatkan informasi pribadi anak-anak menimbulkan risiko pelanggaran privasi dan masalah keamanan data, yang memerlukan perlindungan hukum
6. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi Banyak daerah yang belum memiliki sistem teknologi yang memadai, baik dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, maupun akses internet yang memadai, untuk mendukung pemadanan data yang efisien
7. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga: Sering kali terdapat kurangnya komunikasi dan koordinasi antara berbagai lembaga yang mengelola data (seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan lainnya), sehingga menghambat pemadanan data yang tepat waktu dan akurat
8. Ketidakesesuaian Standar Pengumpulan Data: Lembaga yang mengelola data menggunakan standar dan format yang berbeda dalam pengumpulan dan pelaporan data, yang menyulitkan proses pemadanan dan integrasi data secara efektif
9. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kurangnya tenaga terlatih yang memiliki kemampuan untuk mengelola, mengolah, dan menganalisis data secara efektif menghambat pemadanan data, serta menyebabkan ketidakakuratan dalam hasil analisis
10. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap anak-anak yang tidak sekolah di lingkungannya untuk mengikuti pendidikan di sekolah

g. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2025

Untuk mengatasi permasalahan yang dialami terdapat tindak lanjut yang dilakukan ;

1. Kemensos, Kemenag, Pemda, sekolah, pesantren, hingga masyarakat memiliki peran saling melengkapi. Misalnya, Kemensos fokus pada kelompok rentan, Kemenag menguatkan peran pesantren melalui pendidikan kesetaraan, sedangkan Pemda melalui satgas dapat melakukan intervensi langsung
2. Membangun sistem terintegrasi yang menghubungkan data pendidikan, sosial, dan kesehatan untuk memudahkan pemadanan data anak tidak sekolah.
3. Memastikan data yang dikumpulkan lengkap, valid, dan terverifikasi untuk menghindari kesalahan dalam analisis dan pengambilan keputusan.
4. Mengimplementasikan teknologi canggih, seperti sistem informasi berbasis cloud dan aplikasi pemadanan data, untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pemadanan
5. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara lembaga yang terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan lembaga kesehatan, untuk berbagi informasi secara efektif
6. Melatih tenaga kerja yang terlibat dalam pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data untuk memastikan kemampuan dalam mengelola data secara efisien dan akurat

7. Menetapkan standar yang konsisten dalam pengumpulan dan pelaporan data agar mempermudah pemadanan dan analisis antar Lembaga
8. Menjamin bahwa sistem pemadanan data menjaga privasi anak-anak dan mematuhi regulasi perlindungan data pribadi
9. Melakukan pembaruan dan pemeliharaan data secara berkala untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan selalu relevan dan akurat

h. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025

Dalam memenuhi standar target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Sekolah Dasar Tahun 2025, Direktorat Sekolah Dasar menggunakan strategi yang bertumpu pada 3 pilar yang sama seperti pada IKK 1.1. Jumlah SD yang Menerima Program Afirmasi, yaitu;

1. Akses
2. Mutu
3. Tata kelola

IKK.1.3. Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras

a. Penjelasan definisi operasional Indikator Kinerja

Jumlah SD dengan indeks kelengkapan dan kelayakan prasarana $\geq 70\%$. Indeks Kelengkapan (bobot 50%) mengukur ketersediaan prasarana ruang minimal pada satuan pendidikan sesuai dengan standar sarana dan prasarana berdasarkan Permendikbudristek No 22 tahun 2023 tentang Standar Sarpras. Indeks Kelayakan (bobot 50%) mengukur kelayakan/kondisi prasarana ruang minimal pada satuan pendidikan sesuai dengan standar sarana dan prasarana berdasarkan Permendikbudristek No 22 tahun 2023 tentang Standar Sarpras.

b. Cara perhitungan Indikator Kinerja

Untuk menentukan realisasi indikator ini menggunakan rumus perhitungan berikut ;

$$\frac{\text{SD yang Memenuhi SNP Prasarana}}{\text{Jumlah Seluruh Satuan Sekolah Dasar}} \times 100\%$$

c. Analisis Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra

Berdasarkan perhitungan data realisasi IKK yang diperoleh dari Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP), realisasi yang telah tercapai sebesar **21,79%** dari target yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Sekolah Dasar Tahun 2025 sebesar 11.58%. Hal ini

menunjukkan bahwa realisasi IKK ini dianggap tercapai melebihi target yang telah ditetapkan.

Sedangkan perbandingan realisasi IKK ini pada tahun 2025 dengan target jangka waktu menengah (tahun 2026-2029) dapat dilihat pada grafik berikut ;



Grafik 3.4. IKK Persentase SD yang Memenuhi SNP Sarpras : Realisasi Tahun 2025 dan Target IKK Jangka Panjang

Dapat dilihat pada grafik di atas menunjukkan bahwa realisasi IKK pada tahun 2025 melebihi target IKK pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2028. Sehingga target yang telah direncanakan pada saat penetapan target awal pada Renstra sudah tercapai pada tahun 2025.

d. Analisis Program dan kegiatan terkait, yang mendukung pencapaian target kinerja Indikator Kinerja

Selama tahun 2025, Direktorat Sekolah Dasar telah menjalankan berbagai kegiatan yang berkaitan SNP Sarpras, yaitu program SD yang Direvitalisasi, dan SD yang Mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran Jenjang Sekolah Dasar. Beberapa kegiatan tersebut ialah Penyaluran Bantuan Revitalisasi Sekolah Dasar.

Direktorat Sekolah Dasar telah menyalurkan bantuan revitalisasi ke sekolah dasar sebanyak 6.328 unit.

e. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Keberhasilan atas realisasi kinerja yang diperoleh atas target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Sekolah Dasar 2025.

Keberhasilan atas realisasi IKK di atas juga didukung oleh Rincian Output (RO) SD yang Direvitalisasi dari aktivitas Penyaluran Bantuan Revitalisasi Sekolah Dasar yang tersalurkan sebanyak 6.028 unit. Pada saat perencanaan kinerja, Direktorat Sekolah Dasar menetapkan target bantuan revitalisasi untuk sekolah dasar sebanyak 4.053 unit.

Dari jumlah bantuan yang telah diberikan ke sekolah dasar, dapat diketahui bahwa jumlah bantuan revitalisasi melebihi target yang ditetapkan dengan persentase jumlah bantuan revitalisasi yang tersalurkan sebesar :

$$\frac{\text{Jumlah Bantuan Revitalisasi yang telah disalurkan ke sekolah dasar}}{\text{Target bantuan revitalisasi yang akan disalurkan}} \times 100\% = \frac{6.328 \text{ unit}}{4.053 \text{ unit}} \times 100\% = 156,13\%$$

e. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025

Permasalahan yang dialami dalam mencapai realisasi IKK ;

1. Provinsi Aceh menggunakan rekening yang berbeda dari provinsi lainnya, yaitu Bank Syariah Indonesia, dan terdapat sekolah yang belum membuka rekening sehingga menyebabkan penyaluran ditunda
2. Realisasi kinerja IKK belum dapat dihitung dikarenakan data berasal dari Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP) dan dapat dihitung pada saat akhir tahun
3. Terdapat jadwal pengiriman bantuan digitalisasi yang tidak sesuai berdasarkan waktu yang ditetapkan saat perencanaan jadwal

f. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2025

Antisipasi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ;

1. Tim kerja internal mengonfirmasikan kepada sekolah tersebut, dan memberikan arahan agar segera membuka rekening untuk revitalisasi
2. Tim perencanaan dan evaluasi internal selalu mengoordinasikan dengan pimpinan dan tim sarpras terkait perkembangan program SD yang Direvitalisasi secara berkala
3. Melakukan perubahan jadwal serta jumlah bantuan yang dikirimkan pada periode waktu berikutnya

g. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025

Berikut disajikan prinsip prinsip pelaksanaan bantuan pemerintah program revitalisasi satuan Pendidikan, yaitu:

1. Kelayakan dan Keselamatan

Revitalisasi sekolah dilaksanakan untuk memastikan bangunan dan prasarana pendidikan aman, layak fungsi, dan memenuhi standar keselamatan, sehingga tidak membahayakan peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan. 7 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Sekolah Dasar

2. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Seluruh kegiatan revitalisasi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar sarana dan prasarana, agar lingkungan belajar mendukung proses pembelajaran yang bermutu.

3. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Revitalisasi dilaksanakan dengan memperkuat peran dan otonomi sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan, sesuai dengan prinsip pengelolaan pendidikan berbasis sekolah. Kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengelola, memelihara serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan program di sekolah sepenuhnya ada pada Panitia, diketahui oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

4. Swakelola dan Kemandirian Sekolah

Pelaksanaan revitalisasi dilakukan melalui skema swakelola, di mana sekolah mengelola bantuan secara mandiri, sehingga proses pembangunan lebih kontekstual, efisien, dan sesuai kebutuhan riil satuan pendidikan.

5. Partisipatif dan Peran Serta Masyarakat

Revitalisasi melibatkan komite sekolah, orang tua, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar, guna menumbuhkan rasa memiliki, transparansi, serta tanggung jawab bersama terhadap hasil pembangunan sekolah. Keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pemeliharaan serta pengelolaan kegiatan pendidikan di sekolah penerima program renovasi sekolah. Pelaksanaan program revitalisasi sekolah ini tidak boleh dikontrakan kepada pemborong.

6. Akuntabilitas dan Transparansi

Prinsip dan bentuk keterbukaan dimulai dari:

- (a) pemilihan dan pembentukan panitia renovasi sekolah dan seterusnya sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisik, mulai dari awal sampai dengan akhir pekerjaan secara transparan dan demokratis,
- (b) melaporkan seluruh proses kegiatan melalui pemasangan papan nama kegiatan dan papan informasi yang memuat penjelasan tentang pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi dengan utuh dan mudah.

7. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

Pemanfaatan dana revitalisasi dilakukan secara hemat, tepat guna, dan tepat

sasaran, dengan mengutamakan kualitas hasil serta keberlanjutan pemanfaatan sarana pendidikan.

8. Keberlanjutan dan Daya Guna Jangka Panjang

Revitalisasi dirancang untuk menghasilkan bangunan dan prasarana yang tahan lama, mudah dipelihara, dan berdaya guna jangka panjang, sehingga memberikan manfaat berkelanjutan bagi sekolah.

9. Tidak Mengganggu Proses Pembelajaran

Pelaksanaan revitalisasi diupayakan tidak menghambat kegiatan belajar mengajar, melalui pengaturan waktu, tahapan pekerjaan, dan pengelolaan lingkungan sekolah yang aman.

10. Berkeadilan dan Pemerataan

Revitalisasi sekolah dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan pemerataan, terutama bagi sekolah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat dan berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

B. SK-2 Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas

Berdasarkan tabel 3.1. Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja IKK Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025 Dapat dilihat bahwa Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas terdiri dari 3 (Tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan ketercapaian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra), dan Perjanjian Kinerja Direktur Sekolah Dasar Tahun 2025.

IKK.2.1. Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum

a. Penjelasan definisi operasional Indikator Kinerja

Asesmen Nasional (AN) adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang Asesmen Nasional (AN) diikuti oleh seluruh satuan pendidikan jenjang SD/MI/SDLB Sederajat, SMP/MTs/SMPLB Sederajat, mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama Asesmen Nasional (AN), yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

Populasi peserta Asesmen Nasional (AN) adalah sebagai berikut :

1. Peserta didik kelas 5 jenjang SD/MI/SDLB Sederajat
2. Peserta didik kelas 8 SMP/MTs/SMPLB Sederajat
3. Peserta didik kelas 11 SMA/MA/SMALB Sederajat
4. Peserta didik kelas 11 SMK/MAK

Kemendikdasmen akan melakukan sampling terhadap populasi peserta tersebut pada setiap satuan pendidikan. Pada jenjang SD/MI/SDLB Sederajat, akan dipilih

sampel peserta maksimal 30 orang per satuan pendidikan. Sementara itu, pada jenjang SMP/MTs/SMPLB Sederajat, SMA/MA/SMALB Sederajat, dan SMK/MAK, akan dipilih sampel peserta maksimal 45 orang per satuan pendidikan.

Pada Asesmen Nasional (AN), AKM mengukur dua macam literasi, yaitu Literasi Membaca (Baca: Literasi) dan Literasi Matematika (Baca: Numerasi). Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua peserta didik. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kemampuan literasi dan kemampuan numerasi peserta didik dibagi menjadi empat kategori/level yaitu:

- Level Kompetensi Literasi Numerasi Perlu intervensi khusus

Peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Peserta didik hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Peserta didik menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas.

- Level Kompetensi Literasi Numerasi Dasar

Peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Dasar Peserta didik memiliki keterampilan dasar matematika: komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin.

- Level Kompetensi Literasi Numerasi Cakap

Peserta didik mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks; mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Cakap Peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang beragam.

- Level Kompetensi Literasi Numerasi Mahir

Peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi suatu teks. Mahir Peserta didik mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya.

b. Cara perhitungan Indikator Kinerja

Untuk memperoleh realisasi IKK menggunakan rumus perhitungan berikut ;

$$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan pada jenjang SD dengan nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum}}{\text{Jumlah seluruh satuan pendidikan pada jenjang SD}} \times 100\%$$

c. Analisis Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra

Berdasarkan realisasi data bersumber yang dari Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP) bahwa Jumlah SD yang nilai literasi dan numerasi yang telah mencapai minimum pada tahun 2025 sebesar **27.76%** dari total seluruh sekolah yang nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum.

d. Analisis Program dan kegiatan terkait, yang mendukung pencapaian target kinerja Indikator Kinerja

Dalam mewujudkan tujuan program, Direktorat Sekolah Dasar telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beberapa diantaranya ;

1. Workshop Penyusunan Buku Digitalisasi Interaktif



Direktorat Sekolah Dasar mengundang beberapa Dinas Pendidikan kab/kota, dan beberapa sekolah dalam upaya meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan penggunaan media digital pembelajaran interaktif dalam proses pembelajaran sekolah untuk mendukung peningkatan literasi digitalisasi pendidikan sekolah dasar. Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan penjelasan mengenai prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan eBook. Setiap penulis eBook dituntut untuk bertanggung jawab penuh terhadap isi yang dipublikasikan. Dari hasil pelatihan yang telah dilakukan, Peserta memahami dan mengetahui penggunaan dabonda dalam membuat buku digitalisasi yang mendukung dalam pembelajaran menggunakan game, video, dan gambar interaktif yang dapat dikolaborasikan dengan coding C++.



Untuk mengetahui informasi selengkapnya terdapat pada dokumen bukti; <https://drive.google.com/drive/folders/15HrZpAOHv4StdseBILfyQY1tyvFRa2R4?usp=sharing>.

2. Monev Asesmen Nasional 2025 (Supervisi Pelaksanaan ANBK Tahun 2025)

Berdasarkan penjelasan umum IKK, Asesmen Nasional (AN) menjadi program utama dalam IKK ini. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa kepala sekolah daerah dan guru sekolah dasar. Hasil pemantauan persiapan AN/UKS 2025 menunjukkan ekosistem yang “siap dengan penguatan berkelanjutan”. Ada energi kelembagaan yang besar pada dinas dan sekolah untuk menyiapkan asesmen; di saat yang sama, ketidakseimbangan dalam penjadwalan sosialisasi, penetapan moda, dan distribusi kapasitas SDM, serta bottleneck teknis di perangkat/jaringan/server, masih menahan laju ke arah mutu pelaksanaan yang setara di semua satuan pendidikan. Dengan menyelaraskan jalur sosialisasi, menutup gap pelatihan teknis, menegakkan data governance, dan menyandarkan penetapan moda pada asesmen kesiapan aktual, maka kualitas proses dan kualitas data Asesmen Nasional berpotensi meningkat secara signifikan, dan manfaatnya bagi perencanaan program, penganggaran, serta peningkatan mutu pembelajaran akan semakin nyata.



Gambar 3.6 Diskusi Narasumber dengan Peserta Kegiatan Money Asesmen Nasional Tahun 2025

Diskusi yang dilakukan antara Direktorat Sekolah Dasar dengan beberapa guru dan kepala sekolah yang hadir pada kegiatan. sejumlah sekolah melaporkan jalur komunikasi praktis, misalnya melalui grup WhatsApp, video conference, dan K3S, sebagai medium koordinasi cepat yang efektif, terutama saat terjadi perubahan jadwal atau troubleshooting harian.



Gambar 3.7. Narasumber Direktorat SD Menjelaskan Materi Kepada Peserta

Terdapat beberapa bukti pelaksanaan kegiatan lainnya yang dapat dilihat : https://drive.google.com/drive/folders/1CcJGMxmTFT6cyzjYCK_8cvtBVvu68O52?usp=sharing.

3. Pendampingan Pengisian Dapodik pada Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan

Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan mengenai pentingnya validitas dan konsistensi data sarpras dalam sistem Dapodik sebagai dasar perencanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami perbedaan antara sarana dan prasarana, kriteria minimal dan pengembangan ruang, serta fungsi Dapodik sebagai basis data utama dalam proses usulan bantuan sarpras. Pemahaman terhadap Form PUPR juga meningkat, terutama mengenai penggunaannya untuk usulan rehabilitasi ruang dengan kerusakan sedang hingga berat, serta pentingnya kelengkapan dokumen (tanda tangan tiga pihak dan kesesuaian denah bangunan).

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan dapat dilihat melalui tautan arsip berikut ; https://drive.google.com/drive/folders/1XofYpZJqC7_nepvr_TLvqQ_rC7zQB1NX?usp=sharing.

4. Penyaluran Bantuan Digitalisasi Pembelajaran

Direktorat Sekolah Dasar telah menyalurkan bantuan digitalisasi pembelajaran untuk sekolah dasar sebanyak 149.288 unit.

5. Pendampingan Penerima Bantuan Digitalisasi Pembelajaran

Bantuan digitalisasi pembelajaran yang diberikan kepada beberapa sekolah dasar merupakan produk yang baru rilis pada tahun 2025. Sehingga, Direktorat Sekolah Dasar mengundang tenaga kependidikan dari berbagai sekolah daerah untuk hadir kegiatan ini. Kegiatan ini dilaksanakan dimulai Oktober hingga November 2025 yang mana kegiatan diisi dengan materi terkait ;

- a. kebijakan digitalisasi pembelajaran
- b. pengenalan Perangkat Interaktif Digitalisasi (PID)
- c. Pengelolaan Berbasis Aset untuk Optimalisasi Pemanfaatan Perangkat Digital dalam Pembelajaran
- d. Inspirasi Asesmen dan Perencanaan Pembelajaran Berbasis Digital



Gambar 3.8. Narasumber Memperkenalkan Perangkat Interaktif Digitalisasi di Serdang Berdagai

Salah satu narasumber kegiatan memperkenalkan Perangkat Interaktif Digitalisasi (PID) kepada para peserta yang merupakan guru dan kepala sekolah di daerah Sumatera Utara. PID ini merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah pusat Kemendikdasmen ke berbagai sekolah Indonesia.



Gambar 3.9. Peserta Kegiatan Pendampingan Digitalisasi di Serdang Berdagai Menguji Perangkat Interaktif yang akan Digunakan Pembelajaran Sekolah

Beberapa peserta kegiatan menguji coba Perangkat Interaktif Digital (PID) untuk mengetahui berbagai jenis fitur yang dimiliki perangkat beserta fungsinya.

Dokumen bukti pelaksanaan kegiatan selengkapnya dapat dilihat melalui ; https://drive.google.com/drive/folders/1K4f_JqATyNSCc3m3m4dYb1S2d5mZI5IH?usp=sharing.

e. Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Kinerja

Pada tanggal 21-24 November 2025, Direktorat Sekolah Dasar memonitoring dan mengevaluasi Asesmen Nasional ke 15 lokus sebagai sampel. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terdapat beberapa penyebab literasi dan numerasi siswa terhambat, yakni ;

1. Peserta didik mengikuti ANBK dengan penuh antusias. Meskipun pada awal pelaksanaan sempat muncul rasa cemas, namun seiring berjalannya waktu suasana kegiatan menjadi semakin kondusif.

2. Koordinasi antara Direktorat Sekolah Dasar dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berlangsung semakin intensif. Hal ini berdampak positif pada kinerja proktor dan teknisi yang berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan ANBK Tahun 2025/2026.

f. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025

Terdapat hambatan atau permasalahan yang dialami dalam upaya mencapai realisasi IKK ini pada tahun 2025 :

1. Terdapat kegiatan yang mana jumlah alokasi anggaran begitu banyak diblokir AA menyebabkan daya serap anggaran kurang optimal
2. Bantuan digitalisasi pembelajaran sekolah dasar tersalurkan sebanyak 149.288 unit dari target yang telah ditetapkan 149.506 unit yang menyebabkan perlu adanya konfirmasi ke pihak Eselon I Kemendikdasmen
3. Belum seluruh satuan pendidikan memahami aturan teknis terbaru dan batas waktu sinkronisasi data Dapodik

g. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2025

1. Tim pengelola program mengonfirmasikan kepada pimpinan, tim perencanaan dan evaluasi kinerja anggaran program yang sudah tidak dilaksanakan lagi pada tahun 2025
2. Pengelola program bantuan mengonfirmasi kepada pimpinan, tim perencanaan/evaluasi kinerja anggaran program, serta Eselon I Kemendikdasmen bahwa sisa bantuan yang tidak disalurkan ke sekolah dikarenakan adanya sekolah *merger* (Lebih dari satu sekolah yang digabung menjadi satu sekolah) atau sekolah sudah tidak beroperasi lagi diberikan kepada sekolah terdekat yang memenuhi kriteria untuk diberikan bantuan lebih dari 1 unit
3. Memberikan saran kepada Dinas Pendidikan agar melakukan pembinaan dan monitoring rutin kepada satuan pendidikan dalam hal pemutakhiran data sarana dan prasarana (melalui Dapodik), termasuk pelatihan lanjutan bagi operator sekolah

h. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025

- Strategi peningkatan akses murid Kesetaraan
 - a. Menawarkan pembelajaran yang fleksibel, misalnya pada malam hari atau akhir pekan
 - b. Menawarkan pembelajaran blended learning pada PKBM atau modul mandiri sehingga memungkinkan murid belajar secara asinkron
 - c. Menyediakan modul kewirausahaan dengan manajemen sederhana
 - d. Menerapkan pengakuan pengalaman (Rekognisi Pembelajaran Lampau) kerja murid sehingga menjadi kredit mata pelajaran yang dapat dikonversikan menjadi nilai untuk mempercepat kelulusan

- Menyusun skema intervensi khusus daerah tertinggal dan status ekonomi khusus pada jenjang SD, SMP, dan SMA
 - a. Memprioritaskan program-program peningkatan literasi dan numerasi, khususnya di wilayah NTT, Maluku, Papua, dan kabupaten/kota berkinerja rendah secara masif dan intensif untuk meningkatkan kebiasaan literasi dan numerasi (misalnya dengan literacy boost selama 2–3 tahun)
 - b. Melakukan integrasi program perlindungan sosial, misalnya Program Indonesia Pintar dengan kewajiban kehadiran dan capaian belajar minimal murid
- Program peningkatan kualitas belajar yang optimal
 - a. Mengoptimalkan kelompok belajar kepala sekolah dan guru untuk saling berbagi praktik baik dan memberikan dukungan psikologis
 - b. Penguatan peran kepala satuan pendidikan sebagai instructional leader agar mampu memberikan pendampingan dan supervisi kepada guru dalam hal membangun praktik pembelajaran yang berkualitas
 - c. Pada daerah sulit, melakukan pendataan sekolah yang memiliki kinerja positif untuk dijadikan contoh (role model) berbagi praktik baik
- Program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan
 - a. Membuat standard operational procedure (SOP) antikekerasan, antiperundungan, dan penanganan kekerasan seksual diterapkan di semua sekolah
 - b. Menyusun kanal pelaporan yang aman dan mudah diakses murid (kotak pengaduan, kanal digital, pihak ketiga independen)
 - c. Optimalisasi peran tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK), kanal aduan, dan pendampingan kuratif berbasis kemitraan, peningkatan literasi keselamatan, dan partisipasi murid–orang tua. Ruang lingkup peran TPPK di satuan pendidikan perlu dibuat lebih konkret dan bukan hanya berperan insidental jika ada kasus, tetapi juga secara proaktif melakukan upaya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan.
 - d. Kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan aparat penegak hukum yang relevan untuk kampanye serta penanganan terpadu bahaya narkoba, rokok, miras, dan kekerasan di sekitar sekolah
 - e. Menambah aspek keamanan sebagai indikator pendampingan dan supervisi sekolah
- Program yang mendorong kesejahteraan psikologis guru
 - a. Mengidentifikasi dan melakukan evaluasi beban kerja guru, terutama untuk guru yang memiliki tugas ganda, seperti bendahara sekolah
 - b. Mengimplementasikan program kesehatan mental untuk guru berupa layanan konseling, manajemen stres, atau meningkatkan dukungan komunitas
 - c. Menyediakan ruang aman bagi guru untuk berbagi pengalaman dan permasalahan yang dihadapi
- Memperkuat kebinekaan sebagai budaya sekolah

- a. Program rutin yang mendorong interaksi lintas agama, suku, dan latar belakang (misalnya proyek kolaboratif, forum dialog murid)
- b. Penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru dalam mengelola kelas yang beragam (agama, budaya, gender, disabilitas)
- c. Modul pembelajaran kebinekaan yang kontekstual
- d. Pelibatan dan kolaborasi dengan orang tua murid dan komunitas untuk membangun ekosistem yang inklusif secara menyeluruh dan memperkaya pengalaman murid dalam membangun kebinekaan

IKK.2.2. Persentase SD yang menerapkan kurikulum yang berlaku

a. Penjelasan definisi operasional Indikator Kinerja

Jumlah satuan SD yang menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter. Sekolah yang baru menerapkan kurikulum yang berlaku perlu mendapatkan pendampingan dalam implementasinya, agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan.

b. Cara perhitungan Indikator Kinerja

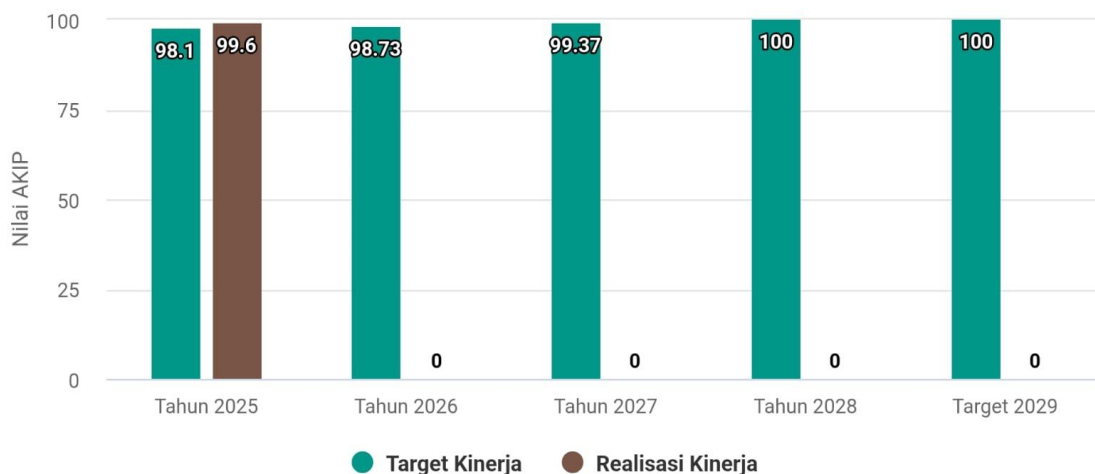
Realisasi IKK menggunakan metode perhitungan berikut :

$$\frac{\text{SD yang menerapkan kurikulum dan model pembelajaran yang berlaku}}{\text{Jumlah seluruh satuan pendidikan pada jenjang SD}} \times 100\%$$

c. Analisis Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra

Dari sumber data yang diperoleh dari Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP) bahwa jumlah sekolah dasar yang telah menerapkan kurikulum yang berlaku pada tahun 2025 sebesar **99,6%** dari jumlah seluruh sekolah dasar di Indonesia yang terdaftar pada Dapodik. Untuk membandingkan realisasi kinerja pada tahun 2025 dengan target kinerja jangka panjang (5 tahun) yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dapat dilihat grafik berikut ;

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target IKK Tahun 2025-2029 Pada IKK Persentase SD yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku



Grafik 3.5. IKK Persentase SD yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku : Realisasi IKK Tahun 2025 dan Target Kinerja Jangka Panjang

Dari grafik menunjukkan bahwa realisasi IKK pada tahun 2025 sudah dapat mencapai target pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2027.

d. Analisis Program dan kegiatan terkait, yang mendukung pencapaian target kinerja Indikator Kinerja

Dalam menjalankan program, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan Direktorat Sekolah Dasar dalam upaya merealisasikan target IKK. Beberapa kegiatan Direktorat Sekolah Dasar yang berhubungan langsung dengan masyarakat antara lain ;

6. Peluncuran dan Sosialisasi Aplikasi E-Rapor Sekolah Dasar Versi 2025

Perkembangan teknologi informasi dalam dunia pendidikan menuntut adanya sistem pengelolaan penilaian yang semakin efisien, akurat, dan mudah digunakan oleh guru. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2 bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan dasar untuk semua warga negara. Selama ini, proses pelaporan hasil belajar di sekolah dasar masih memiliki berbagai tantangan, termasuk konsistensi data, keterbatasan fitur, serta kebutuhan akan sistem yang selaras dengan kebijakan kurikulum terbaru. Karena itu, pembaruan sistem pelaporan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Sebagai respon atas kebutuhan tersebut, Direktorat Sekolah Dasar mengembangkan Aplikasi E-Rapor Sekolah Dasar Versi 2025 sebagai penyempurnaan dari versi sebelumnya. Pembaruan ini dilakukan untuk memastikan sistem penilaian dapat mengikuti dinamika kebijakan, perkembangan teknologi, serta kebutuhan guru dalam melakukan penilaian formatif dan sumatif secara lebih

efektif. Versi terbaru ini dirancang untuk lebih responsif terhadap tantangan di satuan pendidikan.

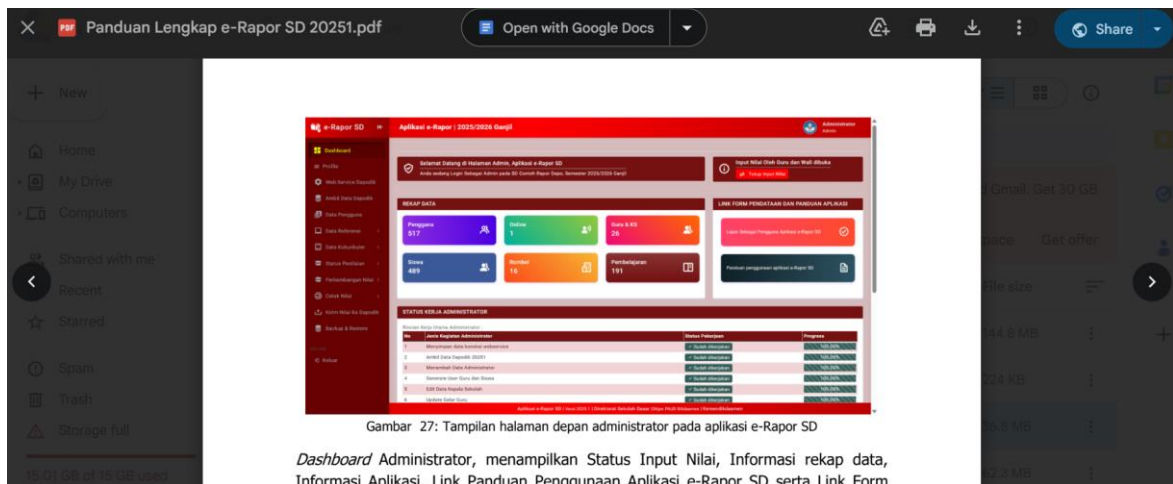
Aplikasi e-Rapor SD adalah aplikasi/perangkat lunak berbasis web yang berfungsi untuk manajemen penilaian dan laporan capaian kompetensi peserta didik (Rapor) pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD). Aplikasi e-Rapor dikembangkan dengan mengacu pada kaidah-kaidah sistem Penilaian/asesmen sebagaimana termuat dalam Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka, Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum 2013, Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta Panduan Kokurikuler.

Direktorat Sekolah Dasar mensosialisasi aplikasi tersebut secara daring melalui aplikasi *Zoom* dengan mengundang Dinas Pendidikan dan Balai Pengembangan Mutu Pendidikan (BPMP) di seluruh Indonesia. Salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah panduan lengkap penggunaan Aplikasi e-Rapor SD Versi 2025 kepada peserta.



Gambar 3.10. Penjelasan Materi Pada Kegiatan Sosialisasi E-Rapor Tahun 2025

Panduan ini disusun secara sistematis untuk membantu pengguna memahami fungsi aplikasi sebagai sistem manajemen penilaian dan pelaporan hasil belajar peserta didik. Dalam sosialisasi, dijelaskan bahwa e-Rapor SD merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Dapodik dan dikembangkan sesuai dengan kebijakan Kurikulum Merdeka maupun Kurikulum 2013.



Gambar 3.11. Tangkapan Layar Berkas Panduan Instalasi E-Rapor Sekolah Dasar

Untuk melihat bukti pelaksanaan kegiatan terdapat berkas dokumentasi kegiatan yang dapat dilihat pada tautan arsip Google Drive berikut; <https://drive.google.com/drive/folders/1nvW8n1OLh7Rxkm8SDDaIN6QZ8PUnpOI?usp=sharing>.

7. Pendampingan dan pembimbingan pengadaan E-Ijazah di Dinas Pendidikan

Direktorat Sekolah Dasar mengunjungi 12 kab/kota untuk memberikan gambaran praktik baik, permasalahan, dan solusi dalam penerbitan ijazah secara elektronik untuk sekolah dasar.

Ijazah adalah Dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal. E-ijazah merupakan penerbitan ijazah secara nir kertas berdasarkan data dapodik siswa dan tersimpan aman secara digital. Tahun 2025, Kemendikdasmen mengawali penerbitan ijazah secara digital dalam bentuk e-ijazah. Oleh karena itu perlu diadakan kegiatan pendampingan dan pembimbingan pengadaan E-Ijazah di Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan untuk mengetahui implementasi di daerah dan satuan pendidikan. Direktorat Sekolah Dasar menargetkan 12 kab/kota untuk berdiskusi terkait permasalahan E-Ijazah melalui Dinas Pendidikan dan Balai Pengembangan Mutu Pendidikan (BPMP).



Gambar 3.12. Pendampingan E-Ijazah Direktorat SD di Makassar Tahun 2025

Direktorat Sekolah Dasar berkoordinasi dengan BPMP Sulawesi Selatan yang mana kota ini tergolong sebagai daerah dengan tingkat adopsi digital tinggi dalam pelayanan. tergolong sebagai daerah dengan tingkat adopsi digital tinggi dalam konteks pelayanan publik.



Gambar 3.13. Pendampingan E-Ijazah Direktorat SD di Kalimantan Barat Tahun 2025

BPMP Kalimantan Barat mengklarifikasi bahwa Operator memahami urgensi validasi data siswa dalam penerbitan e-ijazah dan telah melakukan pengecekan data secara berkala. Selain itu, terdapat budaya kolaborasi antar sekolah melalui komunitas operator aktif yang memfasilitasi penyelesaian masalah teknis secara cepat.

Untuk melihat bukti pelaksanaan kegiatan dapat dilihat berkas kegiatan melalui ; https://drive.google.com/drive/folders/1BVy_XBKfeqbmQmx39uUjyOQqSVFVv94K?usp=sharing

8. Pendampingan Pembelajaran Koding AI Jenjang Sekolah Dasar

Direktorat Sekolah Dasar melaksanakan kegiatan Pendampingan Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial Jenjang Sekolah Dasar dilakukan secara perjalan dinas (perjadin), kunjungan lapangan. dengan 6 lokasi sasaran dari 4 Provinsi:

Tabel 3.2. Daftar Sekolah Dasar yang mendapatkand Pendampingan ke Daerah
Terkait E-Ijazah oleh Direktorat Sekolah Dasar

Satuan Pendidikan	Wilayah Pendampingan	
	Kab/Kota	Provinsi
SD Al Bayyin Al Mujahiddinyah, Jagakarsa	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta
SD 8 BPK Penabur	Kota Jakarta Timur	DKI Jakarta
Sophos BSD, Primary	Kota Tangerang Selatan	Banten
Mentari Intercultural School Bintaro	Kota Tangerang Selatan	Banten
Al-Irsyad Satya Islamic School	Kabupaten Bandung Barat	Jawa Barat
SD Muhammadiyah Al-Mujahiddin Wonosari	Kabupaten Gunung Kidul	Daerah Istimewa Yogyakarta

Wawancara dengan Mas Asbin, seorang siswa kelas 6 di SDN Pondok Benda 01, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran coding di sekolahnya masih berada pada tahap pengenalan yang sangat dasar dan teoritis.



Gambar 3.14. Wawancara

antara Petugas Pusat Kemendikdasmen dengan Salah Satu Siswa di SDN Pondok Benda 01 Tentang Pembelajaran AI Coding

Di Sekolah Dasar Negeri Inpres Tamangapa daerah Makassar, terdapat seorang murid yang menyatakan bahwa pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) adalah pelajaran yang menyenangkan karena selama pelajaran siswa diberikan permainan terkait KKA dan dapat dipraktikkan langsung. Namun, penggunaan laptop atau perangkat sejenisnya masih menggunakan perangkat milik guru saja yang menyebabkan aktivitas ini terbatas.



Gambar 3.15. Wawancara Petugas Pusat dengan Salah Satu Siswa di SD Negeri Inpres Tamangapa Tentang Koding

Untuk melihat bukti pelaksanaan kegiatan dapat dilihat berkas kegiatan melalui https://drive.google.com/drive/folders/11OM9QxwWQYopks2jOr87DsJb9s1q7h_q?usp=sharing.

e. Analisis Faktor Penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Program kegiatan ini memberikan manfaat bagi eksternal, yakni :

- Bagi Masyarakat (Instansi & Perusahaan)
 - a. Keaslian Terjamin: Memudahkan pihak ketiga (seperti HRD perusahaan atau instansi pemerintah) untuk memvalidasi keaslian ijazah secara cepat melalui sistem terpusat.

- b. Mencegah Pemalsuan: Mengurangi risiko penggunaan ijazah palsu karena data tersinkronisasi langsung dengan pangkalan data pendidikan nasional.
 - c. Proses Rekrutmen Efisien: Perusahaan tidak perlu lagi meminta legalisir fisik yang memakan waktu; cukup melakukan pemindaian QR Code atau pengecekan NIK/Nomor Ijazah.
- Bagi Satuan Pendidikan (Sekolah/Universitas)
 - a. Guru, operator, dan kepala sekolah mampu mengoperasikan aplikasi E-Rapor secara mandiri dan benar, sehingga proses penginputan serta pengolahan nilai dapat berjalan lebih efisien dan minim kesalahan.
 - b. Efisiensi Administrasi: Mengurangi beban kerja staf tata usaha dalam proses pencetakan, penandatanganan manual, dan pengarsipan fisik.
 - c. Keamanan Data: Data tersimpan secara digital di server yang aman, sehingga meminimalisir risiko kehilangan dokumen akibat bencana (kebakaran, banjir) atau kerusakan fisik.
 - d. Kemudahan Pelacakan: Sekolah dapat dengan mudah memantau status kelulusan dan distribusi ijazah kepada alumni tanpa harus membongkar gudang arsip.
 - Bagi Orang Tua
 - a. Keamanan Dokumen Anak: Orang tua tidak perlu khawatir jika ijazah fisik hilang atau rusak, karena versi digital selalu tersedia dan dapat diunduh kapan saja.
 - b. Hemat Biaya dan Waktu: Menghilangkan kebutuhan biaya transportasi dan fotokopi untuk keperluan legalisir ke sekolah asal yang mungkin letaknya jauh.
 - c. Transparansi: Orang tua dapat memastikan bahwa data kelulusan anak mereka sudah terinput dengan benar dalam sistem negara.
 - Bagi Siswa/Alumni
 - a. Akses Fleksibel: Ijazah dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat seluler, sangat berguna saat melakukan pendaftaran kerja atau studi lanjut secara daring (online).
 - b. Portofolio Digital: Memudahkan pengintegrasian dokumen pendidikan ke dalam platform pencarian kerja digital atau profil profesional.
 - c. Proses Legalisir Instan: Tidak perlu lagi mengantre di sekolah untuk meminta cap legalisir; ijazah digital biasanya sudah dilengkapi dengan tanda tangan elektronik (TTE) yang sah secara hukum.

Catatan Penting: Implementasi E-Ijazah biasanya didukung oleh teknologi keamanan tinggi seperti Digital Signature (Tanda Tangan Elektronik) yang memiliki kekuatan hukum setara dengan tanda tangan basah sesuai UU ITE.

f. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025

Selama menjalani kegiatan terdapat permasalahan yang dialami ;

1. Aplikasi E-Rapor perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seiring waktu dan kebijakan sekolah
2. Perangkat pembelajaran sekolah yang masih terbatas, terutama pada sekolah kecil dan daerah tertentu yang belum memiliki dukungan TIK
3. Terdapat data identitas yang belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen kependudukan
4. Kondisi internet di wilayah tertentu yang tidak stabil bahkan ketersediaan listrik yang belum merata
5. Terdapat sekolah tertentu yang mengoperator E-Ijazah terlalu memiliki beban tugas terlalu tinggi yang menyebabkan pengelolaan aplikasi E-Ijazah kurang optimal
6. Sebagian sekolah sudah mempelajari materi terkait coding yang merupakan salah mata pelajaran TIK, namun praktik pembelajaran coding masih belum dilakukan atau masih kurang
7. kesenjangan kompetensi guru yang beragam, guru kesulitan menyederhanakan "bahasa coding" untuk siswa, dan siswa mengonfirmasi bahwa konsep tersebut adalah bagian yang paling sulit dipahami tanpa praktik langsung

g. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2025

1. Direktorat Sekolah Dasar akan terus memperbaharui sesuai dengan kebutuhan
2. Diperlukan kebijakan pemenuhan perangkat untuk sekolah prioritas serta pelatihan manajemen jadwal sinkronisasi agar data tetap terbaru sepanjang tahun
3. Setiap sekolah perlu mendokumentasikan *success story* dalam format SOP dan *checklist* untuk dibagikan ke daerah lain melalui forum pembelajaran kebijakan
4. Daerah tersebut perlu mengusulkan dukungan konektivitas alternatif (VSAT/kemitraan telekomunikasi) dan pendampingan *onsite* secara berkala untuk sekolah prioritas.
5. Sekolah perlu mempertimbangkan untuk menambahkan Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan *role sharing* melalui *peer mentoring* antar sekolah, serta penerapan audit data berkala untuk memastikan kualitas data tetap terjaga
6. Sekolah perlu menambahkan ekstrakurikuler berkaitan komputerisasi atau TIK untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam komputerisasi sekaligus sebagai komunitas menambah hubungan relasi antar siswa di berbagai tingkat kelas
7. Perlu adanya bimbingan langsung dari pelatihan resmi untuk meningkatkan pemahaman komputerisasi terutama *coding* untuk guru, serta memahami karakter, kemampuan, dan memotivasi setiap murid bahwa pelajaran TIK adalah pelajaran yang sangat menyenangkan

h. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025

Untuk dapat merealisasikan target IKK terdapat beberapa strategi Direktorat Sekolah Dasar dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung program ini ;

1. Peluncuran aplikasi E-Rapor SD Versi 2025
2. Pengadaan aplikasi E-Ijazah Pendidikan Sekolah Dasar
3. Pembelajaran Koding AI Jenjang Sekolah Dasar

IKK.2.3. Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik

a. Penjelasan definisi operasional Indikator Kinerja

Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang perubahan atas Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada Pendidikan Anak usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah bahwa Indeks karakter menunjukkan tingkat/ukuran karakter peserta didik dari suatu SD tertentu yang dinilai berdasarkan Strategi Kerangka kerja pembelajaran mendalam terdiri atas empat komponen, yaitu ;

1. Dimensi profil lulusan
2. Prinsip pembelajaran
3. Pengalaman belajar
4. Kerangka pembelajaran.

Pembelajaran mendalam difokuskan pada pencapaian delapan dimensi profil lulusan yaitu :

1. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Kewargaan
3. Penalaran kritis
4. Kreativitas
5. Kolaborasi
6. Kemandirian
7. Kesehatan
8. Komunikasi

Dimensi profil lulusan merupakan kompetensi utuh yang harus dimiliki oleh setiap Peserta Didik setelah menyelesaikan proses pembelajaran dan pendidikan. Delapan dimensi profil lulusan merupakan hasil dari capaian pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Di samping itu, delapan dimensi profil lulusan

menumbuhkembangkan lulusan yang memiliki kepemimpinan efektif yang berintegritas, profesional, dan transformatif. Profil lulusan dicapai melalui prinsip sebagai berikut :

1. Pembelajaran yang berkesadaran terjadi ketika Peserta Didik menjadi pelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta Didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Ketika Peserta Didik memiliki kesadaran belajar, mereka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai pembelajar sepanjang hayat
2. Pembelajaran yang bermakna terjadi ketika Peserta Didik dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Proses belajar Peserta Didik tidak hanya sebatas memahami informasi/penguasaan konten, namun berorientasi pada kemampuan mengaplikasi pengetahuan. Kemampuan ini mendukung retensi jangka panjang
3. Pembelajaran terkoneksi dengan lingkungan Peserta Didik membuat mereka memahami siapa dirinya, bagaimana menempatkan diri, dan bagaimana mereka dapat berkontribusi kembali. Konsep pembelajaran yang bermakna melibatkan Peserta Didik dengan isu nyata dalam konteks personal, lokal, nasional, global. Pembelajaran harus melibatkan orang tua, masyarakat, atau komunitas sebagai sumber pengetahuan praktis, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial. Pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Rasa senang dalam belajar membantu Peserta Didik terhubung secara emosional, sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Ketika Peserta Didik menikmati proses belajar, motivasi intrinsik mereka akan tumbuh, mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, dan keterlibatan aktif. Dengan demikian, pembelajaran membangun pengalaman belajar yang berkesan. Bergembira dalam belajar juga diwujudkan ketika setiap Peserta Didik merasa nyaman, Peserta Didik terpenuhi kebutuhannya seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki, kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri.

Prinsip tersebut diwujudkan melalui pengalaman belajar Peserta Didik, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Penerapan pembelajaran mendalam didukung dengan praktik pedagogis oleh Pendidik, lingkungan belajar yang memberikan keamanan dan kenyamanan kepada Peserta Didik, pemanfaatan digital serta adanya kemitraan pembelajaran yang optimal.

b. Cara perhitungan Indikator Kinerja

Realisasi IKK diperoleh menggunakan metode perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan pada jenjang SD dengan indeks karakter pada kategori baik}}{\text{Jumlah seluruh satuan pendidikan pada jenjang SD}} \times 100\%$$

c. Analisis Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra

Pada tahun 2025, realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) satuan pendidikan pada jenjang sekolah dasar dengan indeks karakter pada kategori baik sebesar **66,4%** dari total seluruh sekolah dasar yang terdata pada Dapodik tahun 2025. Jika ingin membandingkan realisasi ini dengan target kinerja jangka panjang dapat dilihat pada grafik berikut ;



Grafik 3.6. IKK Persentase SD yang Memiliki Skor Karakter Peserta Didik pada Kategori Baik : Realisasi IKK Tahun 2025 dan Target Jangka Panjang

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan realisasi kinerja pada tahun 2025 tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun berikutnya perlu dipertimbangkan kembali dalam

meningkatkan target IKK yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Sekolah Dasar 2025-2029.

Program ini memberikan berbagai manfaat bagi eksternal ;

1. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
 - a. Meningkatnya asupan gizi siswa sekolah dasar
 - b. Meningkatnya literasi gizi bagi siswa
 - c. Meningkatnya komunikasi dan interaksi antar siswa
 - d. Meningkatnya motivasi dan prestasi belajar
 - e. Meningkatkan perilaku makan sehat dan gizi seimbang
3. Program Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
4. Program Sahabat Sekolah Dasar

Bagi Murid

1. Menjadi bagian dari komunitas “Sahabat Sekolah Dasar” yang mendukung pertumbuhan karakter sesuai 8 dimensi profil lulusan
2. Menjadi contoh bagi teman sebaya dalam menerapkan kebiasaan baik di sekolah, rumah, dan lingkungan
3. Menumbuhkan karakter murid melalui pembiasaan baik di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar
4. Mendapatkan pengalaman baru yang seru dan berteman dengan peserta dari berbagai daerah di seluruh Indonesia
5. Mendapatkan apresiasi dalam bentuk sertifikat dan penghargaan sebagai Sahabat Sekolah Dasar yang dapat menjadi rekam jejak prestasi.

Bagi Sekolah

1. Kepala Sekolah dan Guru mendapatkan sertifikat penghargaan sebagai fasilitator Sahabat Sekolah Dasar yang dapat menjadi rekam jejak prestasi
2. Meningkatkan peran sekolah sebagai fasilitator pendidikan karakter yang melibatkan murid secara aktif
3. Membangun citra sekolah yang positif dengan menunjukkan komitmen dalam membina karakter murid
4. Mendapatkan kesempatan untuk lebih aktif berkolaborasi dengan media
5. sosial resmi Direktorat Sekolah Dasar dalam mendukung publikasi kegiatan Sekolah
6. Menciptakan lingkungan belajar yang lebih inspiratif dengan kehadiran Sahabat Sekolah Dasar sebagai agen perubahan
7. Memiliki dokumentasi praktik baik yang dapat digunakan dalam hal publikasi, komunikasi dan diseminasi inspirasi kepada sekolah lainnya
8. Mendapatkan apresiasi dalam bentuk sertifikat atau penghargaan sebagai sekolah yang berperan aktif dalam program pembinaan karakter murid melalui “Sahabat Sekolah Dasar”.

Bagi Orangtua

1. Terlibat langsung dalam pembentukan kebiasaan baik di rumah yang selaras dengan nilai-nilai sekolah

2. Melihat perkembangan positif anak dalam hal penumbuhan karakter melalui pembiasaan baik di sekolah, rumah dan lingkungan sekitar
3. Meningkatkan kebanggaan keluarga karena anak menjadi inspirasi bagi teman-temannya
4. Membangun kebiasaan positif dalam keluarga yang selaras dengan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH)
5. Menjalin hubungan yang lebih erat dengan sekolah dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Bagi Pemerintah Daerah

1. Memperkuat peran strategis pemerintah daerah dalam penguatan pendidikan karakter di daerah sesuai kebijakan nasional
2. Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan unit pelaksana teknis pendidikan dalam menciptakan ekosistem pembinaan karakter yang berkelanjutan
3. Mendapatkan inspirasi praktik baik untuk digunakan dalam forum diseminasi dan pengembangan program daerah.
4. Menjadi bagian dari forum apresiasi untuk sekolah/peserta inspiratif, yang dapat mendorong partisipasi lebih luas dari sekolah-sekolah lain
5. Meningkatkan citra dan kredibilitas dinas pendidikan sebagai motor penggerak penguatan karakter.

d. Analisis Program dan kegiatan terkait, yang mendukung pencapaian target kinerja Indikator Kinerja

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang telah dilakukan Direktorat Sekolah Dasar dalam upaya merealisasikan target IKK yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Sekolah Dasar tahun 2025. Beberapa kegiatan Direktorat Sekolah Dasar yang berhubungan langsung dengan masyarakat antara lain ;

1. Pendampingan Sekolah Aman, Nyaman, dan Menyenangkan

Kegiatan Pembekalan Sahabat Sekolah Dasar telah dapat dilaksanakan dengan baik selama 3 hari, sejak tanggal 17 s.d 19 September 2025 bertempat di Atria Hotel Gading Serpong, Jl. Boulevard Raya Gading Serpong No. Kav. 2, Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten 'Tangerang, Banten 15810. Kegiatan pendampingan sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan dihadiri oleh sekolah/satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai Sahabat Sekolah Dasar, Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BB/BPMP), dan lembaga terkait lainnya sebanyak 200 orang.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pembekalan Sahabat Sekolah Dasar, khususnya terkait dengan peningkatan pengetahuan/pemahaman dan keterampilan peserta, penyelenggara melaksanakan evaluasi melalui tes *Awal/pre-test* dan tes *Akhir/post-test*.

Materi tes untuk peserta dari unsur kepala sekolah/guru meliputi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH), pengelolaan media sosial, *coaching*, dan *mentoring*. Materi tes awal/pretes dan tes akhir/postes untuk peserta dari

unsur murid meliputi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH), storytelling, dan leadership.



Gambar 3.16. Siswa yang Menghadiri Kegiatan Pendampingan Sekolah Aman, Nyaman, dan Menyenangkan

Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan terdapat pelaporan kegiatan disertai beberapa foto dan video yang dapat diakses pada tautan berikut : <https://drive.google.com/drive/folders/1RHZp0S6mOFMGQthdBldFS4oPMRYNW5g?usp=sharing>.

2. Pembekalan Sahabat Sekolah Dasar



Gambar 3.17. Banner Pembekalan Sahabat Sekolah Dasar Tahun 2025

Pada tanggal 17 sampai dengan 19 September 2025, Direktorat Sekolah menyelenggarakan kegiatan pembekalan sahabat sekolah dasar yang dihadiri oleh sekolah/satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai Sahabat Sekolah Dasar, Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BB/BPMP), dan lembaga terkait lainnya sebanyak 200 orang. Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini, yaitu ;

- Memberikan pendalaman pemahaman kepada guru, kepala sekolah, dan murid terkait G7KAIH sebagai upaya penguatan pendidikan karakter.
- Membekali guru dan/atau kepala sekolah dengan keterampilan *coaching*, *mentoring*, dan strategi pendampingan agar dapat menjadi fasilitator dalam program Sahabat Sekolah Dasar.
- Menumbuhkan kepemimpinan, kreativitas, kemampuan komunikasi dan kolaborasi pada murid sehingga mereka siap menjadi teladan dan agen perubahan di lingkungannya.
- Melatih kemampuan literasi digital, *storytelling*, dan pemanfaatan media sosial secara bijak untuk mendukung diseminasi praktik baik Sahabat Sekolah Dasar sebagai agen perubahan terkait pendidikan karakter.



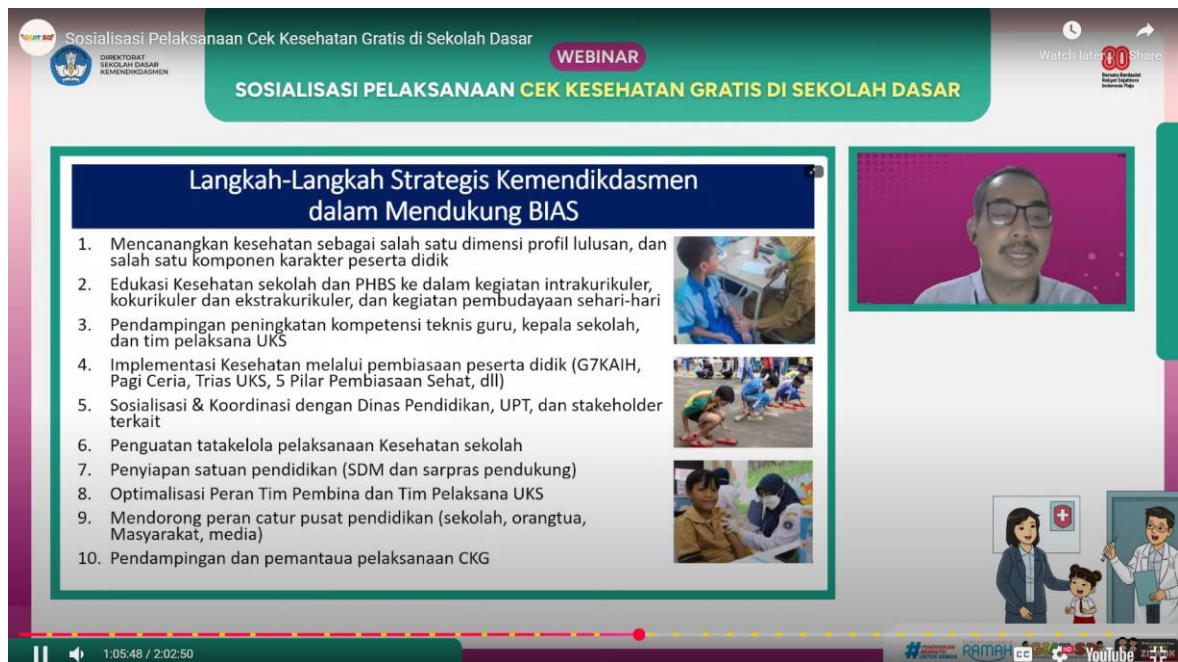
Gambar 3.18. Para Siswa yang Hadir pada Kegiatan Pembekalan Sahabat Sekolah Dasar

3. Webinar Sosialisasi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah Tahun Ajaran 2025/2026

Kegiatan Webinar Sosialisasi terkait Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2025 dihadiri oleh tim kerja Direktorat Sekolah Dasar yang bertujuan untuk:

- Meningkatkan pemahaman dan informasi peserta terkait dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah
- Memberikan edukasi kepada peserta agar pelaksanaan MPLS Ramah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan

4. Sosialisasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Murid Sekolah Dasar



Gambar 3.19. Sosialisasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Anak SD yang Ditayangkan pada Youtube

Kegiatan ini dilaksanakan pada 5 dan 6 Agustus 2025. Tujuan dari kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis adalah :

- Mensosialisasikan pelaksanaan CKG di Sekolah Dasar.
- Koordinasi implementasi Usaha Kesehatan Sekolah di Sekolah Dasar.

e. Analisis Faktor Penyebab Kegagalan pencapaian target Indikator Kinerja

Meskipun program ini telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat terutama siswa maupun tenaga kependidikan sekolah, pada tahun ini program ini masih dianggap belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan beberapa program, yaitu Sahabat Sekolah Dasar dan Penguatan Pendidikan Karakter merupakan program yang baru rilis pada tahun ini. Selain itu, data realisasi kinerja merupakan hasil survei ANBK yang dilaksanakan oleh Pusmendik.

f. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025

1. Terdapat sebuah kegiatan yang mana alokasi anggaran sangat banyak, yakni kegiatan advokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.364.930.000 (Empat Miliar Tiga Ratus Enam Puluh

Empat Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), dan penyaluran bantuan program Makan Bergizi Gratis dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.500.000.000 (Enam Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

2. Selama kegiatan webinar terkait penguatan karakter terdapat peserta yang terlambat hadir dan memiliki jaringan internet yang kurang stabil sehingga menyebabkan peserta kurang optimal dalam menerima informasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut
3. Semarak sahabat sekolah dasar : sebagai bentuk penguatan karakter peserta didik, program ini seharusnya dapat diwakili oleh perwakilan peserta didik di setiap kab/kota, namun dikarenakan keterbatasan anggaran kegiatan ini hanya dihadiri oleh beberapa sekolah yang ditetapkan dalam SK Sahabat Sekolah Dasar.

g. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2025

1. Pengelola program mengonfirmasikan kepada pimpinan, tim perencanaan dan evaluasi kinerja dan anggaran, serta satker Eselon I Kemendikdasmen bahwa anggaran diblokir sampai akhir tahun 2025 dikarenakan kegiatan tersebut yang sebenarnya kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan
2. Panitia/Penyelenggara webinar membagikan materi dalam bentuk paparan dan rekaman
3. Pada periode berikutnya perlu menyesuaikan anggaran program Sahabat Sekolah Dasar hendaknya dapat diberlakukan kepada perwakilan sekolah dari setiap kab/kota yang ada di Indonesia

h. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025



Gambar 3.20. Filosofi Bapak Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed yang Merupakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Dalam mewujudkan profil lulusan terdapat beberapa program yang akan diselenggarakan, yakni ;

1. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)
 - a. Program G7KAIH
 - b. Program Pagi Ceria
 - c. Program Gerakan Kepanduan dan Ekstrakurikuler Lainnya
 - d. Program Gerakan Rukun Sama Teman
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
3. Program Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

C. SK-3 Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Dasar

Meningkatnya tata kelola Direktorat Sekolah Dasar menjadi indikator yang menguraikan terkait proses peningkatan kualitas sistem, proses, dan praktik pengelolaan anggaran dan kinerja Direktorat Sekolah Dasar agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan serta standar yang ditetapkan. Sasaran Kinerja ini dapat diukur dengan 2 (dua) IKK yaitu ;

1. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sekolah Dasar dengan kategori sangat baik
2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sekolah Dasar minimal A

IKK.3.1.Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sekolah Dasar dengan kategori sangat baik

a. Penjelasan Definisi Operasional Indikator Kinerja

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah indikator kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk mengukur sejauh mana capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran suatu organisasi (baik pemerintah maupun swasta). NKA berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan produktivitas penggunaan anggaran. Terdapat regulasi yang mengatur tentang Nilai Kinerja Anggaran (NKA), yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

b. Cara Perhitungan Indikator Kinerja

Berdasarkan PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, kategori penilaian capaian atas indikator Kinerja anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.3. Batas Atas dan Bawah Kategori Penilaian NKA Tahun 2025

Range Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80-90%	Baik
>60-80%	Cukup
>50-60%	Kurang
<50%	Sangat Kurang

Untuk memperoleh realisasi IKK menggunakan rumus perhitungan berikut ;

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = 50\% * \text{Nilai IKPA} + 50\% * \text{Nilai EKA}$$

c. Analisis Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan

Direktorat Sekolah Dasar telah melakukan pemantauan realisasi anggaran secara berkala. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Eselon I Kemendikdasmen, pada tahun 2025 Direktorat Sekolah Dasar memperoleh Nilai Kinerja Anggaran berikut ;

[Download Excel](#)

Tampilkan 25 entri

Cari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
37	138.04.693256	DIREKTORAT SEKOLAH DASAR	99,96	89,00	94,48

Gambar 3.21. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat SD Tahun 2025

Data tersebut diperoleh dari hasil pengukuran dan pemantauan realisasi kinerja dan anggaran Direktorat Sekolah Dasar selama tahun 2025, Direktorat Sekolah Dasar memperoleh nilai IKPA sebesar 99,96 dan nilai EKA 89. Dari kedua nilai tersebut maka dapat diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar :

$$\begin{aligned}
 \text{NKA} &= 50\% \times 89 + 50\% \times 99.96 \\
 &= 44.5 + 49.98 \\
 &= \mathbf{94,48}
 \end{aligned}$$

Nilai IKPA dan EKA diperoleh dari berbagai indikator penilaian. Dari hasil Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tersebut dapat diketahui bahwa realisasi yang diperoleh dapat mencapai target yang ditetapkan pada Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Tahun 2025.

d. Analisis Program dan kegiatan terkait, yang mendukung pencapaian target kinerja Indikator Kinerja

Dalam mengupayakan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terhadap target kinerja yang telah ditetapkan, Direktorat Sekolah Dasar telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan IKK. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya ;

- 1) Pencairan gaji dan tunjangan kinerja pegawai
- 2) Pemasukan dan Pembaruan Data Realisasi Kinerja Direktorat Sekolah Dasar pada aplikasi SAKTI dan E-Monev Bappenas
- 3) Merevisi DIPA
- 4) Penggunaan UP dan TUP
- 5) Penyusunan laporan BMN

Realisasi IKK yang telah diperoleh Direktorat Sekolah Dasar ini dapat berdampak positif dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Sekolah Dasar pada tahun 2025.

e. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025

Dalam melaksanakan kegiatan terdapat permasalahan yang dialami ;

- 1) Deviasi Halaman III DIPA atau selisih antara realisasi anggaran dengan rencana daya serap anggaran jauh di bawah target yang telah ditetapkan
- 2) Dispensasi SPM yang dilakukan berulang kali mengakibatkan menurunnya nilai IKPA
- 3) Jadwal pelaksanaan kegiatan seringkali tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- 4) Adanya keterlambatan dalam melaporkan UP/TUP

f. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2025

Dari permasalahan yang dialami terdapat antisipasi yang telah dilakukan untuk mengatasinya ;

- 1) Melakukan penguatan perencanaan dan penajaman kinerja
- 2) Meminimalisir frekuensi dalam pengajuan dispensasi SPM Peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja dan anggaran
- 3) Penguatan koordinasi dan kolaborasi terkait pelaksanaan program atau kegiatan
- 4) Meminimalisir keterlambatan pelaporan UP/TUP

g. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025

Dalam upaya mencapai target IKK yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Sekolah Dasar Tahun 2025, Direktorat Sekolah Dasar melakukan beberapa strategi kebijakan ;

- 1) Merealisasikan anggaran sesuai rencana penggunaan anggaran yang telah ditetapkan
- 2) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan
- 3) Memberikan output kegiatan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kegiatan
- 4) Meminimalisir revisi DIPA
- 5) Memperbarui data realisasi kinerja Direktorat Sekolah Dasar ke dalam aplikasi dengan tepat waktu (5 hari kerja)
- 6) Mempercepat *revolving* dengan mengajukan GUP jika telah melakukan belanja sebesar 50%
- 7) Mengoptimalkan penggunaan TUP
- 8) Memonitoring pengelolaan UP/TUP secara berkala
- 9) Merencanakan hingga mengevaluasi belanja kontraktual secara berkala

IKK.3.2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sekolah Dasar minimal A

a. Penjelasan definisi operasional Indikator Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah, secara umum evaluasi AKIP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Sedangkan secara khusus, pelaksanaan evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- 1) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

b. Cara perhitungan Indikator Kinerja

Realisasi kinerja indikator kinerja diperoleh dari hasil penilaian AKIP oleh evaluator dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikdasmen melalui SPASIKITA. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari komponen, sub komponen, dan kriteria dengan bobot penilaian setiap komponen sebagai berikut ;

Tabel 3.4. Bobot Penilaian Evaluasi AKIP

Komponen Penilaian	Sub Komponen Penilaian			Total Bobot
	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15

Evaluasi Kinerja	5	7	12,5	25
Total Nilai	20	30	50	100

Nilai hasil dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dengan kategori predikat sebagai berikut ;

Tabel 3.5. Rentang Nilai Predikat AKIP

Rentang Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup(Memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

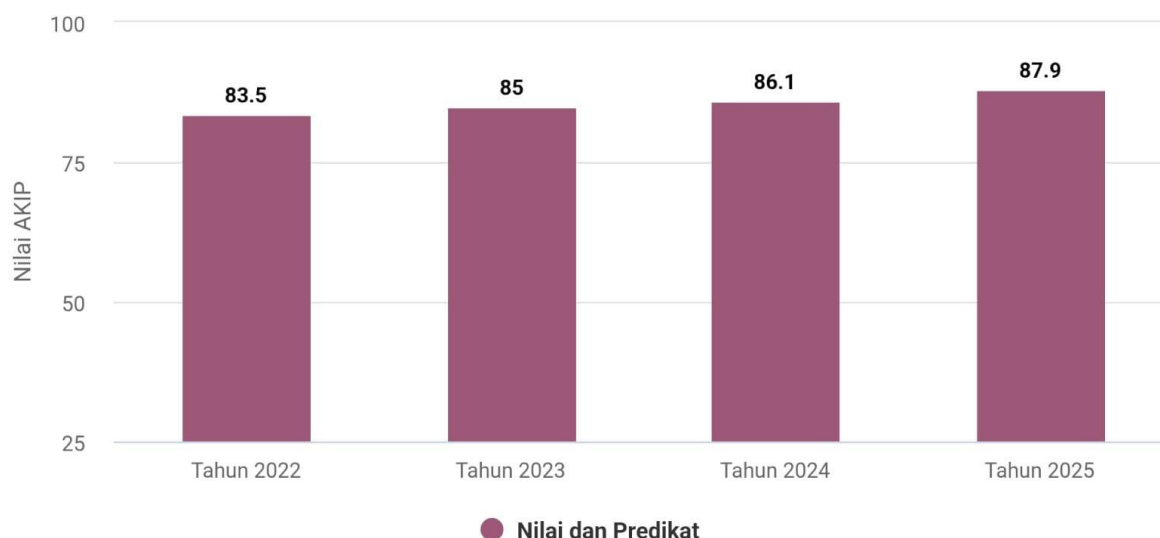
c. Analisis Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah/target akhir renstra

Capaian IKK pada tahun 2025 diperoleh nilai **87,9**, sehingga interpretasi yang diperoleh dalam predikat **A (Memuaskan)**. Pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Sekolah Dasar tahun 2025 menetapkan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan **A (Memuaskan)**. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan pada PK Direktur Sekolah Dasar tahun 2025.

d. Analisis Perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya

Untuk membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar berikut ;

Perbandingan Realisasi IKK Predikat Akuntabilitas Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2022-2025



Grafik 3.7. IKK Predikat AKIP Direktorat SD : Realisi IKK Tahun 2022-2025

Dapat dilihat pada gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) predikat akuntabilitas Direktorat Sekolah Dasar selalu mengalami kenaikan selama 4(empat) tahun mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2025. Realisasi kinerja tertinggi diperoleh pada tahun 2025 dengan nilai sebesar 87.9, sedangkan nilai terendah diperoleh pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 83.5. Selisih peningkatan realisasi IKK tertinggi diperoleh pada tahun 2025 dengan selisih realisasi IKK tahun 2025 dengan tahun 2024 sebesar 1.5. Sedangkan selisih peningkatan realisasi IKK terendah diperoleh pada tahun 2024 dengan selisih realisasi IKK tahun 2024 dengan tahun 2023 sebesar 1.1.

e. Analisis Program dan kegiatan terkait, yang mendukung pencapaian target kinerja Indikator Kinerja

Realisasi IKK predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Sekolah Dasar didukung oleh Rincian Output (RO) Layanan Umum. Layanan Umum memiliki beberapa kegiatan, yakni :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja dan Anggaran Direktorat Sekolah Dasar
- Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

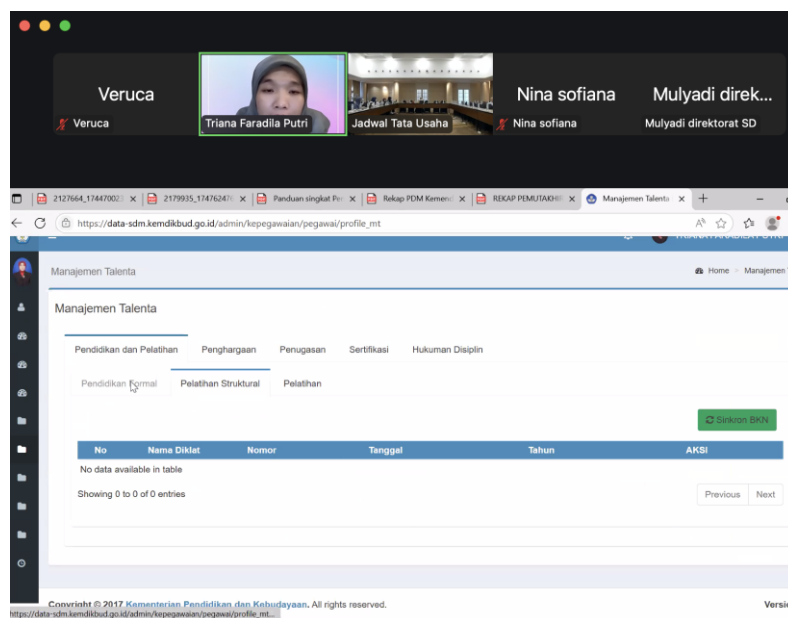
Setiap pegawai Direktorat Sekolah Dasar wajib menyusun rencana SKP, namun tidak semua pegawai Direktorat Sekolah Dasar dapat memahami langsung dalam mengisi rencana SKP yang baik sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tugas pokok masing-masing pegawai. Sehingga Direktorat Sekolah Dasar menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penyusunan rencana SKP dengan mengundang eksternal yang ahli dalam menyampaikan informasi terkait penyusunan rencana SKP.



Gambar 3.22. Panitia Kegiatan Sosialisasi Penyusunan SKP



Gambar 3.23. Peserta Kegiatan yang Berdiskusi



Gambar 3.24. Narasumber Menyampaikan Materi Terkait Penyesuaian Profil KemendikbudHR

1. Penyusunan Dokumen Pengukuran Kinerja Direktorat Sekolah Dasar

Direktorat Sekolah Dasar melakukan rapat pimpinan secara rutin untuk melaporkan, mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan program Direktorat Sekolah Dasar. Dalam pelaksanaan rapat, seluruh tim kerja melaporkan perkembangan atas pelaksanaan program yang dilaksanakan, beserta kendala pelaksanaan program kegiatan. Pelaporan ini memberikan gagasan Direktur Sekolah Dasar maupun Kasubbag Tata Usaha, dan Kasubdit Sarpras dan Tata Kelola untuk memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Selain itu, tim SAKIP (Tim Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja) secara rutin menyelenggarakan kegiatan persiapan dan penyusunan laporan kinerja per triwulan dimulai dari triwulan I s.d. Triwulan IV. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan internal, tetapi juga mengundang beberapa eksternal sebagai narasumber kegiatan untuk memaparkan materi yang dibutuhkan untuk memperoleh berbagai informasi strategi untuk meningkatkan capaian kinerja, tata

cara penyusunan laporan yang baik, dan rekonsiliasi realisasi kinerja dan anggaran Direktorat Sekolah Dasar.



Gambar 3.25. Peserta Kegiatan Pengukuran Akuntabilitas Triwulan I Tahun 2025



Gambar 3.26. Kegiatan Pengukuran Akuntabilitas Triwulan II Tahun 2025



Gambar 3.27. Penutupan Kegiatan Pengukuran Kinerja Direktorat SD Triwulan IV Tahun 2025

2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sekolah Tahun 2025

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025 disusun oleh tim penyusun LAKIP mulai Desember 2025 s.d. Januari 2026. Aktivitas ini melibatkan berbagai tim kerja dalam mengumpulkan data yang diperlukan termasuk tim SPI yang berperan dalam mereviu model awal LAKIP ini. Tim SPI memberikan berbagai masukan serta menganalisis akurasi data yang ada dalam laporan. Laporan yang telah disusun akan ditandatangani oleh Direktur Sekolah Dasar sebagai bukti bahwa laporan ini telah disetujui pimpinan. Setelah itu, tim penyusun LAKIP mengumpulkan

sekaligus melaporkan ke Eselon I melalui SPASIKITA sebagai bentuk penyelesaian akhir aktivitas ini.

f. Analisis faktor penyebab keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja

- **Pemantauan Pelaksanaan Program Direktorat Sekolah Dasar Secara Berkala**

Selama menjalankan program, pimpinan Direktorat Sekolah Dasar selalu memantau hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh seluruh tim kerja Direktorat Sekolah Dasar melalui Rapat Pimpinan (Rapim) C per minggu. Dalam rapat tersebut perwakilan masing-masing tim kerja melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, dan meminta arahan atau rekomendasi atas persiapan untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya. Dalam setiap rapat tersebut juga melibatkan tim Satuan Pengendalian Internal (SPI) yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan, serta menyampaikan hasil revidi kelengkapan berkas kegiatan yang sudah dilaksanakan.



Gambar 3.28. Peserta Rapim C Direktorat Sekolah Dasar



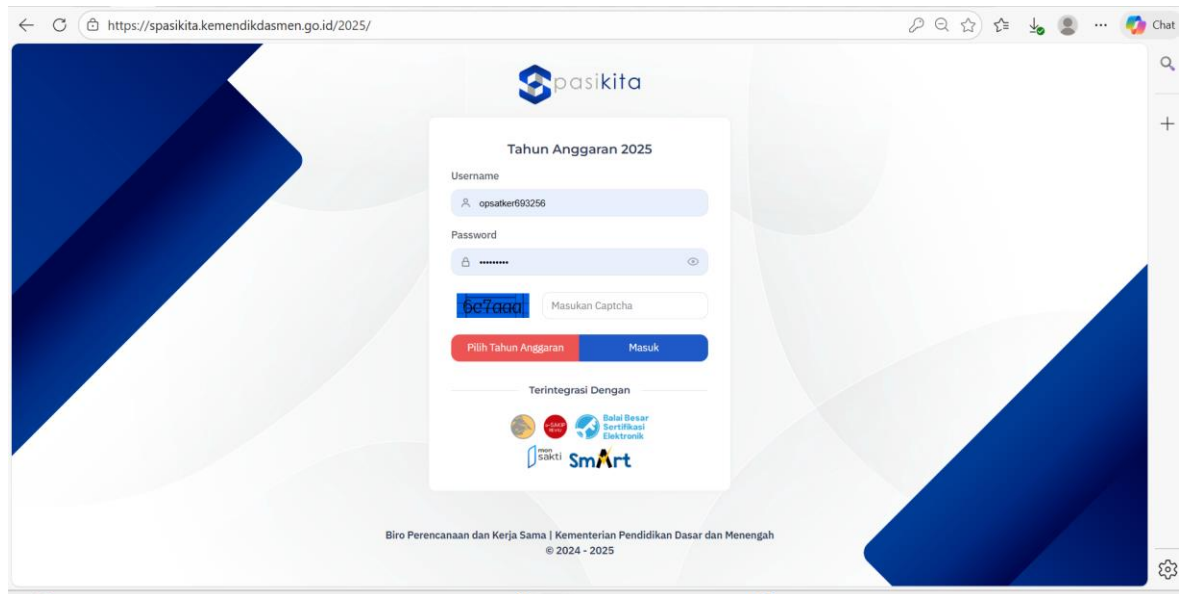
Gambar 3.29. Direktur Sekolah Dasar (Kiri) Bersama Kepala Subdit Sarpras (Kanan) Direktorat SD Tahun 2025

- Evaluasi Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Sekolah Dasar secara Mandiri**

Dalam mengevaluasi AKIP terdapat beberapa teknis yang dapat dilakukan, yakni ;

- a. *Checklist* pengumpulan : Data diperoleh melalui menyerahkan serangkaian data dan informasi daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja
- b. Komunikasi melalui : Data diperoleh melalui pengajuan pertanyaan secara tanya jawab langsung kepada penyedia data dan informasi.
- c. Observasi : Data diperoleh melalui alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas.
- d. Studi dokumentasi : Data diperoleh melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

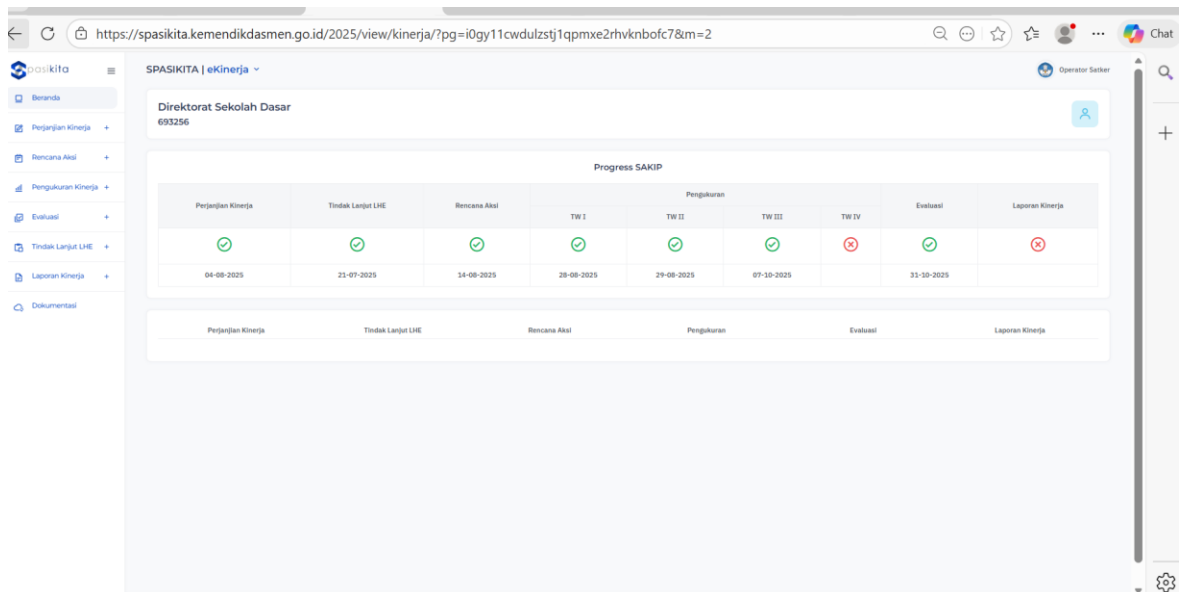
Dalam mengevaluasi AKIP, Direktorat Sekolah Dasar telah menggunakan aplikasi SPASIKITA sejak tahun 2022. Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja atau yang disingkat dengan SPASIKITA adalah aplikasi yang ditujukan untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi, yang fungsinya dimulai dari perencanaan anggaran, monitoring pelaksanaan program dan kegiatan anggaran, serta akuntabilitas kinerja yang dikembangkan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.



Gambar 3.30. Tampilan Login Akun SPASIKITA Tahun 2025

Aplikasi ini memiliki banyak kelebihan fitur, yaitu :

1. Mempermudah dalam menyusun perjanjian kinerja dan rencana aksi
2. Mempermudah dalam menyusun laporan kinerja per triwulan
3. Mempermudah dalam penyusunan dokumen evaluasi AKIP instansi
4. Pengumpulan LAKIP melalui aplikasi digital tanpa harus mengirimkan *softcopy* dari *flashdisk*
5. Dapat mengarsipkan dokumen AKIP



Gambar 3.31.6 Tampilan Beranda SPASIKITA

Dapat dilihat pada fitur aplikasi pada gambar di atas bahwa dalam mengevaluasi kinerja, Direktorat Sekolah Dasar menggunakan metode *Checklist* pengumpulan data, dan komunikasi tanya jawab.

Direktorat Sekolah Dasar mengevaluasi kinerja instansi secara mandiri melalui SPASIKITA. Evaluasi kinerja instansi dilakukan oleh Direktorat Sekolah Dasar dengan mengisi jawaban setiap pertanyaan yang ada di Kertas Kerja Evaluasi (KKE) disertai data dukung relevan pada setiap pertanyaan. Pertanyaan pada KKE mencakup aspek sistem perencanaan hingga evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada pertanyaan tertentu setiap komponen penilaian kinerja terdapat data dukung berupa instrumen wawancara dengan pertanyaan dasar yang telah disediakan pada KKE.



Gambar 3.32. Naisyah Maulidah (Kiri) Pegawai Tim Kerja Pendidikan Kesetaraan Diwawancarai Terkait Perencanaan Kinerja



Gambar 3.33. Bapak Kasubbag Tata Usaha Direktorat Sekolah Dasar (Kiri) dalam Selama Diwawancara Terkait Keterlibatan Pimpinan dalam AKIP



Gambar 3.34. Bapak Direktur Sekolah Dasar (Kiri) Diwawancara Tentang Keterlibatan Pimpinan dan Pengajuan Penilaian Nilai AKIP Secara Mandiri



Gambar 3.35. Anggota Tim Perencanaan dan Evaluasi Kinerja (Kiri) dalam merespon Pertanyaan Seputar Evaluasi Kinerja

Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai evaluator memberikan penilaian secara final AKIP Direktorat Sekolah Dasar sebesar **87,9 dengan kategori nilai A (Baik)**. Dari hasil penilaian tersebut, Direktorat Sekolah Dasar telah berhasil merealisasikan

target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Predikat SAKIP Direktorat Sekolah Dasar Minimal A.

g. Analisis Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Indikator Kinerja tahun 2025

Dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP dan budaya kerja internal terdapat permasalahan yang dialami ;

1. Keterlambatan penyelesaian dalam menyusun dokumen Renstra Direktorat Sekolah Dasar
2. Keterlambatan dalam menyusun dokumen laporan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran pada periode triwulan I dan triwulan II
3. Sebagian dokumen pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan per minggu (Rapim C) tidak lengkap atau notula tidak memberikan informasi kendala/permasalahan beserta rekomendasi pimpinan
4. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki sertifikat pusdiklat SAKIP sebagai bukti kompeten dalam menangani akuntabilitas kinerja baru 2 orang
5. Koordinasi antar tim kerja yang masih belum optimal

h. Analisis terkait Langkah antisipasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2025

Tindakan lanjut yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dialami, yakni ;

1. Tim perencanaan dan evaluasi kinerja dan anggaran melaporkan kepada pimpinan atas informasi batas waktu Renstra Dokumen Renstra, dan tetap mengupayakan Renstra dapat diselesaikan selambat-lambatnya akhir Desember 2025
2. Penyusunan laporan pengukuran kinerja triwulan berikutnya disusun dengan tepat waktu, dan menjadi masukan internal agar tahun berikutnya diupayakan agar tidak terjadi lagi
3. Penatausahaan dokumen rapat pemantauan serta pengukuran kinerja dan anggaran yang lebih komprehensif
4. Direktorat Sekolah Dasar mengirimkan minimal satu pegawai setiap tahun untuk mengikut diklat SAKIP
5. Mengoptimalkan kolaborasi dan koordinasi antar tim kerja

i. Analisis terkait strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025

Dalam memenuhi standar target penilaian akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Direktur Sekolah Dasar Tahun 2025, pimpinan dan pegawai Direktorat Sekolah melakukan rencana strategi untuk mencapai target IKK yang telah ditetapkan. Hal yang dilakukan tersebut, yakni ;

1. Menyusun perencanaan kinerja yang melibatkan pimpinan dan tim kerja Direktorat Sekolah Dasar dengan memperhatikan regulasi yang berlaku serta memenuhi kriteria *SMART*
2. Mengukur dan memantau kinerja secara berkala
3. Dokumen LAKIP 2024 dikumpulkan dengan tepat waktu
4. Mengevaluasi kinerja secara mandiri menggunakan aplikasi digital dengan memperhatikan kesesuaian standar regulasi yang berlaku, menindaklanjuti masukan dari evaluator, dan memperbaiki serta meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas

3.2 Realisasi Program

A. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025, Direktorat Sekolah Dasar melakukan revisi Daftar Isi Pembiayaan Anggaran (DIPA) sebanyak 20 kali dengan pagu anggaran sebesar Rp10.365.985.429.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp10.089.015.661.623 dengan persentase 97,33% yang digunakan untuk membiayai pencapaian 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 8 (delapan) indikator kinerja.

Tabel 3.6. Alokasi Anggaran Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Pagu Realisasi
1.	Belanja Pegawai	Rp15.460.498.000	Rp15.199.987.186
2.	Belanja Barang	Rp10.347.524.731.000	Rp10.071.185.559.051
3.	Belanja Modal	-	-
4.	Belanja Bansos	Rp3.000.000.000	Rp2.630.115.386
Total		Rp10.365.985.429.000	Rp10.089.015.661.623

B. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2025, Direktorat Sekolah Dasar melakukan efisiensi anggaran sebesar;

- 1) Rp108.108.559.000 (Seratus Delapan Miliar Seratus Delapan Juta Lima Ratus (dibandingkan dengan pagu anggaran 2025) karena Perpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- 2) Efisiensi anggaran Rp15.195.000.000 dari Rp14.000.000.000 dari Bantuan pemerintah Rp1.195.000.000 (Untuk mendukung pelaksanaan program prioritas di satuan kerja BB/BPMP pada tahun 2025)

C. Kinerja Lain-Lain

1.Reformasi Birokrasi

Reformasi Dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Sekolah Dasar terus berupaya membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi secara konsisten melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI-WBK). Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Direktorat Sekolah Dasar dilaksanakan melalui enam area perubahan, meliputi :

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Tatalaksana
- 3) Penataan Sistem Manajemen SDM
- 4) Penguatan Akuntabilitas
- 5) Penguatan Pengawasan
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pada Tahun 2025, Direktorat Sekolah dasar berhasil meraih predikat **Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) tingkat Kementerian pendidikan Dasar dan Menengah**. Capaian ini menjadi bukti komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam membangun budaya kerja berintegritas serta tata kelola organisasi yang profesional. Namun demikian, Direktorat Sekolah Dasar belum berhasil lolos ke tahap akhir penilaian ZI-WBK oleh Kementerian PANRB.

Berdasarkan hasil evaluasi internal dan telaah atas Lembar Kerja Evaluasi (LKE) terdapat beberapa faktor utama yang menjadi perhatian:

1. **Budaya Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai perilaku kerja harian**, dan masih dipresepsikan oleh sebagian pegawai sebagai kegiatan tambahan atau dokumen berbasis pemenuhan dokumen.
2. **Manajemen perubahan belum ditopang oleh ritual organisasi yang konsisten**, sehingga nilai integritas, santun, dan profesional belum terwujud secara merata dalam kebiasaan sehari-hari.
3. **Koordinasi lintas area perubahan belum berjalan optimal**, sehingga beberapa program Reformasi Birokrasi berjalan parial dan belum saling menguatkan.
4. **Peran pimpinan dan tim penggerak perubahan belum terstruktur dalam satu sistem penguatan budaya**, sehingga keteladana belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pola kerja bersama.
5. **Pengelolaan inovasi dan praktik baik belum terintegrasi sebagai bagian dari narasi Reformasi Birokrasi dan ZI**, sehingga dampak inovasi belum sepenuhnya terbaca dalam kerangka penilaian ZI-WBK
6. **Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum berjalan optimal dan terintegrasi di seluruh area perubahan**, khususnya dalam memastikan keberlanjutan program dan konsisten pelaksanaan.

D. Inovasi, Penghargaan, dan Program *Croscutting/Collaborative*

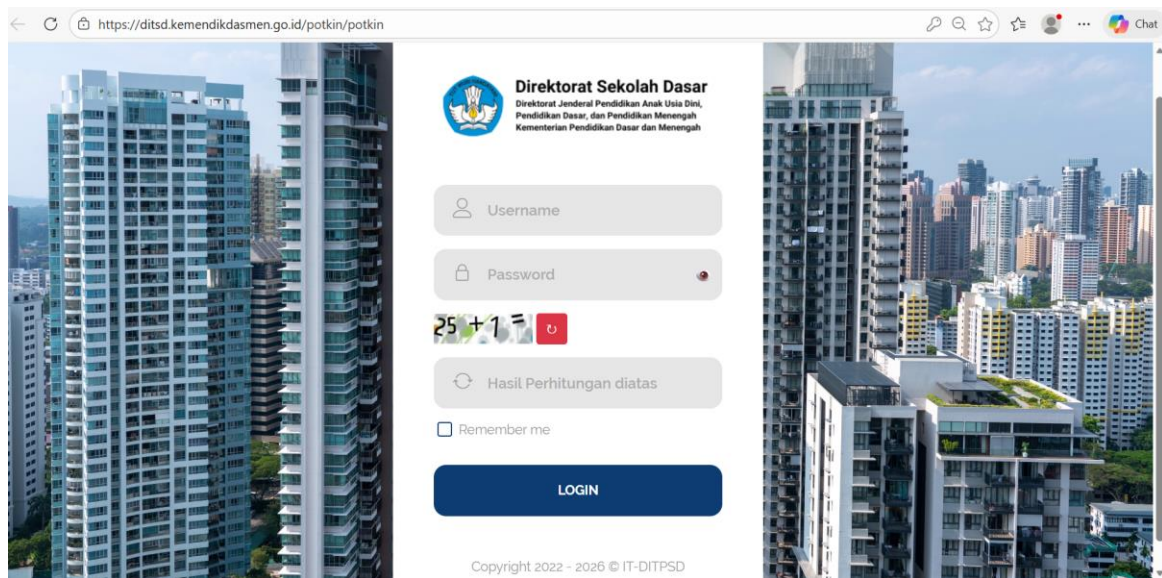
1. Inovasi

Direktorat Sekolah Dasar memiliki beberapa inovasi dalam upaya mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak secara internal maupun bagi masyarakat.

1) Potret Kinerja (Potkin)

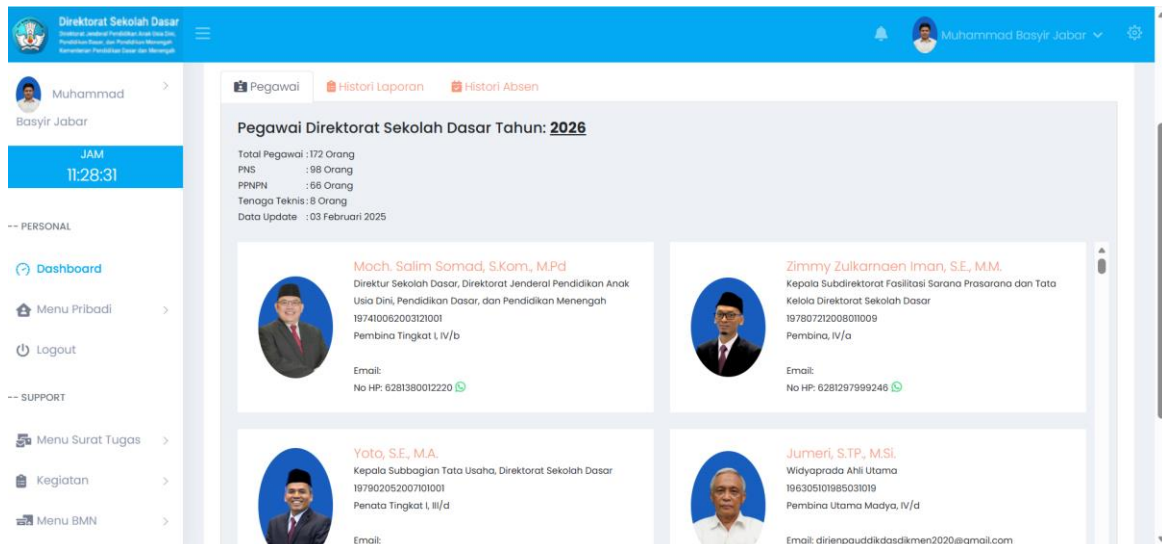
Kemunculan aplikasi Potret Kinerja atau disingkat dengan Potkin karena ketergantungan pada metode manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Keterbatasan koordinasi serta pengelolaan data yang terpisah juga sering menjadi hambatan dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Hal ini menunjukkan perlunya solusi yang dapat menyederhanakan dan mempercepat proses kerja pegawai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebuah sistem berbasis web dikembangkan sebagai platform terintegrasi yang mendukung kebutuhan pegawai. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi beban administratif, dan memastikan fleksibilitas dalam mendukung berbagai aktivitas, sekaligus mendorong transformasi digital yang lebih efektif di lingkungan kerja.

Aplikasi Potet Kinerja (Potkin) dapat diakses melalui tautan [Potret Kinerja Direktorat SD](https://ditsd.kemendikdasmen.go.id/potkin/potkin) atau <https://ditsd.kemendikdasmen.go.id/potkin/potkin>.



Gambar 3.36. Tampilan Laman Login Akun Potret Kinerja Direktorat Sekolah Dasar

Untuk dapat memasuki aplikasi Potkin, pegawai Direktorat Sekolah Dasar perlu memasukan *username* dan *password* yang diberikan oleh tim pengelola aplikasi Potkin. Jika pegawai berhasil login, maka tampilan pengguna akun akan memasuki beranda Potkin.

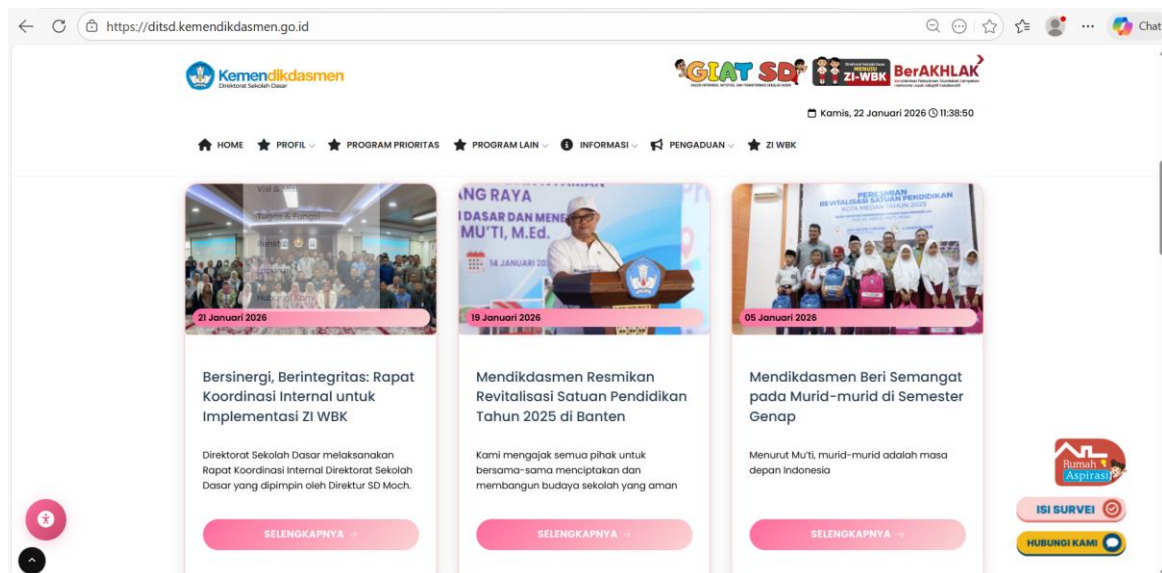


Gambar 3.37. Tampilan Beranda Potret Kinerja Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025

Sistem berbasis web ini dirancang dengan sejumlah fungsi utama untuk mendukung kebutuhan pegawai agar dapat dilakukan lebih efisien dan modern. Berikut adalah fitur-fitur yang disediakan:

- Pengajuan Kegiatan: Memungkinkan pegawai mengajukan kegiatan secara digital, agar lebih terstruktur dan terdokumentasi.
- Penyimpanan Data BMN: Menyediakan wadah penyimpanan terkait Data BMN, agar memudahkan pengumpulan data seputar Barang Milik Negara.
- Pembuatan Link Pendaftaran Online: Menyediakan fasilitas untuk membuat tautan pendaftaran, memudahkan pengumpulan data peserta secara cepat dan terorganisir.
- Pengarsipan Surat Tugas: Memudahkan Kasubbag Tata Usaha dalam melihat kegiatan apa saja yang sudah/sedang ditugaskan.
- Absensi Online: Mendukung pencatatan kehadiran secara real-time disertai dengan letak geografis saat absensi, untuk mendokumentasikan Kerja Dari Manapun (KDM) maupun Kerja Dari Kantor (KDK).
- Pembuatan Microsite: Memungkinkan pegawai membuat situs sederhana untuk kegiatan tertentu, memberikan wadah informasi yang mudah diakses oleh pihak terkait.
- Pembuatan Instrumen: Membuat Link Pengisian Instrumen untuk memudahkan pengumpulan data setelah melakukan Monitoring dan Evaluasi maupun Survey.
- Pembuatan Shortlink: Menghasilkan tautan pendek untuk mempermudah berbagi informasi atau akses ke halaman tertentu tanpa URL yang panjang.
- Pembuatan QR Code: Menyediakan opsi untuk membuat kode QR yang dapat dipindai, memudahkan akses cepat ke tautan atau informasi kegiatan.
- Pencarian Pegawai: Memberikan kemudahan untuk mencari data pegawai dalam sistem, mempercepat proses koordinasi dan verifikasi identitas.
- Fitur Tambahan Lainnya: Mengunduh Biodata Pribadi, Mengunduh SPMK PM-Pendampingan (Khusus WP), Mengganti Profil, Mengganti Password, dsb.

2) GIAT-SD



Gambar 3.38. Tampilan Laman Beranda GIAT-SD Tahun 2025

GIAT SD (Galeri Informasi Aktivitas dan Transformasi Sekolah Dasar) merupakan inovasi Direktorat Sekolah Dasar dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk hadir di masyarakat melalui platform website dan media sosial (youtube, Instagram, twitter, facebook). Munculnya inovasi ini disebabkan karena adanya jumlah sekolah dasar di Indonesia yang begitu banyak, yakni sekitar 149.506 sekolah (Data terakhir 31 Desember 2025) dari berbagai daerah yang memerlukan informasi penting terkait berbagai kebijakan dan strategi dalam menjalankan program pendidikan sekolah dasar, maupun informasi lainnya.

GIAT-SD memiliki 5 jenis program, yakni ;

- GIAT Menyapa merupakan program Direktorat Sekolah Dasar untuk menyapa stakeholder pendidikan di seluruh Indonesia, baik Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru maupun peserta didik, contoh program GIAT Menyapa adalah Ngobrol Pintar (NgoPi) Bareng Sahabat SD, Happy Monday, Podcast
- GIAT Edukasi merupakan optimalisasi media untuk menyediakan konten-konten edukatif bagi Sahabat Sekolah Dasar, sehingga isu-isu strategis dapat tersampaikan, contoh 6 literasi dasar, profil pelajar pancasila, AKM, dll.
- GIAT Berkabar merupakan penyampaian informasi terbaru seputar kebijakan, program maupun kegiatan Direktorat Sekolah Dasar pada khususnya, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada umumnya, contoh GIAT Berkabar adalah update berita dan artikel di website maupun medsos Direktorat SD
- GIAT Melayani merupakan upaya Direktorat Sekolah Dasar untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat agar dapat berinteraksi secara online dengan Direktorat Sekolah Dasar
- GIAT Berpartisipasi merupakan wujud apresiasi kepada sekolah (kepala sekolah, guru, dan peserta didik) atas komitmen dan loyalitasnya dalam menghasilkan inovasi dan kreativitas yang didokumentasikan di Media Center Direktorat Sekolah Dasar



Direktorat Sekolah Dasar

@DitpsdTv • 314K subscribers • 1K videos

Direktorat Sekolah Dasar ...more

ditpsd.kemdikbud.go.id and 1 more link

Subscribed

Home Videos Shorts Live Playlists Posts



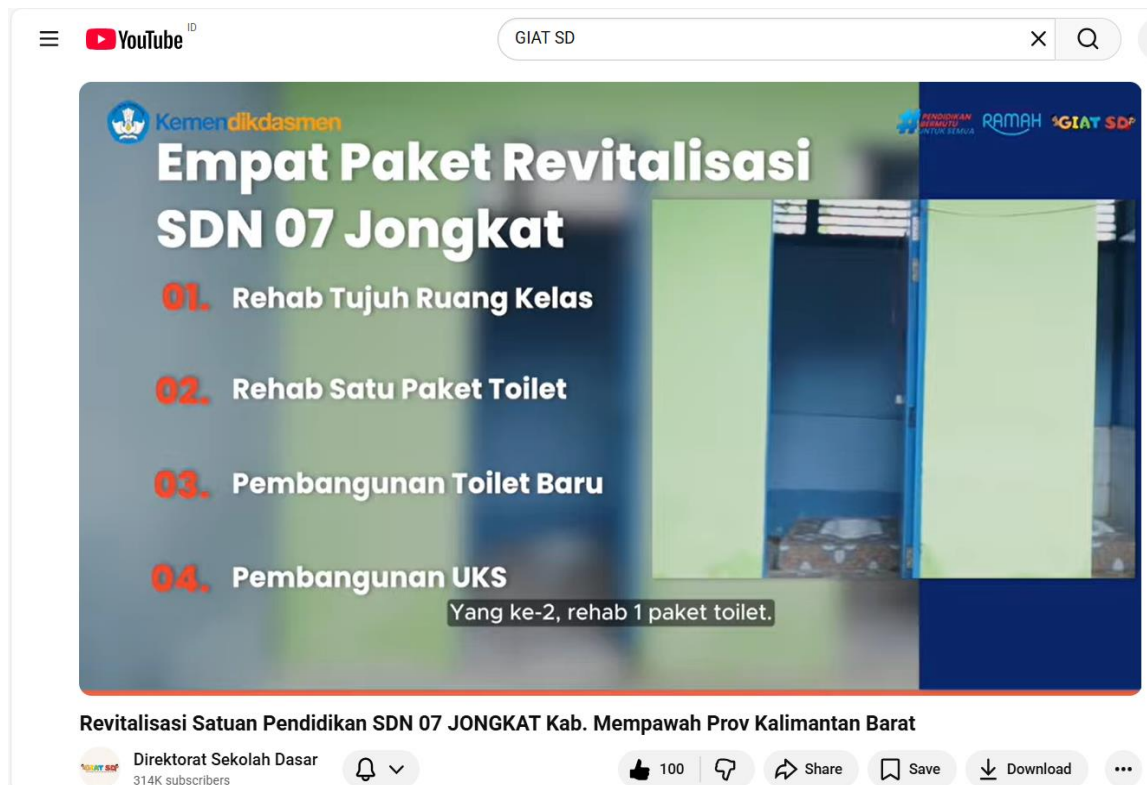
Jingle GIAT SD

Direktorat Sekolah Dasar • 58K views • 1 year ago

Jingle GIAT (Galeri Informasi Aktivitas Transformasi) SD #giatsd

Gambar 3.39. Channel Youtube Direktorat Sekolah Dasar dengan pengikut sebanyak 314.000 akun youtube

Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa total subscriber channel youtube Direktorat Sekolah Dasar sekitar 314.000 pengikut (Riwayat *Followers* terakhir 31 Desember 2025). Selama tahun 2025, channel youtube Direktorat Sekolah Dasar banyak membagikan video webinar dan sosialisasi terkait program prioritas Direktorat Sekolah Dasar yakni revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran sekolah dasar, serta beberapa program Direktorat Sekolah Dasar lainnya.



Gambar 3.40. Salah Satu Tayangan Video Channel GIAT-SD Tahun 2025

3) Sahabat Sekolah Dasar

Sahabat Sekolah Dasar merupakan program Direktorat Sekolah Dasar yang bertujuan untuk mencari dan membina murid Sekolah Dasar yang memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan yaitu:

- Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan YME: Menghormati sesama dan selalu bersyukur.
- Kemandirian: Berani mencoba, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah.
- Kewargaan: Bangga sebagai anak Indonesia dan peduli dengan lingkungan sekitar.
- Kesehatan: Menjaga kebersihan diri, makan sehat, dan rajin berolahraga.
- Penalaran Kritis: Mampu berpikir logis dan menemukan solusi saat menghadapi tantangan.
- Kreativitas: Selalu punya ide baru dan senang mencoba hal-hal baru.
- Kolaborasi: Mampu bekerja sama dengan teman dan membangun kebersamaan.
- Komunikasi: Berani berbicara dan menyampaikan pendapat dengan sopan.

Murid yang terlibat dalam program Sahabat Sekolah Dasar akan menjadi inspirasi bagi teman-temannya dalam menerapkan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH). Mereka tidak hanya belajar, tetapi juga mengajak teman-temannya untuk menerapkan kebiasaan baik di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar.

2. Penghargaan

Pada tahun 2025, Direktorat Sekolah Dasar telah memperoleh penghargaan atas keberhasilan dalam membangun unit kerja berpredikat **Zona Integritas – Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) Tahun 2025** tingkat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.



Gambar 3.41. Piagam Penghargaan ZI-WBK Direktorat SD Tahun 2025 Tingkat Kemendikdasmen

3.Program Crosscutting/Collaborative

Dalam menjalankan program, Direktorat Sekolah Dasar melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar, diantaranya :

Tabel 3.7. Daftar Mitra Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025

No.	Kemitraan Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025
1.	Lembaga Swadaya Mutiara Rindang
2.	Provisi Mandiri Pratama
3.	PT. Cahaya Inspira Adiwangsa
4.	Yayasan Wahana Visi Indonesia
5.	Yayasan Maybank Indonesia
6.	UNICEF
7.	ProVisi
8.	Ruang Belajar Aqil
9.	PT. Unilever Indonesia TBK
10.	PT. Investama dan PT. Sarihusada rasi Mahardhika (Danone)
11.	PT. KAO Indonesia
12.	PT. Maleo Edukasi Teknologi (Educourse.id)
13.	Yayasan Save The Children Indonesia
14.	Badan Pangan Nasional - Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan
15.	Badan Pangan Nasional - Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi
16.	Ma'arif
17.	Hisminu
18.	PT. Nestle Indonesia
19.	PT. Frisian Flag Indonesia

20.	PT. Acer Indonesia
21.	PT. Dwida Jaya Tama
22.	PT. Bangga Teknologi indonesia
23.	PT. Prima Duta Nusantara
24.	Gamma Persada Group
25.	PT. Haula Sejahtera
26.	CV. Wardhana
27.	CV. Alkautsar Aflah Mandiri
28.	CV. Orion
29.	Yayasan Wahana Visi Indonesia (WVI)
30.	Yayasan Sagasitas Indonesia
31.	PT. Trakindo Utama
32.	AIA
33.	Bobo
34.	Yayasan Hidung Merah (Red Nose Foundation)
35.	World Food Program
36.	Kementerian Agama
37.	Kementerian Pemuda dan Olahraga
38.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
39.	Yayasan World Wild Fund Perikanan
40.	Yayasan Strategi Pengkajian Edukasi
41.	Alternatif Komunikasi Indonesia (SPEAK)
42.	Ikatan Dokter Anak Indonesia
43.	Komite Permainan Rakyat dan Olahraga
44.	Tradisional Indonesia
45.	PT. Gramedia
46.	PT. Mondelez Indonesia

47.	PT. Garam Media Edukasi
48.	CV. Andi Offset
49.	PT. Jepe Press Media Utama (JP Books)
50.	Sahabat Pulau Indonesia
51.	PT Cahaya Inspira Adiwangsa (Majalah CIA)
52.	Bio Farma PT Cisarua Mountain Dairy

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Direktorat Sekolah Dasar telah menjalankan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Sekolah Dasar 2025-2029, Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Sekolah Dasar tahun 2025, dan Rencana Aksi (Renaksi) Direktorat Sekolah Dasar tahun 2025 dapat ditarik kesimpulan :

- 1) Terdapat 1 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Sekolah Dasar dengan realisasi kinerja di bawah target
- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Sekolah Dasar mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun berturut-turut
- 3) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi IKK pada tahun sebelumnya
- 4) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Sekolah Dasar telah diakui berpredikat Zona Integritas - Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) pada tingkat Kementerian Pendidikan dan Menengah

4.2. Rekomendasi

Capaian kinerja Direktorat Sekolah Dasar tahun 2024 kiranya dapat menjadi titik tolak dalam meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran dan target yang akan ditetapkan pada tahun berikutnya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan sesuai dengan analisis dari kesimpulan yang telah disebutkan, berikut ini beberapa rekomendasi :

1.Strategi

- 1) Penguatan kolaborasi antara pimpinan, tim AKIP, dan tim kerja program Direktorat Sekolah Dasar dalam kolektif data kegiatan yang telah dilaksanakan setiap bulan
- 2) Dalam mereviu LAKIP tahun berikutnya dilaksanakan lebih terjadwal dan keterlibatan tim kerja Direktorat Sekolah Dasar dioptimalkan
- 3) Mengoptimalkan pemantauan mitigasi risiko
- 4) Menelaah kembali POS Direktorat Sekolah Dasar yang telah disusun 2025 dan merevisi atau menambahkan POS Direktorat Sekolah Dasar tahun 2026
- 5) Memberikan pelatihan kepada pegawai Direktorat Sekolah Dasar untuk meningkatkan kemampuan (*skill*) dan peluang karir
- 6) Penguatan Manajemen Perubahan Berbasis Budaya Kerja
 - Menetapkan dan mengimplementasikan budaya kerja **SD BERSAHABAT (Bersih, Santun, Hebat)** sebagai nilai inti Direktorat Sekolah Dasar
 - Menurunkan nilai **RAMAH dan SANTUN** Kementerian serta nilai ASN BerAKHLAK kedalam perilaku kerja konkret dan standar sikap ASN

7) Pembangunan Ritual Budaya Kerja

- Mengembangkan ritual organisasi sebagai media internalisasi nilai, antara lain (i) komitmen bersama budaya kerja yang dibacakan dan disepakati secara berkala (ii) Forum berbagi (sharing session) dan mentor-mentee sebagai sarana pembelajaran dan keteladanan.
- Menjadikan ritual budaya sebagai bagian dari Manajemen Perubahan dalam Reformasi Birokrasi.

8) Penguatan Tata Kelola Tim RB dan ZI-WBK

- Penataan kembali peran TIM ZIWBK dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam satu sistem penguatan Reformasi Birokrasi.
- Penyusunan mekanisme kerja yang memastikan koordinasi lintas area perubahan berjalan efektif dan terukur.

9) Penguatan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

- Penyusunan rencana monitoring dan evaluasi RB dan ZI-WBK yang terintegrasi dengan rencana aksi.
- Evaluasi berkala atas pelaksanaan program, efektivitas budaya kerja, dan konsistensi implementasi pedoman.

10) Integrasi Inovasi dan Praktik Baik

- Menjadikan inovasi Direktorat Sekolah Dasar sebagai bagian dari penguatan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.
- Mengaitkan inovasi dengan capaian area perubahan dan narasi ZI-WBK secara sistematis.

2. Program

- 1) Pengukuran dan Pemantauan Kinerja Direktorat Sekolah Dasar Per Bulan
- 2) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2026
- 3) Mereviu kembali POS yang telah disusun oleh Direktorat Sekolah Dasar dengan melihat hasil monitoring dan evaluasi POS Direktorat Sekolah Dasar tahun 2025
- 4) Memantau dan Mengevaluasi POS yang telah disusun Direktorat Sekolah Dasar
- 5) Memantau efektifitas dan efisiensi penggunaan teknologi digital oleh pegawai Direktorat Sekolah Dasar dalam operasional pengukuran kinerja individu/instansi maupun memberikan pelayanan publik
- 6) Pembaruan standar pelayanan Direktorat Sekolah Dasar

3. Kegiatan

- 1) Pengumpulan dan pemantauan data kinerja dan anggaran Direktorat Sekolah Dasar setiap Bulan yang dihadiri oleh pimpinan, tim SPI, tim AKIP, dan perwakilan tim kerja program
- 2) Reviu LAKIP Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2026
- 3) Penyusunan mitigasi risiko program Direktorat Sekolah Dasar tahun 2026

- 4) Monitoring dan evaluasi mitigasi risiko program Direktorat Sekolah Dasar tahun 2026
- 5) Reviu POS Direktorat Sekolah Dasar yang 2026
- 6) Penyusunan POS Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2026
- 7) Monitoring dan Evaluasi POS Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2026
- 8) Analisis kebutuhan SDM dalam meningkatkan kemampuan dan karir
- 9) Monitoring dan evaluasi penerapan *Whistle Blowing System* Direktorat Sekolah Dasar
- 10) Reviu standar pelayanan Direktorat Sekolah Dasar
- 11) Penyusunan standar pelayanan Direktorat Sekolah Dasar

Lampiran I. SK Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat SD Tahun 2025



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725610
Laman <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

**KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

NOMOR : 2835/C3/PR.04.03/2025

**TENTANG
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025
DIREKTORAT SEKOLAH DASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR SEKOLAH DASAR,**

- Menimbang** : a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program anggaran dan kegiatan yang dibiaya APBN;
- b. bahwa dengan SAKIP maka ada integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan;
- c. bahwa dalam rangka evaluasi Perencanaan Kinerja, Indikator Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 Direktorat Sekolah Dasar;
- d. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel serta untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Sekolah Dasar yang efektif dan efisien, perlu menelaah Laporan Kinerja
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Sekolah Dasar tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| Pertama | : | Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 Direktorat Sekolah Dasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut lampiran keputusan ini |
| Kedua | : | Menunjuk Tim Teknis dalam rangka mengkoordinasikan, menyusun, dan melengkapi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini |

- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Tim SAKIP Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025 ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sekolah Dasar, Tahun Anggaran 2025 yang relevan.
- Keempat : Masa tugas Tim SAKIP sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua berakhir pada bulan Desember Tahun 2025.
- Kelima : Tim SAKIP sebagaimana dimaksud memiliki tugas :
1. Menyusun/merevisi dokumen perencanaan kinerja dan anggaran ;
 2. Melakukan pemantauan pelaksanaan kinerja program dan anggaran ;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kinerja program dan anggaran ;
 4. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kinerja program dan anggaran ;
 5. Melaksanakan tugas lainnya yang relevan ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 17 Oktober 2025
Direktur Sekolah Dasar,



Moch Salim Somad, S.Kom, M.Pd
NIP 197410062003121001

LAMPIRAN

NOMOR : 2835/C3/PR.04.03/2025

TANGGAL : 17 Oktober 2025

**ANGGOTAAN TIM SAKIP DIREKTORAT SEKOLAH DASAR
TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan Kedinasan
Perencanaan		
1.	Arman Satya Prayoga	Penelaah Teknis Kebijakan
2.	Yono	Pengadministrasi Perkantoran
3.	Muhammad Wisnu Prabowo	Penelaah Teknis Kebijakan
4.	Septa Aristiani Saputri	Penelaah Teknis Kebijakan
5.	Teuku Haviezer Agusta	Penata Layanan Operasional
Pengukuran		
6.	Djohan Achmadi	Widyaprada Ahli Madya
7.	Minhajul Ngabidin	Widyaprada Ahli Madya
8.	Lanny Anggraini	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya
9.	David Eka Wardoyo	Widyaprada Ahli Muda
10.	Niknik Kartika	Analisis Kebijakan Ahli Muda
Pelaporan		
11.	Wiryono	Penelaah Teknis Kebijakan
12.	Sonny Wijanarko	Penata Layanan Operasional
13.	Adipati Wirakusuma	Penata Layanan Operasional
14.	Wulan Ayu Indriani	Tenaga Ahli
15.	Adzkia Mutiari	PPNPN
Evaluasi		
16.	Muhamad Basyir Jabar	Penelaah Teknis Kebijakan
17.	Naisyah Maulida	Penelaah Teknis Kebijakan

Evaluasi		
18.	Talitha Lutfia Izza Permata	Penelaah Teknis Kebijakan
19.	Veruca Rendratika	Penelaah Teknis Kebijakan
20.	Muhammad Ridho Arsyah	PPNPN

Direktur Sekolah Dasar,



Moch Salim Somad, S.Kom, M.Pd
NIP 197410062003121001

Lampiran II. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Direvisi



**Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Direktur Sekolah Dasar
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Salim Somad
Jabatan : Direktur Sekolah Dasar
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 4 Agustus 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah
Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Sekolah Dasar
Mochammad Salim Somad

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas	[IKK 1.1] Jumlah kab/kota yang menerima program afirmasi pada jenjang SD	Lembaga	514
	[IKK 1.2] Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD	Orang	37403
	[IKK 1.3] Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras	Persen	11.58
[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas	[IKK 2.1] Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	Persen	48.77
	[IKK 2.2] Persentase SD yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Persen	98.1
	[IKK 2.3] Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	Persen	73.2
[SK 3] Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Sekolah Dasar	[IKK 3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sekolah Dasar dengan kategori sangat baik ●	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sekolah Dasar minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7596	Pembinaan Sekolah Dasar	Rp35.388.802.000
2	7601	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar	Rp249.048.769.000
3	7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp33.910.903.000
Total Anggaran			Rp318.348.474.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Anak
 Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
 Pendidikan Menengah
 Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.

Jakarta, 4 Agustus 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Sekolah Dasar
 Mochammad Salim Somad

Lampiran III. Perjanjian Kinerja Direktur 2025 yang telah Direvisi



**Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Direktur Sekolah Dasar
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Salim Somad
Jabatan : Direktur Sekolah Dasar
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 8 Desember 2025


Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah
Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.


Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Sekolah Dasar
Mochammad Salim Somad



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas	[IKK 1.1] Jumlah kab/kota yang menerapkan program afirmasi pada jenjang SD	Lembaga	514
	[IKK 1.2] Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD	Orang	37403
	[IKK 1.3] Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras	Persen	11,58
[SK 2] Meningkatkan pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas	[IKK 2.1] Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	Persen	48,77
	[IKK 2.2] Persentase SD yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Persen	98,1
	[IKK 2.3] Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	Persen	73,2
[SK 3] Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Sekolah Dasar	[IKK 3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sekolah Dasar dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sekolah Dasar minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7596	Pembinaan Sekolah Dasar	Rp4.907.397.336.000
2	7601	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar	Rp5.424.413.338.000
3	7606	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp33.910.903.000
Total Anggaran			Rp10.365.721.577.000

Jakarta, 8 Desember 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Anak
 Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
 Pendidikan Menengah
 Gogot Suharwoto, S.Pd., M.Ed., Ph.D.


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Sekolah Dasar
 Mochammad Salim Somad



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN



Lampiran IV. Rencana Aksi Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025



Rencana Aksi Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025

Rencana Aksi Kinerja

Sasaran/Indikator	Satuan	Target	Triwulan			
			I	II	III	IV
[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas						
[IKK 1.1] Jumlah kab/kota yang menerima program afirmasi pada jenjang SD	Lembaga	514	0	0	476	514
[IKK 1.2] Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD	Orang	37403	0	0	12450	37403
[IKK 1.3] Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras	Persen	11,58	0	0	9.59	11,58
[SK 2] Meningkatkan pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas						
[IKK 2.1] Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	Persen	48,77	0	5	30	48,77
[IKK 2.2] Persentase SD yang menerapkan kurikulum yang berlaku	Persen	98,1	0	0	73.52	98,1
[IKK 2.3] Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	Persen	73,2	0	0	60.50	73,2
[SK 3] Meningkatkan Tata Kelola Direktorat Sekolah Dasar						
[IKK 3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sekolah Dasar dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik	-	-	-	Sangat Baik
[IKK 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sekolah Dasar minimal A	Predikat	A	-	-	-	A

Rencana Aksi Rincian Output



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No	Rincian Output	Satuan	Target	Triwulan				Alokasi
				I	II	III	IV	
1	[DF.7596.QDB.203] SD yang mendapatkan Dukungan Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun	Lembaga	514	0	0	275	239	Rp14.442.697.000
2	[DF.7596.RBI.291] SD yang Direvitalisasi	unit	4053	0	4	3568	481	Rp4.892.954.639.000
3	[DI.7601.QDB.231] SD yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	Lembaga	514	0	0	280	234	Rp3.147.635.000
4	[DI.7601.QDB.233] SD yang Melaksanakan Program UKS	Lembaga	514	0	0	265	249	Rp30.938.516.000
5	[DI.7601.QDB.238] SD Yang Menerapkan Kurikulum Yang Berlaku	Lembaga	514	0	0	117	397	Rp15.627.480.000
6	[DI.7601.QDB.280] SD yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu	Lembaga	514	0	15	384	115	Rp143.453.494.000
7	[DI.7601.RAA.293] SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran	Unit	149506	0	0	36247	113259	Rp4.221.561.795.000
8	[WA.7606.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	0	0	0	1	Rp10.000.000
9	[WA.7606.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	0	0	1	Rp2.990.000.000
10	[WA.7606.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	0	0	1	Rp30.910.903.000
Total Anggaran								Rp9.356.037.159.000

Jakarta, 13 Agustus 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Sekolah Dasar
 Mochammad Salim Somad



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Lampiran V. Laporan Kinerja Direktorat Sekolah Dasar Triwulan I Tahun 2025



Laporan Kinerja Triwulan 1 Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Direktorat Sekolah Dasar selama triwulan 1 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 1	Realisasi
[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas				
[IKK 1.1] Jumlah kab/kota yang menerima program afirmasi pada jenjang SD	514	Lembaga	0	0
[IKK 1.2] Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD	37403	Orang	0	0
[IKK 1.3] Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras	11,58	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas				
[IKK 2.1] Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	48,77	Persen	0	0
[IKK 2.2] Persentase SD yang menerapkan kurikulum yang berlaku	98,1	Persen	0	0
[IKK 2.3] Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	73,2	Persen	0	0
[SK 3] Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Sekolah Dasar				
[IKK 3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sekolah Dasar dengan kategori sangat baik	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sekolah Dasar minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas

[IKK 1.1] Jumlah kab/kota yang menerima program afirmasi pada jenjang SD

Progress/Kegiatan

Progress pelaksanaan program kegiatan yang telah dilakukan selama triwulan 1 tahun 2025 :

Tidak ada kendala/permasalahan yang dialami.

Strategi/Tindak Lanjut

Tidak ada solusi/tindaklanjuti.

[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas

[IKK 2.1] Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I tahun 2025 :

1. Pendampingan Perencanaan Berbasis Data
2. Pendampingan Pengisian Dapodik pada Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan
3. Penyusunan Naskah Akademik/Grand Design Wajar 13 tahun
4. Workshop Pendidikan Implementasi Program Direktorat Sekolah Dasar

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami :

1. Dokumen Renstra Kemendikdasmen 2025-2029 masih dalam progres penyusunan

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/tindaklanjuti yang telah dilakukan :

1. Tim perencanaan Kemendikdasmen mengadakan rapat virtual untuk menentukan target IKK Renstra Kemendikdasmen 2025-2029

[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas

[IKK 2.2] Persentase SD yang menerapkan kurikulum yang berlaku

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I tahun 2025 :

1. Rapat Koordinasi penguatan kepada UPT/ Dinas Pendidikan
2. Penyusunan Dokumen dan Verval Data Penerima Ijazah Sekolah Dasar
3. Rapat Koordinasi E-Rapor

Kendala/Permasalahan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI E



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/permasalahan yang dialami :

1. Dokumen Renstra Kemendikdasmen 2025-2029 masih dalam progres penyusunan sehingga tim perencanaan Kemendikdasmen mengadakan rapat virtual untuk menentukan target IKK Renstra Kemendikdasmen 2025-2029
2. Terdapat kendala teknis yaitu gedung tidak memiliki kabel untuk microphone ketika melakukan kegiatan secara hybrid
2. Konsep ruang rapat tidak didesain untuk paket meeting yg formal, lebih cenderung seperti kafe

Strategi/Tindak Lanjut**Strategi/tindakanlanjutan yang telah dilakukan :**

1. Tiim perencanaan Kemendikdasmen mengadakan rapat virtual untuk menentukan target IKK Renstra Kemendikdasmen 2025-2029
2. Panitia melaporkan kepada pengelola tempat kegiatan apakah memiliki audiojaknya, kemudian melakukan perubahan teknis untuk melakukan komunikasi menggunakan perangkat masing-masing agar terdengar dengan jelas
3. Peserta kegiatan memberikan masukan kepada panitia agar tempatnya tidak digunakan lagi di waktu mendatang

[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas**[IKK 2.3] Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik****Progress/Kegiatan****Progres/Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan i tahun 2025 :**

1. Penyusunan NPK/Pedoman Program Sekolah Sehat Tahap I
2. Rapat Koordinasi Dukungan Pelaksanaan Program MBG dengan Tim Pusat (Ditjen PDM, BGN, Pusdatin Kemdikbud, Pusdatin BGN, Kemenkes)

Kendala/Permasalahan**Kendala/Permasalahan yang dialami :**

1. Dokumen Renstra Kemendikdasmen 2025-2029 masih dalam progres penyusunan
2. Penyusunan NPK/Pedoman Program Sekolah Sehat Tahap I = Fasilitas Musholla tempat kegiatan terlalu kegiatan

Strategi/Tindak Lanjut**Strategi/Tindakanlanjutan yang telah dilakukan :**

1. Tim perencanaan Kemendikdasmen mengadakan rapat virtual untuk menentukan target IKK Renstra Kemendikdasmen 2025-2029.
2. Panitia kegiatan memberikan alternatif Masjid di luar tempat kegiatan agar peserta dapat beribadah lebih efektif.



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



[SK 3] Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Sekolah Dasar

[IKK 3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sekolah Dasar dengan kategori sangat baik

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I :

1. Revisi DIPA
2. Pengelolaan UP dan TUP dengan baik
3. Penginputan capaian Rincian Output (RO) secara berkala dan tepat waktu
4. Melaksanakan program kegiatan Direktorat Sekolah Dasar berdasarkan jadwal yang sudah direncanakan

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami :

1. Terdapat selisih antara perencanaan target penyerapan anggaran dengan realisasi penyerapan anggaran sehingga menyebabkan deviasi halaman III DIPA

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/tindaklanjut yang dilakukan :

1. Pimpinan Direktorat Sekolah Dasar meminta seluruh pegawai menyesuaikan kembali jadwal pelaksanaan kegiatan agar dapat mengoptimalkan daya serap anggaran

[SK 3] Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Sekolah Dasar

[IKK 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sekolah Dasar minimal A

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I tahun 2025 :

1. Penetapan perencanaan target kinerja Direktorat Sekolah Dasar pada aplikasi SAKTI dan Monev Bappenas
2. Penginputan capaian target kinerja pada aplikasi SAKTI dan Monev Bappenas per bulan secara berkala dan tepat waktu

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami :

1. Dokumen Renstra Kemendikdasmen 2025-2029 masih dalam progres penyusunan atau belum terbit yang menyebabkan belum ada ketetapan target yang disepakati antara Direktorat SD dengan satker Eselon I Kemendikdasmen

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi//tindaklanjut yang telah dilakukan :



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

1. Tim perencanaan/evaluasi Kemendikdasmen mengadakan rapat virtual untuk menentukan target IKK Direktorat Sekolah Dasar pada aplikasi SAKTI dan Monev Bappenas yang sifatnya sementara

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DF.7596.QDB.203] SD yang mendapatkan Dukungan Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun	Lembaga	0	109	Rp14.442.697.000	Rp3.061.250.635	21.20
2	[DF.7596.RBI.291] SD yang Direvitalisasi	unit	0	480	Rp4.892.954.639.000	Rp2.063.133.490.635	42.17
3	[DI.7601.QDB.231] SD yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	Lembaga	0	0	Rp3.147.635.000	Rp769.445.160	24.45
4	[DI.7601.QDB.233] SD yang Melaksanakan Program UKS	Lembaga	0	0	Rp30.938.516.000	Rp1.783.911.876	5.77
5	[DI.7601.QDB.238] SD Yang Menerapkan Kurikulum Yang Berlaku	Lembaga	0	0	Rp15.627.480.000	Rp4.161.018.117	26.63
6	[DI.7601.QDB.280] SD yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu	Lembaga	0	19	Rp143.453.494.000	Rp31.727.309.300	22.12
7	[DI.7601.RAA.293] SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran	Unit	0	0	Rp4.221.561.795.000	Rp4.480.605.192	0.11
8	[WA.7606.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
9	[WA.7606.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp2.990.000.000	Rp1.521.311.188	50.88
10	[WA.7606.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp30.910.903.000	Rp19.527.299.391	63.17
Total Anggaran					Rp9.356.037.159.000	Rp2.130.165.641.494	22.77

D. Rekomendasi Pimpinan



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



1. Seluruh tim kerja perlu menyesuaikan kembali jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah ditentukan untuk mengoptimalkan daya serap anggaran agar tidak terjadi standar deviasi halaman III pada periode berikutnya;
2. Tim perencanaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja perlu menyusun rancangan target PK dan IKK dengan tim kerja teknis saat rapat pimpinan unit kerja internal agar menghindari perselisihan pendapat dalam menentukan target IKK dan RO;
3. Tim kerja dan pengelola perlu berkoordinasi untuk menentukan tempat kegiatan yang aman dan nyaman bagi peserta atau narasumber kegiatan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan kondusif.

Jakarta, 28 Agustus 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Sekolah Dasar Mochammad Salim Somad
---	--



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E



Lampiran VI. Laporan Kinerja Direktorat Sekolah Dasar Triwulan II Tahun 2025



Laporan Kinerja Triwulan 2 Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Direktorat Sekolah Dasar selama triwulan 2 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 2	Realisasi
[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas				
[IKK 1.1] Jumlah kab/kota yang menerima program afirmasi pada jenjang SD	514	Lembaga	0	0
[IKK 1.2] Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD	37403	Orang	0	0
[IKK 1.3] Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras	11,58	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas				
[IKK 2.1] Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	48,77	Persen	5	0
[IKK 2.2] Persentase SD yang menerapkan kurikulum yang berlaku	98,1	Persen	0	0
[IKK 2.3] Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	73,2	Persen	0	0
[SK 3] Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Sekolah Dasar				
[IKK 3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sekolah Dasar dengan kategori sangat baik	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sekolah Dasar minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas
[IKK 1.1] Jumlah kab/kota yang menerima program afirmasi pada jenjang SD

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan II :



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF



1. Pemutakhiran Data Peserta Didik Kesetaraan
2. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan
3. Uji keterbacaan bahan ajar dan muatan khusus pendidikan kesetaraan
4. Strategi Optimalisasi Sumberdaya Pembelajaran Tersedia
5. Pendampingan dan Advokasi Implementasi Program Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan
6. Penyusunan Juknis Bantuan SPAB Sekolah Dasar

Kendala/Permasalahan

Kendala/Permasalahan yang dialami :

1. Pemutakhiran data peserta didik kesetaraan = tata letak kursi belum sesuai dengan kebutuhan kerja tim menyebabkan perlu adanya waktu untuk menyesuaikan posisi kursi sesuai dengan kebutuhan kelompok

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/tindakan lanjut yang telah dilakukan :

1. Tata letak kursi sebaiknya diinfokan sejak awal

[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas
[IKK 1.2] Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode triwulan II :

1. Penyusunan Pedoman dan Dokumen Pendampingan Penanggulangan Anak Tidak Sekolah (ATS)
2. Advokasi Penanggulangan Anak Tidak Sekolah
3. Koordinasi Advokasi ke Pemda oleh UPT dan Koordinasi Lintas Unit Utama
4. Penguatan Penyusunan Bahan Ajar Pendidikan Kesetaraan

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami :

1. Koneksi Wifi kurang stabil untuk kegiatan yang dilakukan secara hybrid dan live youtube dengan peserta dari seluruh Indonesia
2. Anggaran yang tersedia full day meeting, sedangkan narasumber berasal dari luar Jabodetabek yang memerlukan akomodasi penginapan
3. Terdapat anggaran kegiatan dengan jumlah nominal yang sangat besar menyebabkan kesenjangan yang jauh antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2006 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE



Strategi/tindakan lanjut yang telah dilakukan :

1. Menginformasikan kepada bagian pengadaan agar untuk kegiatan hybrid dan Live Youtube, agar dipisahkan antara pemakaian Wifi di ruangan dan untuk live (disiapkan LAN khusus untuk live)
2. Menyampaikan kepada pengelola keuangan dan tim perencanaan agar melakukan revisi anggaran untuk menyediakan fasilitas fullboard meeting bagi narasumber
3. Tim perencanaan dan evaluasi perlu mengoordinasikan kegiatan dengan pimpinan dan PIC melalui Rapim C

**[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas
[IKK 1.3] Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras****Progress/Kegiatan****Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan II tahun 2025 :**

1. Survey Harga Penentuan Unit Cost
2. PKS Dengan Perguruan Tinggi
3. Konfirmasi data sasaran Revitalisasi
4. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Revitalisasi Dengan Pemda
5. Rapat Persiapan Bimbingan Teknis Sarana Prasarana Sekolah Dasar
6. Penyaluran Bantuan Revitalisasi Sekolah Dasar telah tersalurkan ke 4 (Empat) Sekolah Dasar pada Juni 2025.

Kendala/Permasalahan**Kendala/permasalahan yang dialami :**

1. Jumlah penetapan target awal SD yang menerima sebesar 4.053 sekolah, sedangkan target pada SK Sasaran berjumlah 3.903 sekolah
2. Terdapat 5 sekolah yang masih dalam proses penyaluran bantuan, dan 3.894 sekolah masih menunggu SK Penetapan Penerima setelah PKS
3. Realisasi IKK belum dapat dihitung dikarenakan sumber data kategori SD yang memenuhi SNP Sarpras berasal Pusdatin dan Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP)

Strategi/Tindak Lanjut**Solusi/tindakan lanjut yang telah dilakukan :**

1. Tim Direktorat Sekolah Dasar perlu mengoordinasikan kembali dengan Eselon I Kemendikdasmen
2. Tim sarpras selalu memonitoring progres penyaluran bantuan
3. Pengisian capaian Kinerja IKK pada pelaporan kinerja dianggap belum terealisasi oleh satuan kerja meskipun sudah terdapat bantuan revitalisasi yang diberikan pada jenjang sekolah dasar



Cetakan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas
[IKK 2.1] Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan II :

1. Konsinyering perencanaan berbasis data
2. Konsinyering Penilaian Usulan DAK Fisik Tahun 2026
3. Pemantauan Dana Transfer Daerah 2024
4. Review Juknis BOSP 2026
5. Penyusunan Bahan/Materi Advokasi Wajar 13 tahun
6. Diseminasi Kebijakan Pendidikan Dasar Wajar 13 tahun
7. Diseminasi Dapodik Terkait DAK
8. Reviu dan Finalisasi instrumen Analisa penerapan Koding dan KA dalam pembelajaran
9. Pelaksanaan Analisa penerapan Koding dan KA dalam pembelajaran
10. Penyusunan draft dan penetapan SK LPD
11. Harmonisasi Program Digitalisasi Sekolah Dasar
12. Peluncuran Program Revitalisasi Sekolah Dasar
13. Penyaluran bantuan Digitalisasi Pembelajaran tersalurkan ke 23 sekolah
14. Diskusi Kajian Awal Persiapan Program Timker pembelajaran
15. Pengumuman lembaga yang lolos menjadi LPD
16. Reviu dan Finalisasi modul penerapan kurikulum dalam pembelajaran

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami :

1. Sebagian anggaran kegiatan masih diblokir AA yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan
2. Penerima manfaat mengalami keterlambatan dalam menerima bantuan dikarenakan PIC Program masih dalam proses pengajuan pencairan anggaran agar dapat melanjutkan penyaluran bantuan digitalisasi ke target sekolah yang masih belum menerima bantuan
3. Reviu dan Finalisasi modul penerapan kurikulum dalam pembelajaran = Wifi/jaringan internet tidak terlalu baik mengakibatkan sistem aplikasi zoom meeting bermasalah mulai dari audio sulit terhubung dengan sambungan laptop hingga terkendala saat berkomunikasi dengan narasumber di zoom meeting, dan Musholla berada di basement hotel dengan aroma dan lokasi yang kurang nyaman
4. Realisasi IKK belum dapat dihitung dikarenakan sumber data berasal Pusdatin dan Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP)



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya menggunakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF



Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/tindaklanjutan yang telah dilakukan :

1. Tim teknis selalu melakukan koordinasi dengan pimpinan dan tim perencanaan kegiatan dan anggaran secara berkala
2. Pengelola program bantuan memberikan informasi kepada pihak sekolah yang telah mengajukan bantuan apabila bantuan telah tersalurkan
3. Pengelola program kegiatan berupaya untuk mencari lokasi penyelenggaraan kegiatan lain mulai dari penyediaan fasilitas Wifi yang lancar, ruang meeting yang nyaman/tidak berisik mengganggu ruang rapat lain, dan ruang meeting yang tidak sempit
4. Pengisian capaian kinerja IKK pada pelaporan kinerja dianggap belum terealisasi oleh satuan kerja meskipun sudah terdapat bantuan peningkatan mutu yang diberikan pada jenjang sekolah dasar

[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas
[IKK 2.2] Persentase SD yang menerapkan kurikulum yang berlaku

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan II :

1. Pemetaan, Penyusunan Script, Reviu dan Finalisasi Konten Interaktif Program Digitalisasi Pembelajaran
2. Pendampingan dan pembimbingan pengadaan E-Ijazah di Dinas Pendidikan
3. Pengembangan aplikasi E-Rapor

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami :

1. Pemetaan, Penyusunan Script, Reviu dan Finalisasi Konten Interaktif Program Digitalisasi Pembelajaran = Desain ruang sidang yang memanjang menjadi penghalang untuk berinteraksi secara mobile
2. Realisasi IKK belum dapat dihitung dikarenakan sumber data berasal Pusdatin

Strategi/Tindak Lanjut

Solusi/Tindaklanjutan yang telah dilakukan :

1. Formasi/desain ruang sidang diubah menjadi bentuk letter U agar dapat mengoptimalkan penyelesaian tugasnya karena pada pertemuan kegiatan merupakan finalisasi dari hasil sebelumnya
2. Pengisian capaian kinerja IKK pada pelaporan kinerja dianggap belum terealisasi oleh satuan kerja meskipun sudah terdapat bantuan peningkatan mutu yang diberikan pada jenjang sekolah dasar

[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas
[IKK 2.3] Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik

Progress/Kegiatan



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan II :

1. Praktik baik program sekolah sehat
2. Penyusunan Bahan Edukasi berupa Panduan Gizi Seimbang dan pembiasaan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
3. Kunjungan Langsung Pelaksanaan MBG di daerah (Responden/sasaran satuan pendidikan, SPPG, Dinas Pendidikan, BB/BPMP)
4. Penyusunan Bahan Advokasi berupa Pedoman pelaksanaan MBG di Satuan Pendidikan
5. Penyusunan Pedoman dan Instrumen Kunjungan Lapangan
6. Penyiapan bahan publikasi terkait pelaksanaan Program MBG
7. Sosialisasi Pedoman MBG di Satuan pendidikan dan bahan Edukasi Gizi

Kendala/Permasalahan**Kendala/permasalahan yang dialami :**

1. Penyusunan Bahan Advokasi dan Edukasi dalam Pelaksanaan MBG di Sekolah Dasar TAHAP II = tata letak kursi belum sesuai dengan kebutuhan kerja tim, sehingga perlu waktu untuk menyesuaikan posisi kursi sesuai dengan kebutuhan kelompok
2. Sosialisasi Pedoman MBG di Satuan pendidikan dan bahan Edukasi Gizi = terdapat banyak kelompok kerja dikarenakan penugasan yang paralel yang mengakibatkan tim untuk membantu webinar berkurang
3. Terdapat kegiatan yang anggaran telah habis digunakan namun masih terdapat batch/tahap sehingga kegiatan tidak lagi dilaksanakan
4. Realisasi IKK belum dapat dihitung dikarenakan sumber data berasal Pusdatin

Strategi/Tindak Lanjut**Solusi/Tindakan lanjut yang telah dilakukan :**

1. Penyusunan Bahan Advokasi dan Edukasi dalam Pelaksanaan MBG di Sekolah Dasar TAHAP II = menyesuaikan posisi kursi sesuai dengan kebutuhan kelompok
2. Sosialisasi Pedoman MBG di Satuan pendidikan dan bahan Edukasi Gizi = Teknis webinar dapat disupport oleh tim anak magang, supaya tim inti substansi mengerjakan hal yang lain untuk kegiatan berikutnya
3. Menggunakan alokasi sisa anggaran yang tersedia jika masih ada
4. Informasi capaian kinerja dapat diperoleh pada saat akhir tahun

[SK 3] Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Sekolah Dasar**[IKK 3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sekolah Dasar dengan kategori sangat baik****Progress/Kegiatan****Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan II :**

1. Revisi DIPA



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2. Pengelolaan UP dan TUP
3. Penginputan capaian Rincian Output (RO) secara berkala dan tepat waktu
4. Melaksanakan program kegiatan Direktorat Sekolah Dasar berdasarkan jadwal yang sudah direncanakan

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami :

1. Terdapat selisih yang jauh antara perencanaan target penyerapan anggaran dengan realisasi penyerapan anggaran sehingga menyebabkan deviasi halaman III DIPA
2. Adanya keterlambatan dalam melaporkan UP

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/tindakan yang dilakukan :

1. Pimpinan meminta seluruh pegawai menyesuaikan kembali jadwal pelaksanaan kegiatan agar dapat mengoptimalkan daya serap anggaran
2. Pimpinan perlu mensosialisasikan kepada pengelola keuangan untuk segera melaporkan up agar tidak menjadi temuan saat pemeriksaan

[SK 3] Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Sekolah Dasar

[IKK 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sekolah Dasar minimal A

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan II tahun 2025 :

1. Penetapan perencanaan target kinerja Rincian Out (RO) SD yang Direvitalisasi dan SD yang Memperoleh Digitalisasi dalam Pembelajaran
2. Penginputan capaian target kinerja pada aplikasi SAKTI dan Monev Bappenas per bulan secara berkala dan tepat waktu
3. Rapat Pimpinan Satuan Kerja setiap minggu yang membahas perkembangan kinerja tim kerja Direktorat Sekolah Dasar
4. Penyusunan Laporan Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2025 dengan tepat waktu
5. Rapat Pimpinan Satuan Kerja setiap minggu yang membahas perkembangan kinerja tim kerja Direktorat Sekolah Dasar (Pelaporan Kinerja)
6. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Sekolah Dasar (Termasuk POS Perencanaan s.d. Evaluasi Kinerja)

Kendala/Permasalahan

Kendala/permasalahan yang dialami :

1. Masih banyak SOP yang belum dibuat oleh tim kerja dikarenakan petugas tim kerja teknis kurang memahami tata cara SOP (*flowchart* SOP, dan keterkaitan antar SOP)



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2. Dokumen perencanaan Direktorat Sekolah Dasar belum ada dikarenakan Renstra Kemendikdasmen 2025-2029 masih dalam progres penyusunan atau belum terbit

Strategi/Tindak Lanjut

Solusi/Tindakan lanjut yang telah dilakukan :

1. Mengundang narasumber eksternal yang ahli dalam penyusunan SOP untuk memberikan ilmu sekaligus pemahaman kepada seluruh staf Direktorat Sekolah Dasar, serta memonitoring perkembangan penyusunan POS secara berkala
2. Seluruh pegawai Direktorat Sekolah Dasar menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menjadi acuan dasar dalam melaksanakan program kerja
3. Menyusun rancangan/model matriks peran bagi hasil untuk menguraikan secara detail keterkaitan Indikator Kinerja Kunci (IKK), maupun Rincian Output (RO) dengan peran pegawai dalam melaksanakan tugas

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DF.7596.QDB.203] SD yang mendapatkan Dukungan Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun	Lembaga	0	109	Rp14.442.697.000	Rp3.061.250.635	21.20
2	[DF.7596.RBI.291] SD yang Direvitalisasi	unit	4	480	Rp4.892.954.639.000	Rp2.063.133.490.635	42.17
3	[DI.7601.QDB.231] SD yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	Lembaga	0	0	Rp3.147.635.000	Rp769.445.160	24.45
4	[DI.7601.QDB.233] SD yang Melaksanakan Program UKS	Lembaga	0	0	Rp30.938.516.000	Rp1.783.911.876	5.77
5	[DI.7601.QDB.238] SD Yang Menerapkan Kurikulum Yang Bertaku	Lembaga	0	0	Rp15.627.480.000	Rp4.161.018.117	26.63
6	[DI.7601.QDB.280] SD yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu	Lembaga	15	19	Rp143.453.494.000	Rp31.727.309.300	22.12



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
7	[DI.7601.RAA.293] SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran	Unit	0	0	Rp4.221.561.795.000	Rp4.480.605.192	0.11
8	[WA.7606.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
9	[WA.7606.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp2.990.000.000	Rp1.521.311.188	50.88
10	[WA.7606.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp30.910.903.000	Rp19.527.299.391	63.17
Total Anggaran					Rp9.356.037.159.000	Rp2.130.165.641.494	22.77

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Seluruh tim kerja diwajibkan menyelesaikan seluruh POS terhadap program yang dilaksanakan;
2. Seluruh tim kerja wajib melengkapi dokumen perencanaan mulai dari PK Direktur, Renaksi, Renja, Cascading;
3. Tim evaluasi akuntabilitas kinerja wajib mengirimkan 1 pegawai untuk mengikuti pelatihan Pusdiklat SAKIP untuk mengoptimalkan nilai Akuntabilitas Kinerja jika Pusdiklat menyelenggarakan tahun ini;
4. Tim perencanaan akuntabilitas kinerja harus merevisi DIPA dan RKA-K/L secara berkala;
5. Tim kerja teknis wajib selalu memberikan waktu luang dengan tim perencanaan/evaluasi kinerja untuk merekapitulasi data evaluasi kinerja yang diperlukan.

Jakarta, 29 Agustus 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Sekolah Dasar
 Mochammad Salim Somad



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Lampiran VII. Laporan Kinerja Direktorat Sekolah Dasar Triwulan III Tahun 2025



Laporan Kinerja Triwulan 3 Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Direktorat Sekolah Dasar selama triwulan 3 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW ₃	Realisasi
[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas				
[IKK 1.1] Jumlah kab/kota yang menerima program afirmasi pada jenjang SD	514	Lembaga	476	372
[IKK 1.2] Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD	37403	Orang	12450	26237
[IKK 1.3] Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras	11,58	Persen	9,59	0
[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas				
[IKK 2.1] Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	48,77	Persen	30	0
[IKK 2.2] Persentase SD yang menerapkan kurikulum yang berlaku	98,1	Persen	73,52	0
[IKK 2.3] Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	73,2	Persen	60,50	0
[SK 3] Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Sekolah Dasar				
[IKK 3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sekolah Dasar dengan kategori sangat baik	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sekolah Dasar minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas

[IKK 1.1] Jumlah kab/kota yang menerima program afirmasi pada jenjang SD

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan III :



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

1. Implementasi Dukungan Program Prioritas Direktorat SD
2. Pendampingan dan Advokasi Implementasi Program Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan ke-233 kab/kota

Kendala/Permasalahan

Tidak ada kendala/permasalahan yang dialami.

Strategi/Tindak Lanjut

Tidak ada strategi/tindaklanjut yang dilakukan.

[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas
[IKK 1.2] Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan III :

1. Pendampingan Penanggulangan Anak Tidak Sekolah (ATS) Jenjang Pendidikan Dasar ke-342 kab/kota
2. Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah

Kendala/Permasalahan

Tidak ada kendala/permasalahan yang dialami.

Strategi/Tindak Lanjut

Tidak ada strategi/tindaklanjut.

[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas
[IKK 1.3] Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan III :

1. Penyediaan Tenaga Ahli
2. Penyusunan Kebijakan Program Sarana Prasarana Sekolah Dasar
3. Rapat Persiapan Bimbingan Teknis Sarana Prasarana Sekolah Dasar
4. Penyaluran Bantuan Revitalisasi Sekolah Dasar ke 5.691 sekolah dasar
5. Penyusunan NPK Program Digitalisasi Sekolah Dasar
6. Verifikasi Data Bantuan Digitalisasi Pembelajaran
7. Koordinasi Pengadaan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



8. TOT Narasumber Bimtek Pemanfaatan Bantuan Digitalisasi
9. Penetapan SK penerima bantuan
10. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Bantuan ke satuan pendidikan angkatan 1 dan 2
11. TOT Persiapan Bimtek Daerah Program Digitalisasi Sekolah Dasar
12. Penyaluran Bantuan Digitalisasi Pembelajaran ke 20.508 sekolah

Kendala/Permasalahan

Kendala/Permasalahan yang dialami :

1. Provinsi Aceh menggunakan rekening yang berbeda dari provinsi lainnya, yaitu Bank Syariah Indonesia, dan terdapat sekolah yang belum membuka rekening sehingga menyebabkan penyaluran ditunda
2. Realisasi kinerja IKK belum dapat dihitung dikarenakan data berasal dari Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP) dan dapat dihitung pada saat akhir tahun
3. Terdapat jadwal pengiriman bantuan digitalisasi yang tidak sesuai berdasarkan waktu yang ditetapkan saat perencanaan jadwal sehingga jumlah bantuan digitalisasi untuk pembelajaran sekolah juga tidak sesuai

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/Tindakan lanjut yang telah dilakukan :

1. Tim kerja internal mengonfirmasi kepada sekolah tersebut, dan memberikan arahan agar segera membuka rekening untuk revitalisasi
2. Tim perencanaan dan evaluasi internal selalu mengoordinasikan dengan pimpinan dan tim sarpras terkait perkembangan program SD yang Direvitalisasi secara berkala
3. Melakukan perubahan jadwal serta jumlah bantuan yang dikirimkan pada periode waktu berikutnya

[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas

[IKK 2.1] Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan III :

1. Pengadaan Tenaga Ahli
2. Movev Asesmen Nasional 2025 (Supervisi Pelaksanaan ANBK Tahun 2025)
3. Finalisasi bahan/materi peningkatan pemahaman Kebijakan Uji Kompetensi Siswa
4. Pemantauan pelaksanaan Uji Kompetensi Siswa tahun 2025.
5. Reviu dan finalisasi bahan advokasi peningkatan literasi dan numerasi



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E



6. Reviu dan Finalisasi modul penerapan pembelajaran mendalam
7. Penyaluran Bantuan Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan Direktorat SD ke 50 kab/kota
8. Pelatihan implementasi Sistem PMP kepada tim BBPMP/BPMP
9. Analisa Program Direktorat Sekolah Dasar

Kendala/Permasalahan

Tidak ada kendala/permasalahan yang dialami.

Strategi/Tindak Lanjut

Tidak ada strategi/tindaklanjutan.

[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas [IKK 2.2] Persentase SD yang menerapkan kurikulum yang berlaku

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan III :

1. Workshop Penyusunan Buku Digitalisasi Interaktif ke 27 kab/kota
2. Penyusunan KSP Terintegrasi Pendidikan Perubahan Iklim
3. Internalisasi pendidikan perubahan iklim
4. Workshop Penguatan Kompetensi Numerasi Sekolah Dasar ke 26 kab/kota
5. Peringatan Gerakan Numerasi Nasional
6. Uji Keterbacaan Buku Saku Benahi Numerasi Jenjang SD
7. Benchmarking Pelaksanaan Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial

Kendala/Permasalahan

Kendala/Permasalahan yang dialami :

1. Workshop Penguatan Kompetensi Numerasi Sekolah Dasar = Tempat pelaksanaan kegiatan yang kurang nyaman dikarenakan kebersihan tempat kegiatan yang kurang higienis menyebabkan adanya peserta kegiatan terjatuh/terpeleset, serta kamar mandi yang memiliki drainase kurang baik mengakibatkan lantai kamar mandi berair
2. Capaian kinerja IKK belum dapat diperoleh karena sumber data berasal dari Pusdatin

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/tindaklanjutan yang telah dilakukan :



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

1. Panitia kegiatan menyampaikan pihak hotel agar ruangan yang tidak bersih segera diatasi, serta saran untuk memperbaiki fasilitas kamar mandi yang bermasalah

2. Tim SAKIP Mengoordinasikan sumber data ke pimpinan dan tim pengelola program SD yang Menerapkan Kurikulum yang Berlaku untuk meminta data yang diperlukan ke Pusdatin saat akhir tahun

[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas

[IKK 2.3] Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan III :

1. Webinar: Penguatan Karakter melalui kependuan ke 80 kab/kota
2. Pendampingan Sekolah Aman, Nyaman, dan Menyenangkan ke 25 kab/kota
3. Pembekalan Sahabat Sekolah Dasar ke 80 kab/kota
4. Implementasi Program Sekolah Sehat
5. Penjaringan data dan Informasi Dukungan pelaksanaan Program MBG

Kendala/Permasalahan

Tidak ada kendala/permasalahan yang dialami.

Strategi/Tindak Lanjut

Tidak ada strategi/tindak lanjut yang dilakukan.

[SK 3] Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Sekolah Dasar

[IKK 3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sekolah Dasar dengan kategori sangat baik

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan III :

1. Revisi DIPA
2. Pengelolaan UP dan TUP
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan saat
4. Menginput realisasi kinerja Direktorat Sekolah Dasar pada SAKTI dan Monev Bappenas dengan tepat waktu

Kendala/Permasalahan

Kendala/Permasalahan yang dialami :



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

1. Terdapat deviasi halaman III DIPA yang menyebabkan nilai kinerja anggaran Direktorat SD masih rendah

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/Tindakan lanjut yang dilakukan :

1. Merevisi DIPA, dan mengubah rencana jadwal pelaksanaan kegiatan

[SK 3] Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Sekolah Dasar

[IKK 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sekolah Dasar minimal A

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan III :

1. Penginputan capaian kinerja pada aplikasi SAKTI dan Monev Bappenas setiap bulan dengan tepat waktu
2. Rapat Pimpinan Kerja Internal setiap minggu yang membahas perkembangan kinerja tim kerja Direktorat Sekolah Dasar
3. Penyusunan Laporan Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2025 dengan tepat waktu
4. Perubahan rencana Sasaran Kinerja (SKP) pegawai Direktorat Sekolah Dasar

Kendala/Permasalahan

Kendala/Permasalahan yang dialami :

1. Belum adanya penilaian realisasi kinerja pegawai hingga semester I
2. Tidak ada penyelenggaraan pelatihan SAKIP baik dari Pusdiklat maupun lembaga resmi lainnya yang menyebabkan tidak ada peningkatan kompetensi pegawai dalam SAKIP internal

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi/tindakan lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dialami :

1. Setiap pegawai menyesuaikan kembali rencana SKP pegawai terbaru
2. Satuan kerja akan menggunakan sertifikat pengalaman kerja bagi anggota yang sudah menjadi anggota tim SAKIP berdasarkan kriteria tertentu

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF



No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DF.7596.QDB.203] SD yang mendapatkan Dukungan Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun	Lembaga	275	265	Rp14.442.697.000	Rp3.963.024.780	27.44
2	[DF.7596.RBI.291] SD yang Direvitalisasi	unit	3572	3771	Rp4.892.954.639.000	Rp3.285.108.054.307	67.14
3	[DI.7601.QDB.231] SD yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	Lembaga	280	0	Rp3.147.635.000	Rp2.978.116.747	94.61
4	[DI.7601.QDB.233] SD yang Melaksanakan Program UKS	Lembaga	265	0	Rp30.938.516.000	Rp2.688.322.508	8.69
5	[DI.7601.QDB.238] SD Yang Menerapkan Kurikulum Yang Berlaku	Lembaga	117	0	Rp15.627.480.000	Rp6.113.746.272	39.12
6	[DI.7601.QDB.280] SD yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu	Lembaga	399	19	Rp143.453.494.000	Rp39.912.612.417	27.82
7	[DI.7601.RAA.293] SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran	Unit	36247	0	Rp4.221.561.795.000	Rp814.376.001.669	19.29
8	[WA.7606.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
9	[WA.7606.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp2.990.000.000	Rp1.691.848.288	56.58
10	[WA.7606.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp30.910.903.000	Rp23.192.156.686	75.03
Total Anggaran					Rp9.356.037.159.000	Rp4.180.023.883.674	44.68

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Sebelum menentukan lokasi kegiatan, setiap PIC dan pihak yang mereservasi kegiatan perlu melihat beberapa faktor;
2. Kegiatan yang memiliki anggaran tinggi perlu dilaksanakan secepatnya untuk mengurangi/menghindari deviasi halaman III DIPA;
3. Peserta rapim C wajib mencatat hasil rapat disertai foto sebagai salah satu data dukung SAKIP dan PIPK.



Catatan :
 • UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Lampiran VIII. Laporan Kinerja Direktorat Sekolah Dasar Triwulan IV Tahun 2025



Laporan Kinerja Triwulan 4 Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Direktorat Sekolah Dasar selama triwulan 4 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 4	Realisasi
[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas				
[IKK 1.1] Jumlah kab/kota yang menerima program afirmasi pada jenjang SD	514	Lembaga	514	514
[IKK 1.2] Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD	37403	Orang	37403	497614
[IKK 1.3] Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras	11.58	Persen	11.58	21.79
[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas				
[IKK 2.1] Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	48.77	Persen	48.77	51.58
[IKK 2.2] Persentase SD yang menerapkan kurikulum yang berlaku	98.1	Persen	98.1	99.6
[IKK 2.3] Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	73.2	Persen	73.2	66.4
[SK 3] Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Sekolah Dasar				
[IKK 3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sekolah Dasar dengan kategori sangat baik	Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik
[IKK 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sekolah Dasar minimal A	A	Predikat	A	A

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas

[IKK 1.1] Jumlah kab/kota yang menerima program afirmasi pada jenjang SD

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan IV



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"



Balai Besar
Sertifikasi

1. Supervisi Wajib Belajar 13 Tahun dan Penanganan ATS ke 25 kab/kota
2. Supervisi Implementasi Program Wajib Belajar 13 Tahun
3. Pengembangan Program Prioritas Direktorat Sekolah Dasar
4. Pendampingan Penanggulangan Anak Tidak Sekolah (ATS) Jenjang Pendidikan Dasar ke 172 kab/kota
5. Penyusunan Pedoman dan Dokumen Pendampingan Penanggulangan Anak Tidak Sekolah (ATS)
6. Monitoring dan Evaluasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
7. Visitasi Bantuan SPAB dan Sarpras
8. Bimbingan teknis SPAB
9. Penyaluran Bantuan Satuan Pendidikan Aman Bencana ke 1.022 sekolah (termasuk PAUD dan SMP)
10. Verifikasi dan Validasi SPAB

Kendala/Permasalahan

Permasalahan yang dialami

1. Supervisi Implementasi Program Wajib Belajar 13 Tahun : rencana jadwal pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lainnya
2. Bimbingan Teknis Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Sekolah Dasar : Jarak lokasi daerah yang terlalu jauh menyebabkan petugas pusat memerlukan transportasi untuk menuju lokasi yang ditargetkan
3. Lokasi kunjungan pelaksanaan kegiatan yang terlalu jauh disertai cuaca yang kurang mendukung

Strategi/Tindak Lanjut

Tindakan yang sudah dilakukan

1. Penanggungjawab kegiatan mengatur kembali jadwal pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan berdasarkan waktu ketersediaan peserta kegiatan
2. Petugas pusat berkoordinasi dengan UPT untuk menyediakan transportasi milik UPT untuk membantu dalam operasional
3. Panitia petugas pusat berkoordinasi dengan petugas daerah untuk mempersiapkan kendaraan, dan berbagai fasilitas lainnya agar kegiatan berjalan dengan lancar

[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas

[IKK 1.2] Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di jenjang SD

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan IV

1. Pendampingan Penanggulangan Anak Tidak Sekolah (ATS) Jenjang Pendidikan Dasar ke 172 kab/kota
2. Penyusunan Pedoman dan Dokumen Pendampingan Penanggulangan Anak Tidak Sekolah (ATS)



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSF



Supervisi Wajib Belajar 13 Tahun dan Penanganan ATS ke 25 kab/kota

Kendala/Permasalahan

Tidak ada kendala/permasalahan yang dialami.

Strategi/Tindak Lanjut

Tidak ada strategi/tindak lanjut.

**[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan SD yang merata dan berkualitas
[IKK 1.3] Persentase SD yang memenuhi SNP sarpras**

Progress/Kegiatan

Progress/kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan IV

1. Penyaluran bantuan revitalisasi sekolah dasar sebanyak 2.407 unit
2. Persiapan Pencairan Tahap 2
3. Rapat Persiapan Bimbingan Teknis Sarana Prasarana Sekolah Dasar
4. Rapat Persiapan Bimbingan Teknis Sarana Prasarana Sekolah Dasar
5. Finalisasi Dokumen Perencanaan dan PKS Batch 10 (Angkatan 3 Tahap V)
6. TOT Petugas Bimtek Bantuan Revitalisasi Jenjang Sekolah Dasar
7. Percepatan Pendampingan oleh PTN
8. Pendampingan Revitalisasi - Itjen (Kebumen dan Merauke)
9. Praktik Baik Program Revitalisasi Sekolah Dasar
10. Penyusunan Kebijakan Penyediaan Tenaga Ahli
11. Reviu Rancang Baru Rinci (DED) dan Data Dukung dengan Tenaga Ahli
12. Penyusunan Unit Cost Revitalisasi Sekolah Dasar
13. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Revitalisasi
14. Pengambilan Video Praktik Baik Program Revitalisasi Sekolah Dasar
15. Pemantauan Pelaksanaan Pendampingan oleh PTN
16. Advokasi PHTC - UPT
17. Pendampingan dan Pemantauan Pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah Dasar
18. Pendampingan Penjaminan Mutu Sekolah Dasar Tahun 2025
19. Pengolahan Data Calon Penerima Bantuan Revitalisasi 2026
20. Sosialisasi pengisian Aplikasi (Hybrid)



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSrE



21. Penilaian Lomba Video Program Sarana Prasarana Sekolah Dasar

22. Refleksi Pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah Dasar

23. Video Revitalisasi

24. Lomba Video dan Foto

Kendala/Permasalahan

Permasalahan yang dialami

1. Terdapat ada penambahan usulan bantuan revitalisasi dari daerah yang menyebabkan realisasi bantuan melebihi target kinerja yang ditetapkan
2. Pengambilan Video Praktik Baik Program Revitalisasi Sekolah Dasar = Jarak lokasi yang sangat jauh sehingga petugas pusat menggunakan kendaraan roda empat dengan berkoordinasi Dinas Pendidikan Daerah
3. Pendampingan dan Pemantauan Pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah Dasar = Jarak lokasi yang sangat jauh sehingga petugas pusat menggunakan kendaraan roda empat dengan berkoordinasi Dinas Pendidikan Daerah, dan sebagian sekolah progres fisiknya sudah diatas 50% namun belum menyusun BKU
4. TOT Petugas Bimtek Bantuan Revitalisasi Jenjang Sekolah Dasar = Fasilitas Wifi pada lokasi pelaksanaan kegiatan yang sangat buruk, sehingga panitia berkoordinasi dengan pihak lokasi kegiatan untuk mengoptimalkan jaringan Wifi

Strategi/Tindak Lanjut

Tindakan lanjut yang sudah dilakukan

1. Tim kerja pengelola revitalisasi mengusulkan kepada pimpinan dan tim perencanaan anggaran dan biaya untuk menyesuaikan kembali ketersediaan anggaran bantuan revitalisasi untuk sekolah dasar
2. Penyusunan Unit Cost Revitalisasi Sekolah Dasar : Sekolah atau dinas yang menjadi lokasi pendampingan belum sepenuhnya siap (operator tidak hadir, dokumen kurang lengkap), sehingga instansi pusat mengirim surat pemberitahuan resmi jauh hari sebelumnya, memberi reminder melalui grup koordinasi, dan memastikan kesiapan peserta minimal H-3 kegiatan

[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas

[IKK 2.1] Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan

1. Pengadaan Tenaga Ahli
2. Rapat Koordinasi Program Kerja Direktorat Sekolah dasar 2025
3. Persiapan Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Digitalisasi Pembelajaran
4. Persiapan dan Koordinasi Program Bantuan Digitalisasi Pembelajaran



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSrE



5. Pengolahan dan analisis data hasil pemantauan pelaksanaan Uji Kompetensi Siswa tahun 2025
6. Reviu dan finalisasi bahan advokasi peningkatan kualitas pembelajaran jenjang sekolah dasar
7. Pelaksanaan Analisa penerapan pembelajaran mendalam ke 25 kab/kota
8. Reviu dan Finalisasi instrumen analisa penerapan pembelajaran mendalam
9. Menyalurkan bantuan peningkatan mutu pembelajaran sekolah dasar ke 23 kab/kota
10. Manajemen Kebencanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana
11. Refleksi Implementasi Program Direktorat Sekolah Dasar
12. Semarak Sahabat Sekolah Dasar tahun 2025 dihadiri oleh 80 lembaga
13. Penyaluran Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan Direktorat SD ke 83 lembaga (Jumlah bantuan sudah termasuk bantuan yang tersalurkan pada bulan sebelumnya)
14. Koordinasi Program Prioritas Sarana Prasarana Direktorat Sekolah Dasar
15. Pengembangan SDM Sarpras
16. Bimbingan Teknis Regulasi dan Tata Kelola SPK ke 200 lembaga
17. Koordinasi Antar Lembaga ke 164 lembaga
18. Penyusunan Program kerja Mitra Pembangunan dalam Pembinaan Peserta Didik
19. SEMARAK GIAT SD (Semangat Meraih Kreativitas GIAT SD) Penganugerahan Sahabat Sekolah Dasar
20. Finalisasi majalah GIAT SD semester II
21. Peningkatan kapasitas SDM teknik pengambilan foto dan video menggunakan kamera dan handphone
22. Penyusunan Laporan Kerja Direktorat Sekolah Dasar
23. Analisa Program Direktorat Sekolah Dasar
24. Penyusunan dan Reviu Rencana Umum Pengadaan (RUP) Direktorat Sekolah Dasar
25. Pendampingan Pelaksanaan Program Prioritas Sekolah Dasar
26. Rapat koordinasi tim Kerja Direktorat Sekolah Dasar
27. Pendampingan digitalisasi pembelajaran sekolah dasar
28. Konsolidasi Program Bantuan Digitalisasi Pembelajaran
29. Boot Camp Pemanfaatan Digitalisasi Pembelajaran pada Program G7AIH
30. Pengembangan Konten Digital Pembelajaran
31. Rapat Persiapan Pelaksanaan Bantuan Digitalisasi Pembelajaran (Talkshow Digitalisasi)
32. Telah tersalurkannya bantuan digitalisasi pembelajaran sekolah dasar sebanyak 149.288 unit

Kendala/Permasalahan

Permasalahan yang dialami



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSaE



8. Implementasi Program Strategis Direktorat Sekolah Dasar

4. Penyusunan Draf dan Penetapan SK LPD (Penyusunan Proses Bisnis Penyetaraan Ijazah dan Penerimaan Siswa Kesetaraan)

Kendala/Permasalahan

Permasalahan yang Dialami

1. FGD Penyusunan FAQ ttg e-rapor = Terdapat sebagian peserta yang tidak dapat hadir dikarenakan adanya kegiatan yang diprioritaskan bagi masing-masing
2. E-Rapor merupakan aplikasi digital yang berbasis web yang mana jika tidak menyesuaikan perkembangan teknologi dapat mengurangi daya guna aplikasi
3. Terdapat anggaran kegiatan yang diblokir AA mengakibatkan kurang optimalisasi daya serap anggaran
4. Pendampingan Pembelajaran Koding AI Jenjang Sekolah Dasar :
 - pendampingan jarak jauh (daring) di daerah Tangerang Selatan dan Pekanbaru dinilai kurang optimal untuk evaluasi praktik mengajar dan memberikan umpan balik kontekstual, sehingga fasilitator perlu mendampingi secara langsung/daring
 - Keterbatasan perangkat TIK (komputer/laptop) dan jaringan internet tidak stabil/lambat merupakan kendala utama yang dihadapi di hampir semua lokasi, mulai dari Lombok Barat (rasio 1:24), Bogor, Karawang, hingga Bandung Barat

Strategi/Tindak Lanjut

Tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan

1. Para peserta berperan aktif untuk membuat suasana kegiatan menyenangkan dan bermanfaat
2. Direktorat Sekolah Dasar perlu memonitoring dan mengevaluasi atas penggunaan E-Rapor agar dapat memperbarui aplikasi sewaktu diperlukan
3. Tim perencanaan dan evaluasi anggaran dan tim penanggungjawab program melaporkan pimpinan atas anggaran kegiatan dan menyesuaikan kembali perencanaan program kegiatan tahun berikutnya
4. Pendampingan pembelajaran koding AI jenjang sekolah dasar :
 - Fasilitator perlu mendampingi secara langsung/daring
 - Tindakan lanjut yang sering diambil adalah mengizinkan siswa membawa perangkat pribadi

[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas

[IKK 2.3] Persentase SD yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan triwulan IV

1. Sosialisasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Murid Sekolah Dasar ke 514 kab/kota



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSrE



1. Terdapat peserta yang tidak hadir dikarenakan ada kegiatan prioritas peserta
2. Semarak sahabat sekolah dasar : Sahabat sekolah dasar merupakan program yang akan berjalan dalam jangka waktu panjang (minimal 5 tahun)
3. Jarak lokasi dalam perjalanan kegiatan sangat jauh
4. Banyak sekali informasi yang ingin disampaikan namun terbatas dengan jumlah hari nya
5. Penyusunan dan Reviu Rencana Umum Pengadaan (RUP) Direktorat Sekolah Dasar : Peserta kegiatan yang hadir tidak terlalu banyak yang hadir
6. Bantuan digitalisasi pembelajaran : Terdapat sekolah yang merger dan sebagian telah tutup yang menyebabkan jumlah bantuan yang tersalurkan tidak sesuai dengan SK yang ditetapkan

Strategi/Tindak Lanjut

Tindakanlanjutan yang telah dilakukan

1. Panitia kegiatan mengoptimalkan keaktifan peserta yang ada agar kegiatan tetap berjalan dengan baik
2. Direktorat Sekolah Dasar perlu mendampingi atau mensosialisasikan program ini secara berkala selama program ini masih berlangsung
3. Petugas mengoordinasikan dengan Dinas Pendidikan untuk menyediakan fasilitas kendaraan
4. Penanggungjawab kegiatan mengupayakan hari yang ada untuk memenuhi materi atau informasi yang dibutuhkan
5. Penanggungjawab kegiatan mengoptimalkan peran utama yang bersangkutan dengan topik kegiatan agar pembahasan berlangsung dengan baik
6. Pengelola program mengonfirmasikan kepada eselon I Kemendikdasmen terkait penyebab kegagalan atau ketidaksesuaian jumlah final bantuan yang telah tersalurkan disebabkan karena faktor penerima manfaat yang sekolahnya tidak beroperasi lagi, atau merger (2 sekolah atau lebih yang digabung menjadi 1 sekolah)

[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Sekolah Dasar yang berkualitas [IKK 2.2] Persentase SD yang menerapkan kurikulum yang berlaku

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan IV

1. FGD Penyusunan FAQ ttg e-rapor
2. Penyusunan instrumen analisa penerapan pembelajaran mendalam
3. Peluncuran dan Sosialisasi aplikasi E-rapor SD versi 2025 ke 514 kab/kota
4. Analisis Hasil AN 2025
5. Penyusunan Draf dan Penetapan SK LPD
6. TOT Master Trainer Pembelajaran Koding AI Jenjang Sekolah Dasar
7. Pendampingan Pembelajaran Koding AI Jenjang Sekolah Dasar



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSrE



2. Penguatan Peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Satuan Pendidikan Tahun 2025
3. Implementasi Program Sekolah Sehat (Pengolahan Data Hasil Pemantauan Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar)
4. Webinar Peran TPPK dalam Menciptakan Budaya Belajar aman, Nyaman, dan Gembira
5. Persiapan Semarak Sahabat Sekolah Dasar
6. Semarak Sahabat Sekolah Dasar yang dihadiri 80 sekolah
7. Penguatan Peran UKS di Satuan Pendidikan
8. Kunjungan Langsung Pelaksanaan MBG di daerah (Responden/sasaran satuan pendidikan, SPPG, Dinas Pendidikan, BB/BPMP)
9. Webinar: Penguatan Karakter melalui kependuan untuk 514 kab/kota

Kendala/Permasalahan

Permasalahan yang dialami

1. Sosialisasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Murid Sekolah Dasar = Peserta kegiatan yang hadir kurang dari jumlah yang diundang, dan tidak seluruh anggota tim peserta didik dapat hadir yang menyebabkan penyampaian informasi menjadi tidak merata sehingga peserta yang tidak hadir, tidak diikutsertakan pada kegiatan pendampingan, dikarenakan yang dapat menyampaikan materi adalah tim yang sudah mendapatkan briefing dari UNICEF
2. Penguatan Peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Satuan Pendidikan Tahun 2025 = Pimpinan Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Direktorat Jenderal tidak dapat hadir dalam kegiatan menyebabkan adanya pengaruh emosional bagi panitia maupun peserta, sehingga kehadiran pimpinan diwakilkan oleh Widyaprada Utama Direktorat Sekolah Dasar
3. Terdapat petugas yang belum mengisi laporan kegiatan di lokasi tersebut, sehingga panitia meminta kepada petugas untuk mengerjakan dan menyelesaikannya sebelum kegiatan di mulai
4. Webinar Peran TPPK dalam Menciptakan Budaya Belajar aman, Nyaman, dan Gembira : Penyelenggaraan webinar dilaksanakan pada saat hari guru yang mana seluruh peserta kegiatan merupakan guru sekolah dasar yang menyebabkan peserta webinar tidak terlalu banyak yang hadir
5. Semarak sahabat sekolah dasar : sebagai bentuk penguatan karakter peserta didik, program ini seharusnya dapat dihadiri oleh seluruh sekolah dasar dari seluruh kab/kota di Indonesia, namun dikarenakan keterbatasan anggaran kegiatan ini hanya dihadiri oleh sekolah yang sudah ditentukan

Strategi/Tindak Lanjut

Tindakan lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dialami

1. Peserta yang tidak hadir, tidak diikutsertakan pada kegiatan pendampingan, dikarenakan yang dapat menyampaikan materi adalah tim yang sudah mendapatkan briefing dari UNICEF
2. Kehadiran pimpinan diwakilkan oleh Widyaprada Utama Direktorat Sekolah Dasar
3. Panitia meminta kepada petugas untuk mengerjakan dan menyelesaikannya sebelum kegiatan di mulai
4. Panitia akan mempertimbangkan kembali dalam menentukan waktu pelaksanaan webinar maupun kegiatan yang akan melibatkan banyak peserta eksternal yang berasal dari berbagai kab/kota



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah dirangkai secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSrE



5.Periode berikutnya internal perlu menyesuaikan kembali perencanaan program Sahabat Sekolah Dasar hendaknya dapat diberlakukan kepada seluruh sekolah dasar yang ada di Indonesia.

[SK 3] Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Sekolah Dasar

[IKK 3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sekolah Dasar dengan kategori sangat baik

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan IV

1. Revisi DIPA
2. Pengelolaan UP dan TUP
3. Menginput realisasi kinerja Direktorat Sekolah Dasar pada SAKTI dan E-Monev Bappenas dengan tepat waktu
4. Penyelesaian tagihan
5. Belanja kontraktual
6. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK)

Kendala/Permasalahan

Permasalahan yang dialami

1. Terdapat dispensasi SPM dikarenakan bantuan sosial program SPAB yang menyebabkan pengurangan Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Strategi/Tindak Lanjut

Tindakanlanjutan yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan

1. Mengoordinasikan dengan Eselon I Kemendikdasmen untuk meminta nilai pengurangan nilai dispensasi dapat diminimalisir

[SK 3] Meningkatnya Tata Kelola Direktorat Sekolah Dasar

[IKK 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sekolah Dasar minimal A

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan IV :

1. Laporan Keuangan Direktorat SD (Penyusunan Laporan Kinerja dan Anggaran Direktorat Sekolah Dasar Triwulan III Tahun 2025)
2. Penyusunan Laporan Analisis Program dan Anggaran Direktorat Sekolah Dasar Akhir Tahun 2025
3. Analisa Pelaporan Keuangan Direktorat Sekolah Dasar\
4. Analisa Program Direktorat Sekolah Dasar (Pemusnahan Arsip & Penyelesaian Laporan Kegiatan Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025)



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSrE



5. Rapat Kerja Ketatalaksanaan dan Organisasi (Monitoring, Evaluasi, dan Reviu POS Direktorat SD 2025)
6. Implementasi Dukungan Program Prioritas Direktorat Sekolah Dasar (Pelatihan Notula untuk PPPK)
7. Rapat Kerja Ketatalaksanaan dan Organisasi (Analisis Beban Kerja (ABK) Jabatan Pelaksana pada Direktorat Sekolah Dasar)
8. Analisa Program Direktorat Sekolah Dasar (SPI)
9. Penyusunan dan Reviu Rencana Umum Pengadaan (RUP) Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2026
10. Workshop Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Kendala/Permasalahan

Permasalahan yang dialami ;

1. Terdapat banyak peserta pada surat undangan tidak bersedia hadir dikarenakan adanya kegiatan prioritas yang mendadak, dan sebagian peserta yang penting tidak terdaftar pada surat undangan
2. Sebagian peserta yang telah diberi surat penugasan banyak yang tidak dapat hadir dikarenakan tidak mengonfirmasi ke panitia kegiatan, dan adanya tugas prioritas yang mendadak
3. Terdapat operator seluler yang jaringannya kurang baik menyebabkan peserta (Termasuk panitia) kurang optimal dalam merekam ruang rapat virtual
4. Terdapat narasumber yang tidak hadir pada kegiatan

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi masalah ;

1. Penyelenggara kegiatan menyesuaikan kembali nama-nama peserta yang dibuat dalam surat penugasan
2. Ketua Panitia mengajukan ke pimpinan dan tim keuangan untuk menyesuaikan kembali honorarium peserta kegiatan jika ada perubahan peserta lagi saat kegiatan berlangsung, dan peserta yang ingin ikut kembali perlu konfirmasi ke tim keuangan kegiatan
3. Menyerahkan petugas lain yang memiliki jaringan internet yang lancar untuk merekam video rapat virtual
4. Sesi kegiatan diisi dengan pekerjaan mandiri

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

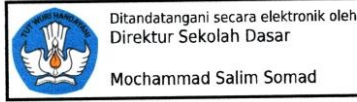
No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DF.7596.QDB.203] SD yang mendapatkan Dukungan Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun	Lembaga	514	514	Rp14.442.697.000	Rp11.001.968.534	76.18



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSrE



Jakarta, 20 Januari 2026



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF



Lampiran IX. Optimalisasi Anggaran Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725610

Laman <https://pdm.dikdasmen.go.id>

Nomor : 7535/C.C1/PR.07.04/2025

19 Agustus 2025

Lampiran : -

Hal : Optimalisasi Anggaran Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Yth. Seluruh Direktur
Di Lingkungan Ditjen PAUD Dikdasmen

Dengan hormat, kami sampaikan dalam rangka Optimalisasi Anggaran Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen serta dalam upaya mendukung Pelaksanaan Program Prioritas di Satuan kerja BB/BPMP, kami mohon agar saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi kegiatan yang berpotensi digabungkan atau dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan lainnya, kemudian melakukan penandaan blokir dengan kode A pada kegiatan tersebut.
2. Besaran anggaran kegiatan yang dilakukan penandaan blokir kode A tercantum pada tabel berikut:

No	Satuan Kerja	Anggaran Bantah	Anggaran Swakelola	Total
1	Direktorat PAUD	-	1.080.000	1.080.000
2	Direktorat SD	14.000.000	1.195.000	15.195.000
3	Direktorat SMP	-	1.125.000	1.125.000
4	Direktorat SMA	-	1.100.000	1.100.000
TOTAL		14.000.000	4.500.000	18.500.000

(anggaran dalam ribu)

3. Penyesuaian anggaran blokir pada kegiatan tersebut diharapkan tidak mengurangi, serta tetap menjaga capaian kinerja program prioritas.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian, agar penyesuaian blokir dapat dilaksanakan sebelum Selasa, 19 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Dr. Eko Susanto, S.E., M.Si.
NIP 197212282001121001

Tembusan:
Direktur Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SSRC.

Lampiran X. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025 oleh Evaluator



Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30%	26.1
2	Pengukuran Kinerja	30%	25.5
3	Pelaporan Kinerja	15%	13.8
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22.5
Predikat		A	87.9

Catatan

A. Perencanaan Kinerja

- Definisi operasional IKK 2.1 "Persentase SD yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum" belum menyertakan target implementasi Tes Kompetensi Akademik (TKA) untuk tahun 2026 dst, saat ini baru menggunakan acuan Asesmen Nasional saja. Padahal TKA merupakan salah satu Program Unggulan/Prioritas Kementerian.
- Draf Renstra Direktorat SD Tahun 2025-2029 telah disusun, namun belum ditetapkan secara formal dan dipublikasikan. Renstra eselon I belum tersedia padahal seharusnya telah ditetapkan paling lambat 1 bulan sejak renstra kementerian ditetapkan yaitu melalui Permendikdasmen 19 Tahun 2025, tanggal 7 Okt 2025.
- Draf Renstra 2025-2029 belum dapat menggambarkan kondisi sebelumnya atau tahun 2024 sebagai baseline, serta belum sepenuhnya selaras dengan target pada Perjanjian Kinerja (PK).
- Nilai anggaran pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 belum selaras dengan nilai pagu anggaran pada DIPA/RKA revisi terakhir.

B. Pengukuran Kinerja

- Pencapaian realisasi target pada TW III untuk IKK 1.1 dan 1.2 masih on the track, namun untuk IKK lainnya belum diperoleh data realisasinya karena sebagian besar realisasi targetnya tertuang nihil.
- Pada notula rapat rapim C tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Oktober 2025 belum tergambar evaluasi pengukuran kinerja yang komprehensif. Fokus substansi laporan kegiatan pun baru sebatas pada anggaran saja.
- Belum terlihat data pengukuran kinerja berjenjang dari para Ketua Tim Kerja hingga anggotanya. Hasil pengukuran kinerja pada setiap Tim Kerja juga belum seluruhnya dilaporkan.
- Belum terdapat bukti SK penempatan atau Laporan Mutasi jabatan berdasarkan pencapaian kinerja. Selain itu belum terdapat analisis jabatan dan hasil evaluasi struktur organisasi.

C. Pelaporan Kinerja



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF



1. Terdapat keterlambatan pelaporan Kinerja TW I dan II yang dilaporkan pada 28-29 Agustus 2025, seharusnya dilakukan pada bulan April dan Juli.
2. Pelaporan pengukuran kinerja belum dilakukan secara kontinu, hingga TW III belum terdapat informasi pencapaian kinerja yang komprehensif untuk sebagian besar IKK.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Dari 5 orang anggota Tim Penyusun Lakin, hanya 2 orang yang telah mengikuti diklat/pelatihan SAKIP.
2. Pada setiap TW belum terdapat informasi tindak lanjut terhadap evaluasi atau kendala pada laporan TW sebelumnya.

Rekomendasi

A. Perencanaan Kinerja

1. Berkoordinasi dengan unit Eselon I apakah pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) dapat dimasukkan sebagai perhitungan indikator kinerja IKK 2.1 untuk tahun 2026 dst.
2. Mendorong Renstra Eselon I segera terbit. Sehingga Renstra satker dapat segera disempurnakan, diformalkan, dan dipublikasikan.
3. Melengkapi Renstra dengan kondisi T-1 (2024) sebagai baseline pada IKK.
4. Melakukan revisi PK Tahun 2025 terutama pada bagian perubahan pagu anggaran.

B. Pengukuran Kinerja

1. Memastikan progres pencapaian kinerja seluruh Tim Kerja terdokumentasikan secara lengkap pada notula/laporan rapat.
2. Melengkapi dokumen SK Penempatan dan mutasi berbasis kinerja, analisis jabatan dan struktur organisasi pada satuan kerja.

C. Pelaporan Kinerja

1. Melakukan pelaporan kinerja setiap triwulannya secara tepat waktu.
2. Memastikan progres laporan kinerja seluruh Tim Kerja terdokumentasikan secara lengkap pada notula/laporan rapat.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Mengusulkan seluruh anggota tim pengelola SAKIP atau penyusun LAKIN untuk mengikuti Diklat/Pelatihan/Bimtek SAKIP.
2. Memastikan pada setiap rapat evaluasi kinerja triwulanan dilakukan pembahasan rekomendasi/tindaklanjut atas kendala dan permasalahan yang ditemui pada kinerja TW sebelumnya.

Jakarta, 10 Desember 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Inspektur II
 Purwaniati Nugraheni



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSEF


 Balai Besar
 Sertifikasi
 Elektronik

Lampiran XI. SK Tim Penyusun LAKIN Direktorat SD Tahun 2025



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725610,

Laman: <https://pdm.kemdikdasmen.go.id>

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
NOMOR : 3650/C3/PR.04.03/2025**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel serta untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Sekolah Dasar yang efektif dan efisien, perlu menelaah Laporan Kinerja;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Sekolah Dasar tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717);

	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN KPA DIREKTORAT SEKOLAH DASAR TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DIREKTORAT SEKOLAH DASAR TAHUN 2025.
KESATU	: Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun LAKIN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPA ini.
KEDUA	: Tim Penyusun LAKIN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas: 1. Menyusun Laporan Kinerja Direktorat Sekolah Dasar akhir tahun 2025; 2. Melakukan analisis pencapaian target kinerja selamatahun 2025; dan 3. Menyampaikan Laporan Kinerja Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025 melalui SPASIKITA.
KETIGA	: Tim Penyusun LAKIN bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Sekolah Dasar.
KEEMPAT	: Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2025 yang relevan.
KELIMA	: Keputusan KPA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 15 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



Moch Salim Somad, S.Kom, M.Pd
NIP. 197410062003121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT SEKOLAH DASAR
TANGGAL : 15 Desember 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAKIN 2025

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhamad Basyir Jabar	Penyusun Laporan Keuangan
2	Veruca Rendratika	Analisis Sarana Pendidikan
3.	Yudista Cahyadi Sepdiantara	Penata Layanan Operasional
4.	Handini Devi Yunitasari	Penata Layanan Operasional
5.	Muhammad Ridho Arsyah	PPNPN
6.	Wulan Ayu Indriani	Tenaga Ahli
7.	Audina Islamiyah	Tenaga Ahli

Kuasa Pengguna Anggaran,



Moch Salim Somad, S.Kom, M.Pd
NIP. 197410062003121001

Lampiran XII. Surat Undangan Review LAKIN Tahun 2025



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725610

Laman <https://pdm.kemendikdasmen.go.id>

Nomor	: 0140/C3/PR.04.03/2026	23 Januari 2026
Lampiran	: Satu lembar	
Hal	: Undangan Reviu Rancangan LAKIN Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025	

Yth.

Bapak dan Ibu (daftar terlampir)
di tempat

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyelenggarakan kegiatan Reviu Rancangan LAKIN Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Saudara untuk hadir dan berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan dimaksud yang diselenggarakan pada,

hari, tanggal : Senin, 26 Januari 2026

tempat : Gedung E Lt.18, Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.1, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

Direktorat Sekolah Dasar saat ini sedang melaksanakan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), mohon Saudara dapat hadir tepat waktu sesuai jadwal terlampir. Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi narahubung Sdr. Muhammad Basyir Jabar (WA + 62 852-1067-5603)

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Sekolah Dasar,



Moch. Salim Somad

NIP 197410062003121001



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN

Lampiran I

Nomor : 0140/C3/PR.04.03/2026

Tanggal : 23 Januari 2026

DAFTAR PESERTA

REVIU RANCANGAN LAKIN DIREKTORAT SEKOLAH DASAR TAHUN 2025

No.	Nama, NIP, Pangkat, dan Golongan	Jabatan
1.	Moch. Salim Somad, S.Kom, M.Pd 197410062003121001 Pembina Tingkat I, IV/b	Direktur Sekolah Dasar
2.	Yoto, S.E., M.A. 197902052007101001 Penata Tingkat I, III/d	Kasubbag TU
3.	Suhadi, S.Pd., M.T. 196912061992031001 Pembina Utama Muda, IV/c	Analisis Kebijakan Ahli Madya
4.	Arman Satya Prayoga, S.Pd., M.A.P. 198106292014041001 Penata, III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
5.	Diyah Purwanti, A.Md., 197511062009102002 Penata Muda, III/a	Pengolah Data dan Informasi
6.	Slamet Siswanto, SE. 197006091994031001 Penata Tingkat I, III/d	Penelaah Teknis Kebijakan
7.	Muhammad Wisnu Prabowo, S.Psi. 199601142022031013 Penata Muda, III/a	Penelaah Teknis Kebijakan
8.	Veruca Rendratika, S.Sos. 199707102022032013 Penata Muda, III/a	Penelaah Teknis Kebijakan
9.	Muhammad Basyir Jabar, S.Tr.Ak. 199811262022031004 Penata Muda, III/a	Penelaah Teknis Kebijakan
10.	Asih Setyowati, S.E. 197405052007012001 Penata Tingkat I, III/d	Pengolah Data dan Informasi
11.	Yeni Ariyanti 197105302008102001 Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Perkantoran
12.	Bayu Ervin Ocviana, A.Md. 199410192022032013 Pengatur, II/c	Pengolah Data dan Informasi
13.	Yono 198103192014091003 Pengatur, II/c	Pengadministrasi Perkantoran
14.	Wulan Ayu Indriyani Tenaga Ahli	Tenaga Ahli
15.	Muhammad Ridho Arsyah PPNPN	PPNPN



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSE

Lampiran XI. Daftar Hadir Peserta Kegiatan Review LAKIN Tahun 2025



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725610

Laman <https://pdm.dikdasmen.go.id/>

DAFTAR HADIR

Acara : Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Direktorat SD Tahun 2025
Tempat : Gedung E Lantai 18 Kemendikdasmen
Hari / Tanggal : 26 Januari 2026 - 28 Januari 2026
Waktu : 13.30 WIB s.d. Selesai
Agenda : Reviu Draft LAKIP Direktorat SD Tahun 2025

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tandatangan
1.	M. SALIM. S	SD	
2.	Toto	Dit. SD / K-TU	
3.	Diyah Purwanti	Dit. SD	
4.	Bayu Erwin O	Dit. SD / Sekretaris SPI	
5.	Hadi Susilo	Dit. SD	
6.	Toni Anggrah	Dit. SD	
7.	M. Basyir Jabar	Dit. SD	
8.	Wulan Ayu I	Dit. SD	
9.	Arman Satya	Dit. SD	
10.	Muh. Ridho	Dit. SD	
11.	Fairuz Hatabulistiwa	Dit. SD	
12.	Niknik Kartika	Dit. SD	
13.			

Lampiran XIII. Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2025 oleh Satuan Pengendalian Internal (SPI)

**KERTAS KERJA REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DIREKTORAT SEKOLAH DASAR
TAHUN 2025**

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan informasi penting	☒
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	☒
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	☒
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	☒
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	☒
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	☒
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	☒
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	☒
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim unit/unit penyusun laporan kinerja	☒
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	☒
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	☒
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktur SD	☒
	2. Sasaran dalam laporan kinerja selaras dengan Renstra	☒
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	4. IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKK dalam Perjanjian Kinerja Direktur SD 2025	☒
	5. Jika butir 4 jawabannya, tidak maka terdapat penjelasan yang memadai	☒

	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir kinerja Renstra	☒
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/hambatan dan kendala/langkah antisipasi pada setiap indikator kinerja)	☒
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	☒
	9. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) telah cukup mengukur sasaran	☒
	10. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) telah SMART	☒

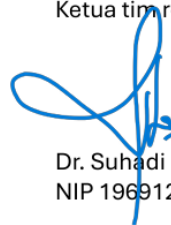
Lampiran XIII. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu

PERNYATAAN TELAH DIREVIU DIREKTORAT SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Sekolah Dasar tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Direktorat Sekolah Dasar.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 29 Januari 2026
Ketua tim reviu



Dr. Suhadi
NIP 196912061992031001



Kemendikdasmen

DIREKTORAT SEKOLAH DASAR

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,
dan Pendidikan Menengah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



ditpsd



ditpsdtv



@ditpsd_dikbud



Direktorat Sekolah Dasar



direktoratsd